

LAPORAN TAHUNAN

2024

LAPORAN TAHUNAN 2024



Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jln. Tentara Pelajar No. 3B Bogor 16111
Telp. 0251-8333964, 8325177, Faks. 0251-8314496
email: psekp@pertanian.go.id, psepkemtan@gmail.com

 psekp.setjen.pertanian.go.id  psekp kemtan  @psekp_kemtan

 psekp_kemtan  PSEKP Kementan

PSEKP, KEMANTAN
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
2025

LAPORAN TAHUNAN TA 2024



**Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
2025**

LAPORAN TAHUNAN TA 2024

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Sudi Mardianto
Ketua : Erma Suryani
Sekretaris : Julia F. Sinuraya
Anggota : Eko Nugroho
Sumedi
Eni Widjajati
Sugiarti
Muhammad Suryadi
Frans B.M. Dabukke
Lira Mailena
Ahmad Makky Ar-Rozi
Fajri Shoutun Nida
Kartika Sari Septanti
Rizghina Ikhwan
Ibnu Salman



Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
2025

KATA PENGANTAR



Laporan Tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) sebagai institusi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban. Berdasarkan Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas PSEKP sebagai unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal adalah melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Laporan ini berisi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh PSEKP selama tahun anggaran 2024 yang meliputi: struktur organisasi PSEKP, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kegiatan, program, kerja sama dan layanan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, laporan ini juga memuat sinopsis hasil-hasil analisis kebijakan yang telah dilakukan PSEKP pada tahun 2024.

Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari persiapan sampai penyelesaian laporan disampaikan terima kasih. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja PSEKP ke depan.

Bogor, 3 Februari 2025
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si.
NIP 196803161997031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Visi dan Misi	2
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.3. Sasaran Kelompok Pengguna Hasil Kajian Analisis Kebijakan ...	3
II. SUMBER DAYA MANUSIA	5
2.1. Layanan Kepegawaian	7
2.1.1. Layanan Kenaikan Pangkat	7
2.1.2. Layanan Kenaikan Gaji	7
2.1.3. Layanan Cuti Pegawai	9
2.2. Layanan Ketatausahaan	9
2.2.1. Layanan Magang Mahasiswa	10
2.2.2. Layanan Pengelolaan Kearsipan PSEKP	17
2.2.3. Layanan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Kementerian Pertanian	19
III. SARANA DAN PRASARANA	29
3.1. Aset	29
3.1.1. Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)	29
3.1.2. Barang-Barang Bergerak	29
3.2. Anggaran DIPA, PNPB, dan Kerja Sama Penelitian	33
IV. PROGRAM	36
4.1. Tujuan dan Luaran Kegiatan	36
4.2. Perencanaan Kegiatan Analisis Kebijakan Tahun Anggaran 2024	36
4.3. Permasalahan yang Menonjol dalam Pelaksanaan Kegiatan di Tim Kerja Program pada Tahun 2024	40
V. SINOPSIS ANALISIS KEBIJAKAN PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN TAHUN 2024	41
5.1. Outlook Pembangunan Pertanian 2025-2029 dan Strategi Pencapaiannya	41

5.2. Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (PANEL PETANI NASIONAL)	41
5.3. Koordinasi, Bimbingan dan Dukungan Teknis Supervisi dan Pendampingan Program Strategis Kementan	42
5.4. Analisis Responsif Dinamika Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	44
VI. KERJA SAMA DAN LAYANAN HASIL ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN	48
6.1. Kerja Sama	48
6.2. Layanan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	53
6.2.1. Bentuk-bentuk Diseminasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	53
6.2.2. Distribusi Publikasi	60
6.2.3. Perpustakaan	60
6.3. Launching Buku Perberasan	69
VII. EVALUASI DAN PELAPORAN.....	71
7.1. Kegiatan Evaluasi.....	71
7.2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi.....	72
7.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TA 2024	73
7.3.1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Analisis Kebijakan.....	73
7.3.2. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Kajian Analisis Kebijakan.....	80
7.3.3. Evaluasi Layanan Perpustakaan	83
7.3.4. Evaluasi Pelayanan Publikasi	84
7.3.5. Sarana Kajian Analisis Kebijakan	85
VIII. PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Keragaan jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut jabatan (Desember 2023-Desember 2024).....	5
2.	SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang pensiun pada tahun 2024	5
3.	Mutasi alih tugas di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2024	6
4.	Rekapitulasi SDM PSEKP menurut usia dan pendidikan akhir per bulan Desember 2024	7
5.	Kenaikan pangkat PNS Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2024.....	8
6.	Kenaikan gaji berkala pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian selama tahun 2024	8
7.	Jumlah pengajuan cuti pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berdasarkan jenis cuti, 2024	9
8.	Mahasiswa PKL Universitas BSI, 2024.....	10
9.	Jadwal pelaksanaan MBKM-Riset IPB di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024	13
10.	Timeline pelaksanaan program capstone project, 2024	14
11.	Surat masuk ke PSEKP tahun 2024	18
12.	Hasil pengawasan kearsipan internal PSEKP, 2024	19
13.	Rekap usulan uji kompetensi analis kebijakan, 2024.....	21
14.	Keterpenuhan peta jabatan analis kebijakan, 2024.....	22
15.	Daftar rincian kondisi barang inventaris Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2024 (Periode 31 Desember 2024).....	29
16.	Rekapitulasi kondisi barang inventaris peralatan kantor Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024	34
17.	Perkembangan pelaksanaan keuangan kegiatan utama dan kegiatan penunjang Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024	34
18.	Realisasi anggaran per jenis pengeluaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024	34
19.	Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024	35
20.	Rekapitulasi PNPB Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 2024.....	35

21. Judul analisis kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian PSEKP periode satu tahun dan semester, 2024	38
22. Judul policy brief, 2024	38
23. Judul proposal/KAK analisis kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian PSEKP periode satu tahun dan semester-1 TA 2025	39
24. Kegiatan kerja sama kajian di PSEKP TA 2024	48
25. Pengelolaan artikel di Jurnal AKP berdasarkan <i>Open Journal System</i> , 2024	54
26. Judul dan penulis artikel Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 22 No. 1, Juni 2024	54
27. Judul dan penulis artikel Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 22 No. 2, Desember 2024	54
28. Rekap unggahan Media Sosial PSEKP, Tahun 2024	59
29. Distribusi publikasi dokumentasi hasil analisis PSEKP, 2024	60
30. Judul penambahan koleksi tercetak baru Perpustakaan PSEKP, 2024	61
31. Kunjungan digital Perpustakaan PSEKP, 2024	64
32. Jumlah views dan unduhan per judul publikasi terbitan PSEKP pada platform Repositori Kementan, 2024	65
33. Hasil survei kepuasan layanan Perpustakaan PSEKP	67

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024.....	4
2.	Keragaan SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut usia dan tingkat pendidikan akhir per bulan Desember 2024.....	6
3.	Rencana dan implementasi PKL Universitas BSI	11
4.	Aplikasi Sigiring.....	11
5.	Tampilan UI log in.....	11
6.	Poster program PSR, 2024.....	15
7.	Poster output manajemen sampah	16
8.	Poster pemilahan sampah	16
9.	Penilaian kebijakan pelayanan sekretariat JFAK Kementan, 2024....	26
10.	Penilaian profesionalisme SDM, sekretariat JFAK Kementan, 2024 ..	26
11.	Sarana, prasarana, dan layanan daring sekretariat JFAK Kementan, 2024.....	27
12.	Hasil survei kinerja sekretariat JFAK Kementan	28
13.	Dokumentasi kegiatan pendampingan program peningkatan produksi padi melalui pompanisasi, 2024.....	44
14.	Agro Socio-economic Newsletter yang dikelola PSEKP, 2024.....	56
15.	Tampilan website PSEKP.....	57
16.	Rekapitulasi jumlah unggahan berita per bulan pada Website PSEKP 2024.....	57
17.	Rekapitulasi jumlah pengunjung per bulan, 2024.....	58
18.	Rekapitulasi pengunjung pada halaman yang sering diakses	58
19.	Perkembangan jumlah berita pada Media Sosial PSEKP, 2024	59
20.	Penambahan koleksi baru dan koleksi digital	61
21.	Penambahan record pada beberapa aplikasi perpustakaan digital PSEKP	63
22.	Kunjungan onsite Perpustakaan PSEKP per bulan.....	64
23.	Transaksi pinjaman buku dan unduhan perpustakaan digital PSEKP Agustus-Desember 2024	65
24.	Jumlah konten promosi perpustakaan per bulan, 2024	68

25. Perpustakaan PSEKP menerima penghargaan sebagai Perpustakaan Terinspirasi Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024	69
26. Seminar proposal/KAK tim analisis kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 29 Februari 2024.....	75
27. Kegiatan monitoring dan evaluasi tengah tahun kajian analisis kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 13 Agustus 2024	77
28. Kegiatan advokasi dan diseminasi hasil kajian analisis kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 23 Desember 2024	78

I. PENDAHULUAN

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan institusi setingkat Eselon II. Pendirian institusi ini berawal dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada tahun 1974. Seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali institusi ini mengalami perubahan nama. Pada tahun 1976, SAE berubah menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990, dan selanjutnya menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek Pertanian).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Dengan nama yang sama sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT/010/8/2015. Semua anggaran yang digunakan oleh PSEKP untuk membiayai belanja baik pegawai, modal, operasional maupun nonoperasional dialokasikan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Organisasi PSEKP saat ini mengacu pada Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, PSEKP adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

Dalam kurun waktu lebih dari tiga dasawarsa dari sejak berdirinya (1976–2024), PSEKP telah dipimpin oleh sembilan Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976–1983), Dr. Faisal Kasryno (1983–1989), Prof. Dr. Effendi Pasandaran (1989–1995), Prof. Dr. Achmad Suryana (1995–1998), Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto (1998–2002 dan 2005–2010), Prof. Dr. Pantjar Simatupang (2002–2005), Dr. Handewi P. Saliem (2010–2016), Dr. Ir. Abdul Basit, M.S (2016–2019), dan Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si. (2019–sekarang).

Sebagai institusi lingkup Kementerian Pertanian yang diberi mandat melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian secara nasional, PSEKP diharapkan menjadi institusi yang mampu mengintegrasikan berbagai kegiatan, yaitu analisis kebijakan pembangunan pertanian (sebagai lembaga pemerintahan), penyuluhan (sebagai elemen penunjang sistem agribisnis), dan advokasi pembangunan pertanian (sebagai lembaga kemasyarakatan) guna mewujudkan tujuan pembangunan dengan pelayanan berkelanjutan. Program analisis sosial ekonomi dan kebijakan PSEKP dirancang untuk meningkatkan peran dan kemampuan institusi PSEKP dalam merumuskan alternatif dan advokasi kebijakan pembangunan pertanian pada masa depan. Hal ini secara rinci telah dituangkan dalam Renstra yang memayungi program tersebut serta menetapkan strategi dan kebijakan umum untuk merealisasikannya. Program tersebut disusun berlandaskan visi dan misi yang futuristik sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan paradigma pembangunan pertanian masa datang.

Inovasi kebijakan yang dihasilkan PSEKP harus berkualitas, cepat, dan akurat serta difokuskan pada masalah-masalah aktual pembangunan sektor pertanian yang berkaitan dengan: (1) perdagangan multilateral perjanjian regional dan bilateral, (2) informasi dan data yang berkaitan dengan dinamika sosial ekonomi perdesaan secara berkala, (3) informasi dan data mengenai penyebab penurunan produktivitas produk pertanian (*supply constraint*), (4) peningkatan daya saing, nilai tambah, dan pengembangan produk pertanian (agroindustri), (5) ketahanan pangan dan kemiskinan terkait SDG's, dan (6) penurunan kualitas infrastruktur dan sumber daya pertanian.

1.1. Visi dan Misi

Visi tersebut dirumuskan berdasarkan kesadaran bahwa PSEKP adalah lembaga pemerintah, sehingga harus berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui partisipasi secara aktif dalam memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

Visi

“Menjadi pusat analisis yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan invensi dan inovasi di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern”

Untuk mewujudkan visi di atas, misi yang akan dijadikan sebagai arahan kegiatan PSEKP adalah:

Misi

1. Melakukan analisis guna menghasilkan inovasi sosial ekonomi dan kebijakan pertanian sesuai kebutuhan.
2. Melakukan analisis, sintesis, telaah ulang, atau evaluasi kebijakan pertanian untuk menghasilkan rumusan alternatif atau penyempurnaan kebijakan pembangunan pertanian.
3. Melakukan layanan rekomendasi, diseminasi, dan advokasi kebijakan pertanian dalam mendukung pembangunan menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan kerja sama, kemampuan SDM, dan kapasitas institusi PSEKP dalam pelaksanaan analisis dan kajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta meningkatkan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 BAB XVII Pasal 287 dan Pasal 288, tugas dan fungsi PSEKP sebagai bagian dari institusi Kementerian Pertanian adalah:

Tugas:

Melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian

Fungsi:

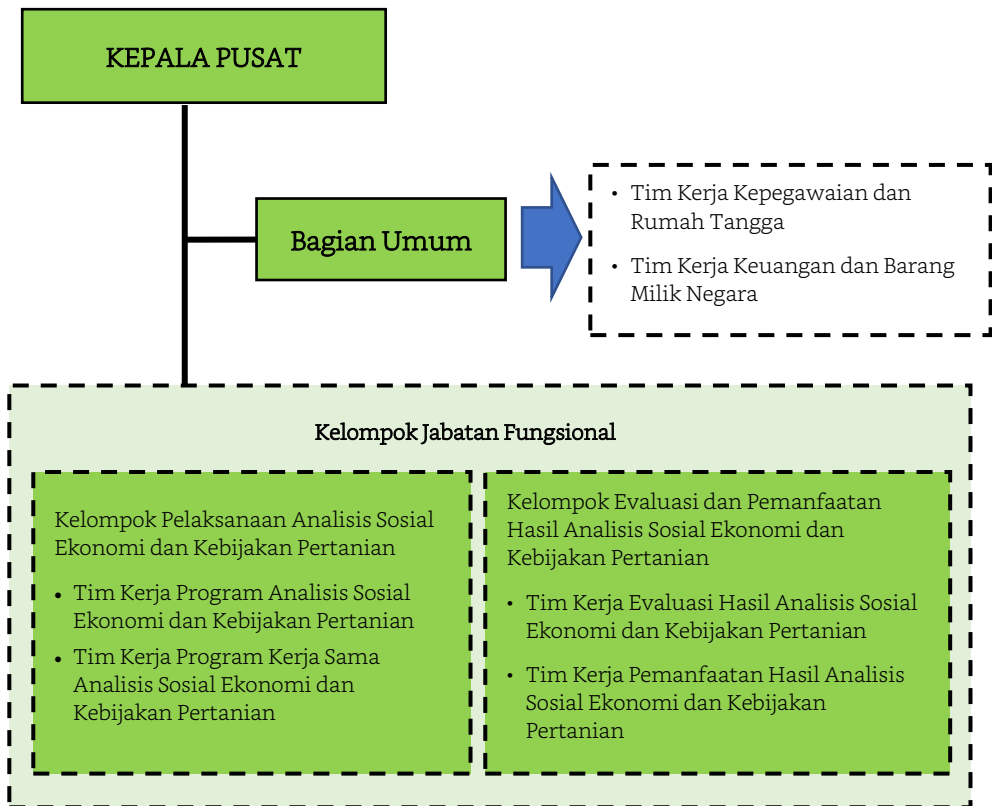
1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;

2. Pelaksanaan analisis dan sosial ekonomi pertanian;
3. Pelaksanaan analisis kebijakan dan isu strategis di bidang pertanian;
4. Penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian;
5. Pemberian layanan teknis analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
6. Pelaksanaan kerja sama dan penyebarluasan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
8. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Kepmentan Nomor 278 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja, PSEKP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat setingkat Eselon IIA, dibantu oleh struktural setingkat Eselon IIIA, yaitu Kepala Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja, dengan struktur organisasi seperti disajikan pada Gambar 1.

1.3. Sasaran Kelompok Pengguna Hasil Kajian Analisis Kebijakan

1. Pejabat pembuat dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian;
2. Pejabat pembuat kebijakan lembaga negara di luar Kementerian Pertanian;
3. Praktisi agribisnis;
4. Politisi, ilmuwan, dan masyarakat peminat pembangunan pertanian; dan
5. Analis Kebijakan dan fungsional lainnya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024

II. SUMBER DAYA MANUSIA

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan kompeten di bidangnya sesuai dengan jabatan yang tersedia. Jumlah pegawai mengalami penurunan dari 69 orang tahun 2023 menjadi 67 orang di tahun 2024. Penurunan jumlah pegawai tersebut disebabkan adanya 4 orang pegawai yang pensiun dan 1 orang pegawai yang beralih tugas ke Biro Umum dan Pengadaan. Terdapat mutasi alih tugas dari unit lain ke PSEKP 2 orang dan penambahan 1 pegawai dari unsur PPPK. Keragaan jumlah pegawai PSEKP sesuai dengan jabatan yang tersedia disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keragaan jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut jabatan (Desember 2023-Desember 2024)

No.	Jabatan	2023	2024
1.	Struktural	2	2
2.	Analisis Kebijakan	27	27
3.	Perencana	2	2
4.	Analisis SDM Aparatur	1	1
5.	Analisis Pengelola Keuangan APBN	3	1
6.	Arsiparis	2	3
7.	Pranata Komputer	4	5
8.	Pranata Humas	2	2
9.	Pustakawan	1	1
10.	Statistisi	2	2
11.	Pranata SDM Aparatur	1	1
12.	Pranata Pengelola Keuangan APBN	1	1
13.	Pelaksana	18	18
14.	Petugas Belajar	2	0
	Jumlah	69	67

Sumber: SIM ASN Kementan, 2024

Jumlah pegawai PSEKP yang memasuki masa purna tugas pada tahun 2024 sebanyak empat orang. Rincian berdasarkan nama dan jabatan pegawai yang purna tugas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang pensiun pada tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1.	Ir. Wartiningsih	Pengadministrasi Perkantoran	1 Maret 2024
2.	R. Rachmat Hestu Wiseno	Pengolah Data dan Informasi	1 April 2024
3.	Nurodin	Operator Layanan	1 Juni 2024
4.	Ikarianto Haryadi, S.E., M.M.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1 September 2024

Sumber: SIM ASN Kementan, 2024

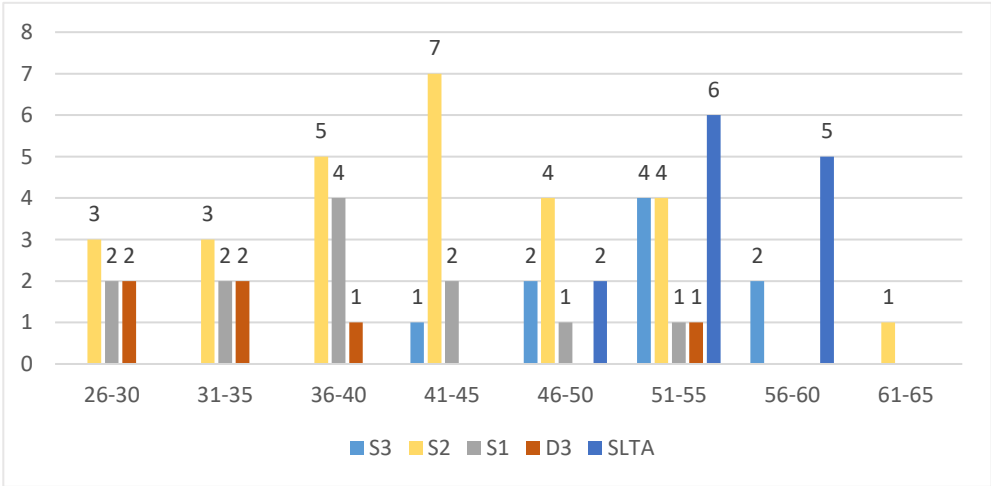
Jumlah SDM PSEKP mengalami penurunan, selain disebabkan adanya pegawai yang purna bakti juga karena adanya pegawai mutasi alih tugas ke unit kerja lain. Sementara, untuk pegawai yang mutasi ke PSEKP hanya ada 2 orang. Mutasi alih tugas di PSEKP selama 2024 yaitu 1 pegawai mutasi keluar PSEKP dan 2 orang masuk ke PSEKP. Mutasi alih tugas di PSEKP pada tahun 2024 terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Mutasi alih tugas di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2024

No.	Nama	TMT	Ket
1.	Irma Damayanti, S.Sos.	1 April 2024	Mutasi alih tugas ke Biro Umum dan Pengadaan
2.	Dr. Abdul Aziz, S.Sos., M.Si.	1 Juni 2024	Mutasi alih tugas dari BB Pengujian Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, BSIP
3.	Panji Harjanto, S.E., M.M.	1 Agustus 2024	Mutasi alih tugas dari Biro Humas dan Informasi Publik

Sumber: SIM ASN Kementan, 2024

Sumber Daya Manusia Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai SLTA hingga S-3 serta bervariasi menurut kelompok usia (Gambar 2). Pada tahun 2024 pegawai PSEKP jenjang doktor bertambah dua orang dari 7 menjadi 9 orang. Penambahan ini dikarenakan adanya satu pegawai yang mutasi ke PSEKP dari BB Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, BSIP dan satu pegawai PSEKP yang telah selesai masa studi yang dibuktikan dengan SK pencantuman gelar.



Sumber: SIM ASN Kementan, 2024

Gambar 2. Keragaan SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut usia dan tingkat pendidikan akhir per bulan Desember 2024

Jenjang pendidikan magister pada tahun 2024 juga mengalami penambahan yang awalnya 24 orang pegawai pada tahun 2023 menjadi 27 orang pegawai pada tahun 2024. Penambahan tersebut disebabkan adanya penambahan satu orang pegawai mutasi dari Biro Humas dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal dan dua orang pegawai yang telah selesai masa studinya yang keduanya merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Jenjang pendidikan D3 bertambah satu orang di tahun 2024 karena ada tambahan P3K baru. Sementara, untuk jenjang SD pada bulan Desember 2024 menjadi nol karena ada satu orang yang pensiun pada bulan Juni 2024. Keragaan SDM menurut usia dan tingkat pendidikan akhir per bulan Desember 2024 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi SDM PSEKP menurut usia dan pendidikan akhir per bulan Desember 2024

No	Usia	S3		S2		S1		D3		D2		D1		SLTA		SD	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	26-30			3	3	3	2	2	2								
2.	31-35			4	3	4	2		2								
3.	36-40			4	5	4	4	1	1								
4.	41-45	1	1	4	7	2	2										
5.	46-50	2	2	4	4	3	1							4	2		
6.	51-55	3	4	4	4	1	1	2	1					6	6		
7.	56-60	1	2			2								3	5	1	
8.	61-65			1	1												
9.	66-70																
	Jumlah	7	9	24	27	19	12	5	6					13	13	1	0

Sumber: SIM ASN Kementan, 2024

Kegiatan Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga pada tahun 2024

2.1. Layanan Kepegawaian

Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga PSEKP mempunyai tugas layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai. Uraian dan rincian kegiatan dari setiap layanan adalah sebagai berikut.

2.1.1. Layanan Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat PNS dilakukan sebanyak enam kali per tahun berdasarkan Peraturan BKN Nomor 4 tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Periode Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahun, kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian. Pegawai yang naik pangkat pada tahun 2024 berjumlah delapan orang. Rincian nama SDM yang naik pangkat pada bulan April sampai dengan Oktober disajikan pada Tabel 5.

2.1.2. Layanan Kenaikan Gaji

Kenaikan gaji berkala selama tahun 2024 diberikan kepada 29 orang pegawai PSEKP. Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang telah ditentukan yaitu setiap dua tahun sekali dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nama pegawai dan TMT kenaikan gaji berkala diuraikan pada Tabel 6.

Tabel 5. Kenaikan pangkat PNS Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2024

No.	Nama	Golongan Lama	Golongan Baru	TMT Kenaikan Pangkat
1.	Amalia Ulpah, S.TP., M.Si. 198303062011012013	Penata/III-c	Penata Tk.1/III-d	1 April 2024
2.	Resty Puspa Perdana, S.P., M.P. 199005092019022001	Penata Muda Tk.1/III-b	Penata/III-c	1 April 2024
3.	Rangga Ditya Yofa, S.P., M.Si 198610172011011006	Penata Muda Tk.1/III-b	Penata/III-c	1 April 2024
4.	Julvinus Saragih 196709222003121001	Penata/III-a	Penata Muda Tk.1/III-b	1 April 2024
5.	Maryadi 197007082003121001	Penata/III-a	Penata Muda Tk.1/III-b	1 April 2024
6.	Ahmad Makky Ar-Rozi 198401122009121003	Penata/III-c	Penata Tk.1/III-d	1 Agustus 2024
7.	Aldho Riski Irawan, S.Si. 199508272020121003	Penata/III-a	Penata Muda Tk.1/III-b	1 Oktober 2024
8.	Dr. Abdul Aziz, S.Sos., M.Si. 197605101998031001	Pembina/IV-a	Pembina Tk.1/IV-b	1 Desember 2024

Sumber: SIM ASN Kementan, 2024

Tabel 6. Kenaikan gaji berkala pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian selama tahun 2024

No.	Nama	NIP	TMT
1.	Esty Asriyana Suryana, S.P., M.Si.	198301132009102001	1 Januari 2024
2.	Lira Mailena, Ph.D.	197605302008012012	1 Januari 2024
3.	Sheila Savitri, S.Sos., MAP	197709202007012001	1 Januari 2024
4.	Fajri Shoutun Nida, S.P., M.Sc.	199405112018012001	1 Januari 2024
5.	Eni Widjajati, S.S., M.AP	196905291996022001	1 Februari 2024
6.	Widyadhari F. Setyaningrum, S.P., M.P.	198802032022032002	1 Maret 2024
7.	Lidya Rahma Shaffitri, S.E., M.Si.	198906022022032001	1 Maret 2024
8.	Annisa Fauzia Astari, S.P., M.Sc.	199310072022032001	1 Maret 2024
9.	Rizghina Ikhwan, S.Sosio., M.Sosio.	199509212022032001	1 Maret 2024
10.	Riska Nurhafizhah, S.Hub.Int., M.K.P.	199711242022032001	1 Maret 2024
11.	Sumatri Ginting	197606152002121002	1 Maret 2024
12.	Sarah Izzatul Iffah, S.Stat.	199708092022032001	1 Maret 2024
13.	Pipit Muthmainnah, A.Md.Kom.	199704042022032001	1 Maret 2024
14.	Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si.	196803161997031002	1 April 2024

No.	Nama	NIP	TMT
15.	Irma Damayanti	197412071998032001	1 April 2024
16.	Edi Ahmad Saubari, A.Md.	197005201999031001	1 April 2024
17.	Ajat Sudrajat	196806031994031002	1 April 2024
18.	Yani Mulyaningsih	197009201995032001	1 April 2024
19.	Iman Somantri	197003172000031001	1 April 2024
20.	Sutrisno, A.Md.	197205151998031003	1 April 2024
21.	Nurodin	196605241994031001	1 April 2024
22.	Maryadi	197007082003121001	1 Mei 2024
23.	Eko Nugroho, S.Kom., M.M.	197109111998031002	1 Oktober 2024
24.	Dr. Julia F. Sinuraya, S.P., M.Si.	197107202002122001	1 Desember 2024
25.	Teddy Purnama	197703242001121002	1 Desember 2024
26.	Aldho Riski Irawan, S.Si.	199508272020121003	1 Desember 2024
27.	Neni Kholimah, S.P.	198909182020122009	1 Desember 2024
28.	Frilla Ariani, S.T.	198704182020122001	1 Desember 2024
29.	Restu Puji Hidayat, A.Md.	199404122020121006	1 Desember 2024

Sumber: SIM ASN Kementan, 2024

2.1.3. Layanan Cuti Pegawai

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 24 tahun 2017 dan perubahannya Nomor 7 tahun 2021, pengelolaan izin cuti pegawai dengan dengan alasan cuti tahunan, mendampingi anak sakit, melahirkan anak, dan keperluan keluarga lainnya. Cuti tahunan yang dikeluarkan sebanyak 126 kali dalam tahun 2024. Adapun rincian jumlah pengajuan cuti dan alasannya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah pengajuan cuti pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berdasarkan jenis cuti, 2024

No.	Jenis Cuti	Jumlah Cuti yang Disetujui	Keterangan
1.	Cuti tahunan	126	Jan-Des 2024
2.	Cuti Besar	2	a.n Yani Mulyaningsih dan Sheila Savitri
3.	Cuti Melahirkan	3	a.n Annisa Fauzia Astari, Lidya Rahma Shaffitri, dan Sarah Izztul Iffah
4.	Cuti alasan penting	1	a.n Frans Betsy D dan M. Wiryadi E.

2.2. Layanan Ketatausahaan

Layanan ketatausahaan yang menjadi bagian tugas dari Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga selama tahun 2024 terdiri dari layanan magang mahasiswa, layanan kearsipan, dan layanan jabatan fungsional. Uraian dan rincian kegiatan dari masing-masing layanan adalah sebagai berikut.

2.2.1. Layanan Magang Mahasiswa

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Bab XVII Pasal 286. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian (Pasal 287). Fungsi PSEKP dalam melaksanakan tugas seperti tercantum dalam Pasal 288 yang terkait dengan pelayanan magang adalah pelaksanaan kerja sama dan penyebarluasan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Pada tahun 2024, PSEKP bekerja sama dengan dua perguruan tinggi dalam pelaksanaan magang mahasiswa yaitu dengan Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) dan IPB University. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk magang adalah selama tiga bulan. Magang mahasiswa menjadi salah satu syarat kelulusan dari perguruan tinggi. Secara rinci, kegiatan magang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

1) Magang Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (BSI)

Praktik Kerja Lapangan (PKL) terhitung sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu mata kuliah pada Program Diploma Tiga (D3), pada Fakultas Teknik & Informatika, Universitas Bina Sarana Indonesia. Terdapat tiga mahasiswa Universitas BSI yang mengikuti program PKL. Daftar mahasiswa PKL Universitas BSI terdapat pada Tabel 8.

Tabel 8. Mahasiswa PKL Universitas BSI, 2024

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Moh. Gozi Alghifari	12220892	D-3 Sistem Informasi
2.	Tasya Chairunnisa	12220962	D-3 Sistem Informasi
3.	Oryza Zikri Faidani	12220422	D-3 Sistem Informasi

Mentor kegiatan PKL ini adalah Frilla Ariani, S.T dan dibantu Pranata Komputer lainnya yaitu Pipit Muthmainnah, A.Md.Kom dan Restu Puji Hidayat, A.Md. Mahasiswa yang melaksanakan PKL menyusun sistem berbasis web untuk monitoring kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Sistem berbasis web untuk monitoring kegiatan PSEKP, hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang sering dihadapi dalam proses pemantauan manual. Kendala yang dihadapi dalam proses pemantauan manual antara lain adalah kesulitan dalam mengakses data secara real-time; keterbatasan dalam menyimpan dan mengelola data; serta minimnya keterlibatan stakeholder dalam proses pemantauan. Rencana dan implementasi PKL Universitas BSI disajikan pada Gambar 3.

Aktivitas	PJ	September				Oktober				November				Desember				keterangan		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Selesai	In Progress	Belum Selesai
Mengumpulkan kebutuhan dan menyusun rencana proyek	Semua																	v		
Membuat nama dan desain logo	Tasya & Oryza																	v		
Requirement gathering	Semua																	v		
Merancang UI/UX dan prototype	Oryza																	v		
ERD, flowchart dan database	Gozi & Tasya																	v		
Front end	Gozi																		v	
Back end	Gozi																		v	
Testing dan perbaikan bug	Semua																			v
Evaluasi	Semua																			v
peluncuran aplikasi	Semua																			v
review manajemen	semua																	v		

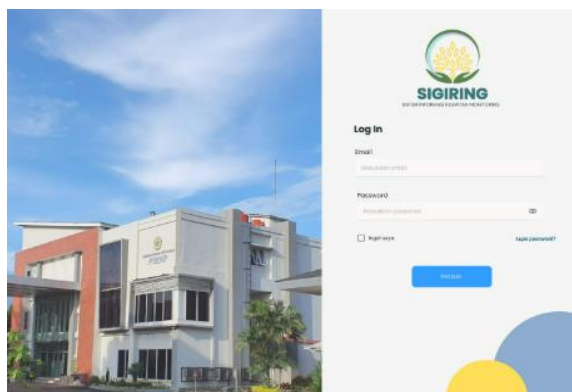
Gambar 3. Rencana dan implementasi PKL Universitas BSI

Aplikasi ini bertujuan untuk memonitoring kegiatan pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Dengan adanya aplikasi ini, manajemen dapat memantau progres kegiatan secara real-time, memastikan bahwa semua aktivitas pegawai terdokumentasi dengan baik, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

SIGIRING (Sistem Informasi Kegiatan Monitoring)



Gambar 4. Aplikasi Sigiring



Gambar 5. Tampilan UI log in

Kata SIGIRING diambil dari salah satu tarian tradisional yaitu Tari Giring-Giring yang berasal dari Suku Dayak Maanyan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Barito. Makna sakral tarian ini adalah wujud suka cita atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang diperoleh. Nama dan logo "SIGIRING" mencerminkan tujuan sistem untuk memberikan informasi yang terstruktur dan terorganisir tentang kegiatan, serta semangat untuk menjaga dan merawat kegiatan tersebut dalam rangka mencapai pertumbuhan dan keselarasan.

Pada penyusunan aplikasi ini menemui beberapa kendala antara lain (1) banyak fitur yang perlu dibuat seperti *dynamic dropdown*, form input dan intergrasi; (2) menggunakan teknologi atau *library* yang sebelumnya belum dikuasai sepenuhnya seperti laravel; (3) kendala dalam mengintegrasikan *frontend* dan *backend*, atau menyinkronkan dengan *database*; (4) implementasi beberapa tampilan dengan html, php, tailwind, dan beberapa menggunakan javascript untuk kebutuhan; dan (5) membuat *back end* seperti pengelolaan *database*.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sudah dilakukan beberapa kegiatan tindak lanjut yaitu (1) menentukan fitur yang penting untuk diselesaikan; (2) menggunakan waktu luang untuk belajar teknologi atau *framework* baru; (3) melakukan pemahaman tentang penggunaan *database*, penggunaan *query SQL*, dan pengalaman dengan sistem manajemen *database*, untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan riset dan mempraktikkan penggunaan *database*; (4) hal ini memerlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip desain responsif, penggunaan CSS, dan pengalaman dengan framework Tailwind; (5) untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan riset dan mempraktikkan desain responsif.; (6) merancang antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) berdasarkan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sistem monitoring berbasis web untuk Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) mampu menjadi solusi efektif dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses monitoring manual. Sistem ini memungkinkan pencatatan data secara otomatis, integrasi antarbagian, visualisasi progres kegiatan yang informatif, serta pembuatan laporan yang cepat dan akurat. Dengan pendekatan berbasis teknologi, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi. Dampaknya, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan berkualitas, sehingga organisasi dapat lebih fokus pada pencapaian target strategisnya.

2) Magang Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor menyelenggarakan program magang *capstone* mahasiswa bidang ekonomi sumberdaya dan lingkungan pada tahun 2024. Program magang *capstone* merupakan pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang diselenggarakan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan pejabat/pegawai/expert yang ditunjuk oleh perusahaan dalam rangka penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Selain program *capstone* juga ada dua mata kuliah lainnya yang diambil pada magang ini yaitu pengambilan keputusan dan berpikir kritis.

Perjanjian Kerja Sama antara PSEKP dengan IPB dibuat dengan tujuan untuk (1) mendukung program kampus merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (2) mendukung pencapaian *learning outcome* dari mata kuliah *capstone*; (3) meningkatkan keterampilan, perilaku, dan sikap kerja mahasiswa dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.

Terdapat dua mahasiswa yang IPB yang melaksanakan program magang di PSEKP. Daftar mahasiswa magang IPB Tahun 2024 terdapat pada Tabel 9.

Tabel 9. Jadwal pelaksanaan MBKM-Riset IPB di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	Nadia Nurul Maghfira	H4401211004	Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
2.	Azifah Syafiah	H4401211021	Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan

Kedua mahasiswa magang IPB memiliki kegiatan magang yang sedikit berbeda karena berdasarkan progress studinya. Nadia Nurul Maghfira menyusun kajian dengan judul “Pengaruh Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terhadap Pendapatan dan Produksi Petani Sawit Rakyat”. Kajian ini merupakan bagian dari *sustainability project experience* (ESL149D). Pelaksanaan kegiatan *capstone project* dilaksanakan pada tanggal 1 September 2024 sampai dengan 15 Desember 2024.

Latar Belakang capstone project

Petani kelapa sawit rakyat di Indonesia mengelola sekitar 40 persen dari total luas lahan sawit yang ada di negara ini (SPOS 2020). Namun, produktivitas kebun sawit petani rakyat biasanya lebih rendah dibandingkan dengan perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan swasta. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berhubungan, seperti usia tanaman yang rata-rata sudah tua sehingga hasil produksi menurun, serta terbatasnya akses petani terhadap modal yang diperlukan untuk melakukan peremajaan tanaman atau membeli peralatan produksi yang lebih canggih.

Dalam mengatasi masalah penurunan produktivitas kelapa sawit rakyat, pemerintah membuat program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang mana program ini bertujuan untuk mendukung petani sawit dalam memperbaiki perkebunan mereka dengan tanaman kelapa sawit yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, serta mengurangi risiko pembukaan lahan secara ilegal terkait penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan. Melalui program ini, produktivitas lahan petani sawit dapat ditingkatkan tanpa harus membuka lahan baru (BPDPKS 2020).

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) mempunyai tugas dalam pelaksanaan analisis sosial ekonomi serta kebijakan pertanian, analisis kebijakan dan isu strategis di bidang pertanian, penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian, pelaksanaan kerja sama dan penyebaran hasil analisis sosial ekonomi serta kebijakan pertanian, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah melaksanakan kajian yang komprehensif sejak tahun 2022 hingga 2024, dengan tujuan untuk mempercepat realisasi PSR. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta

merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung implementasi PSR secara lebih optimal, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh para petani dan masyarakat di daerah penghasil sawit.

Program *capstone* sejalan dengan program Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dalam menghadapi pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pelaksanaan *capstone project* ini memberikan praktik nyata keilmuan yang didapatkan selama kuliah di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan dalam penerapannya di bidang pertanian. Pengetahuan yang didapatkan dari mata kuliah seperti ekonomi pertanian, ekonometrika, perdagangan pertanian, ekonomi produksi, ekonomi pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi terapan selaras dengan implementasi keilmuan dalam pelaksanaan *capstone project* ini.

Output dan Jadwal Pelaksanaan Magang Capstone Project

Output yang dihasilkan dari pelaksanaan *capstone project* adalah sebagai berikut: *logbook* harian, Laporan Akhir Kegiatan, Infografis Peremajaan Sawit Rakyat, dan *Policy Brief* Peremajaan Sawit Rakyat. Adapun tata waktu pelaksanaan kegiatan *capstone project* berdasarkan usulan kegiatan yang sudah dicantumkan pada bagian program disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Timeline pelaksanaan program *capstone project*, 2024

No	Kegiatan	September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengenalan <i>Capstone Project</i>																
2.	Pra Lokakarya 1																
3.	Lokakarya 1																
4.	Pelaksanaan <i>Capstone Project</i>																
5.	Pembuatan Output <i>Capstone Project</i>																
6.	MBKM																
7.	Monitoring dan Evaluasi																
8.	Supervisi																
9.	Pra Lokakarya 2																
10.	Lokakarya 2																

Dari rangkaian kegiatan *capstone project*, menghasilkan beberapa output salah satunya poster seperti di Gambar 6. Dari poster ini dapat disampaikan informasi yang mudah dipahami terhadap rekomendasi kebijakan (*policy brief*) yang dihasilkan.



Gambar 6. Poster program PSR, 2024

Pengambilan Keputusan Efektif (Indeks Kualitas Kebijakan)

Selain kegiatan *capstone project*, masih ada mata kuliah lain dalam kegiatan magang ini yaitu pengambilan keputusan efektif (IPB209) dan berpikir kritis dan kreatif (IPB20C). Kegiatan pengambilan keputusan di PSEKP dengan ikut dalam kegiatan penyusunan *evidence* indeks kualitas kebijakan. Mahasiswa membantu mencari *evidence* dari peraturan yang menjadi populasi pengukuran IKK tahun 2025. Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan penyiapan *evidence* IKK antara lain: (1) mencari *evidence* IKK Ditjen PSP, Ditjen PKH dan (2) mengikuti *workshop* tata kelola kebijakan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dilakukan secara *offline* di kantor PSEKP dan dibimbing oleh Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan Kepegawaian PSEKP.

Berpikir Kritis dan Kreatif (Pembuatan Poster dan Kegiatan Pemilahan Sampah)

Fokus mata kuliah ini adalah untuk membantu pemilahan sampah di PSEKP. Kegiatan ini diawali dengan penyusunan matriks berita terkini dengan isu-isu pertanian dan lingkungan. Selanjutnya, membuat desain poster “gaya hidup berkelanjutan” yang mendukung usaha untuk ramah lingkungan. Poster selanjutnya yaitu “*reduce food waste*”, “mewaspadaai musim panen raya dan produksi padi 2024”, “pertanian berbasis ekonomi hijau: langkah menuju ketahanan pangan”, dan “langkah menuju ketahanan pangan”. Beberapa poster tersebut disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Poster output manajemen sampah

Selain membuat poster, mahasiswa IPB juga melakukan kegiatan sosialisasi pilah sampah pada hari Selasa, 3 Desember 2024. Pada sosialisasi tersebut dijelaskan pengelolaan sampah di lingkungan kantor PSEKP dan pengumpulan sampah oleh petugas kebersihan setiap hari, serta pemilahan sampah saat konsumsi rapat/acara. Tata cara pemilahan sampah disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Poster pemilahan sampah

Dari sosialisasi tersebut diharapkan petugas kebersihan dan dukungan dari pegawai PSEKP dapat melakukan pemilahan sampah dengan tepat dan dapat untuk sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik dapat

disalurkan ke bank sampah dapat dilakukan. Selain itu, dari segi kesehatan juga lebih higienis karena sampah tidak tercampur dan di bungkus dengan rapi untuk menghindari bau sampah yang menyengat. Kegiatan magang IPB telah berjalan dengan lancar dan output yang harus dicapai dapat terimplementasi dengan baik yang meliputi tiga mata kuliah.

2.2.2. Layanan Pengelolaan Kearsipan PSEKP

Layanan Tata Usaha Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian antara lain pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Kegiatan surat menyurat ini dipandang sebagai suatu kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan organisasi pemerintahan. Pada tahun anggaran 2024, pengelolaan surat menyurat PSEKP dibagi atau dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:

1. Surat masuk sebanyak 829 exp (Tabel 11), sebagian besar dilakukan filling secara digital dan lainnya dikelola menggunakan Srikandi. Dibandingkan dengan surat masuk pada tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah surat masuk sebesar 78 eksemplar;
2. Surat keluar sebanyak 2.620 eksemplar, yang terdiri dari Surat Keputusan, Surat Tugas, dan Surat Balasan dari surat masuk. Pengelolaan surat menggunakan aplikasi *google sheet* untuk mempermudah layanan. Jumlah surat keluar mengalami penurunan sebesar 331 eksemplar pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya;
3. Pengelolaan arsip, dengan menyiapkan daftar dan dokumen arsip usul musnah, serta melakukan pemusnahan arsip pada tanggal 20 September 2024 di Kementerian Pertanian. Pemusnahan arsip tersebut disaksikan oleh pejabat struktural, fungsional Arsiparis, dan petugas kearsipan Kementan. Pemusnahan arsip berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor B-KN.00.01/219/2024 dan B-KN.00.01/220/2024 tanggal 26 Agustus 2024 hal Persetujuan Pemusnahan Arsip Kementerian Pertanian dan Pelaksanaan Prosedur pemusnahan arsip sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa surat memegang peranan penting dalam instansi pemerintahan sehingga pengelolaan surat masuk dan surat keluar perlu dilakukan dengan baik dan benar agar tujuan organisasi dapat terwujud secara efektif dan efisien walaupun secara *de facto/real* masih banyak kekurangan. Kekurangan tersebut misalnya jumlah nomor surat keluar setelah diberkaskan, pihak pencipta arsip tidak menyerahkan arsipnya sehingga pengolah dokumen tidak menemukan arsip atau dokumennya sesuai nomor surat, begitu pula dengan masih adanya dokumen menggunakan nomor mundur.

Dalam rangka efisiensi penggunaan ruang arsip (*record center*) PSEKP sesuai UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan bahwa pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan. Proses pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna telah habis retensinya dan telah melalui uji petik oleh ANRI. PSEKP telah melakukan pemusnahan arsip sebanyak 6.239 arsip yang telah diajukan ke Biro Umum dan memperoleh persetujuan dari ANRI.

Tabel 11. Surat masuk ke PSEKP tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah surat masuk	Jumlah surat keluar
1.	Januari	68	256
2.	Februari	59	192
3.	Maret	76	266
4.	April	65	174
5.	Mei	71	159
6.	Juni	73	211
7.	Juli	100	207
8.	Agustus	51	215
9.	September	73	186
10.	Oktober	75	275
11.	November	60	250
12.	Desember	58	229
Total		829	2.620

Pengawasan Internal Kearsipan sebagai tindak lanjut dari Hasil Audit Kearsipan oleh Unit Kearsipan Biro Umum dan Pengadaan

Pusat Kegiatan Pengawasan Kearsipan dikhususkan pada pengawasan kearsipan internal yang dilakukan di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pertanian yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan difasilitasi oleh Biro Umum dan Pengadaan sebagai Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian.

Maksud dan tujuan pelaksanaan audit kearsipan internal di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian adalah untuk menilai kesesuaian terhadap prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian selaku Unit Pengolah Audit. Kearsipan internal dilaksanakan terhadap Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian selaku Unit Pengolah pada tanggal 20 s.d. 21 Mei 2024.

Berdasarkan hasil audit kearsipan internal yang telah dilaksanakan diberikan penilaian atas penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan sebagai berikut:

1. Nilai 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (memuaskan)
3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (cukup)
6. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (kurang)
7. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

Nilai yang diperoleh merupakan persentase nilai yang diperoleh terhadap nilai standar pada setiap aspek pengawasan kearsipan. Berdasarkan uraian hasil pengawasan pada Bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar 93,42 dengan kategori “AA (Sangat Memuaskan)”. Adapun hasil penilaian untuk setiap aspek disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil pengawasan kearsipan internal PSEKP, 2024

No	Aspek/subaspek	Nilai standar	Nilai	Bobot subaspek (%)	Nilai subaspek	Bobot aspek (%)	Nilai aspek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) / (3) x (5) x 100	(7)	(8) = (6) x (7)
1.	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	7.200	6.491,66		92,52	50	46,26
1.1.	Penciptaan Arsip	3.100	2.641,66	25	21,30		
1.2.	Penggunaan Arsip	700	700	25	25,00		
1.3.	Pemeliharaan Arsip	2.200	2.050	25	23,30		
1.4.	Penyusutan Arsip	1.200	1.100	25	22,92		
2.	SUMBER DAYA KEARSIPAN	3.700	3.519		94,33	50	47,16
2.1.	SDM Kearsipan	1.600	1.419	50	44,33		
2.2.	Prasarana dan Sarana Kearsipan	2.100	2.100	50	50,00		
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal							93,42

Dari hasil penilaian pengawasan kearsipan internal memperoleh nilai sangat memuaskan. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2023 dilakukan penataan ulang kearsipan. Dengan bertambahnya jumlah arsiparis pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak dua orang makin meningkatkan kinerja kearsipan internal PSEKP. Harapannya, ke depan kearsipan internal PSEKP makin tertib dan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan nilai pengawasan kearsipan internal.

2.2.3. Layanan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Kementerian Pertanian

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2039/KPTS/OT.110/A/07/2024 tentang Sekretariat dan Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional bidang Pertanian serta Sekretariat Jabatan Fungsional non bidang Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian tanggal 11 Juli 2024, PSEKP ditugaskan sebagai Sekretariat Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yang bertugas melakukan koordinasi dengan instansi Pembina LAN dan memberikan layanan konsultasi teknis terhadap jabatan fungsional analisis kebijakan.

Pada tahun 2024, tim sekretariat melakukan beberapa kegiatan antara lain (1) membantu verifikasi dan mengusulkan uji kompetensi analis kebijakan ke LAN, baik kenaikan jenjang maupun perpindahan jabatan; (2) membantu mengevaluasi penyusunan PAK analis kebijakan baik yang dari pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan kenaikan jenjang; (3) menginformasikan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK; (4) merekap *progress* keterpenuhan peta jabatan analis kebijakan sampai dengan tahun 2024 (*bezetting*); (5) merekap seluruh usulan ujikom analis kebijakan pada tahun 2024; (6) sebagai narahubung antara Kementerian Pertanian dengan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan serta menginfokan hal-hal yang berkaitan dengan JFAK Kementerian Pertanian.

Berdasarkan fungsi di atas maka pada tahun 2023 Sekretariat JFAK Kementan melakukan beberapa kegiatan meliputi verifikasi DUPAK dan *assesment* penilaian JFAK yang dikirim ke TPP, melakukan penilaian DUPAK di TPI baik internal maupun eksternal instansi, memfasilitasi uji kompetensi baik perpindahan jabatan maupun kenaikan jenjang, dan mengusulkan pelatihan dasar bagi JFAK PSEKP. Secara rinci kegiatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Membantu verifikasi dan mengusulkan uji kompetensi analis kebijakan ke LAN, baik kenaikan jenjang maupun perpindahan jabatan

Pada tahun 2024, ada 9 orang PNS yang telah mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan ke analis kebijakan, sementara untuk kenaikan jenjang ada 11 analis kebijakan dan semuanya adalah naik dari jenjang muda ke madya (Tabel 13). Dari 20 orang yang telah melakukan uji kompetensi hanya satu orang yang tidak lulus yaitu Asmardi Nata dari Ditjen PKH dan akan mengusulkan kembali ujikom. Nilai tertinggi diperoleh oleh Aditya Sulaksono dari Biro KLN. Harapannya ke depan, para peserta ujikom lebih mempersiapkan diri supaya dapat optimal dalam proses ujikom. Hasil ujikom dapat diakses di link: https://drive.google.com/drive/folders/1vcL4dEV1fQgm9K_QaA8EY_qXZob5yBKf?usp=drive_link.

2. Verifikasi Membantu mengevaluasi penyusunan PAK analis kebijakan baik yang dari pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan kenaikan jenjang

Dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, serta Perka BKN 3 Tahun 2023 maka penetapan angka kredit (PAK) dari hasil uji kompetensi analis kebijakan dibuat oleh unit kerja K/L masing-masing. Sekretariat JFAK tidak memiliki wewenang untuk menyusun PAK tersebut, hanya membantu mengoreksi sesuai dengan ketentuan. Pada tahun 2024, sekretariat JFAK telah membantu mengevaluasi penyusunan PAK disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, serta membantu berkonsultasi dengan Pusaka LAN untuk memperoleh informasi supaya tidak terjadi kekeliruan. Selain itu, juga membantu memfinalkan PAK JFAK lingkup Kementerian Pertanian setiap triwulan dan tahunan.

Tabel 13. Rekap usulan uji kompetensi analis kebijakan, 2024

No.	Tanggal surat	Nomor surat	Nama	Jabatan sebelum ujikom	Jenis uji kompetensi
1.	4 Oktober 2023	B-2710/Kp.350/A2/10/2023	Dr. Abdul Aziz, S.Sos., M.Si.	Koordinator kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian	Perpindahan jabatan
2.	19 Januari 2024	B-363/KP.350/A2/01/2024	Dr. Nuning Argo Subekti, S.P., M.Sc.	Analisis Kebijakan Muda	Kenaikan jenjang
3.			Nilai Sauri Pratesti, S.P., M.M.	Penyusun Bahan Kerja Sama	Perpindahan jabatan
4.			Tia Vinita, S.TP., M.Si.	Penyusun Bahan Kerja Sama	Perpindahan jabatan
5.			Jayu, S.E., Ak. MBA	Pengolah Teknologi	Alih Perpindahan jabatan
6.	16 Februari 2024	B-547/KP.350/A2/02/2024	Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Perpindahan jabatan
7.			Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D	Direktu Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Perpindahan jabatan
8.	8 Maret 2024	B-914/KP.350/A2/03/2024	Frans Betsi M Dabukke, S.P., M.Si.	Analisis Kebijakan Muda	Kenaikan jenjang
9.	19 April 2024	B-1340/KP.350/A2/04/2024	Dr. Vitri Aryanti, S.P., M.M.	Analisis Kebijakan Muda	Kenaikan jenjang
10.	17 Mei 2024	B-1493/KP.350/A2/05/2024	Apt. Dameria Melany Elizabeth P, S.Si., M.Si.	Analisis Kebijakan Muda	Kenaikan jenjang
11.			Nur Asti Sumanti, S.Pi.	Analisis Kebijakan Muda	Kenaikan jenjang
12.			Asmardi Nata Afri, S.Pt.	Analisis Kebijakan Muda	Kenaikan jenjang
13.			Dr. Parlindungan Yulianus Silitonga, S.P., M.P.	Analisis Kebijakan Muda	Kenaikan jenjang
14.	12 Juni 2024	B-1714/kp.350/A2/06/2024	Dyah Margani Utami, S.TP., M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Perpindahan jabatan
15.			Dr. Ir. Moh. Ismail Wahab, M.Si.	Direktur Serealia	Perpindahan jabatan
16.	16 Juli 2024	B-1911/kp.350/A2/07/2024	Muhammad Suryadi, S.P., M.Si.	Analisis Kebijakan Muda	Kenaikan jenjang
17.			Fajri Shoutun Nida, S.P.	Pengolah Data dan Informasi	Perpindahan jabatan
18.	29 Agustus 2024	B-2407/KP.350/A2/08/2024	Dhini Rismansyah, S.E., M.Si.	Analisis Kebijakan Muda	Kenaikan jenjang
19.			Ronny Mucharam, S.E., M.A.	Analisis Kebijakan Muda	Kenaikan jenjang
20.			Aditya Sulaksono, S.E., M.E.	Analisis Kebijakan Muda	Kenaikan jenjang

3. Menginformasikan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK

Setiap tahun Pusbangkom TSK mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi jabatan fungsional salah satunya analis kebijakan. Pelatihan yang sangat dibutuhkan untuk JFAK antara lain pelatihan khusus analis kebijakan, pelatihan advokasi, dan pelatihan penulisan karya tulis ilmiah. Tata cara pelatihan ini dengan mengusulkan dari masing-masing unit kerja ke Pusbangkom TSK dan nanti pihak Pusbangkom TSK akan melakukan seleksi. Pada tahun 2024, analis kebijakan di PSEKP yang telah mengikuti pelatihan KAK adalah Lira Mailena, Hari Hermawan, Miftahul Azis, Cut Rabiatul Adawiyah, Resty Puspa Perdana, dan Rangga Ditya Yofa, sementara yang mengikuti pelatihan advokasi adalah Wahida. Untuk beberapa analis kebijakan di PSEKP yang belum mengikuti pelatihan akan diusulkan pada tahun 2025 baik untuk pelatihan KAK maupun advokasi kebijakan. DUPAK yang dinilai sebanyak 47 usulan yang disidangkan pada tanggal 10 Juli 2023 dan 6 usulan yang disidangkan pada bulan September 2023. Selain itu, juga melakukan penilaian terhadap 14 usulan DUPAK dari Lembaga Ketahanan Nasional. Rincian sidang yang dilaksanakan pada bulan Juli terdiri dari AK Madya 8 orang, AK Muda 34 orang, AK Pertama 5 orang sehingga totalnya 47 orang. Dari hasil sidang maka diperoleh nama-nama yang telah memenuhi syarat-syarat kenaikan jenjang maupun pangkat sesuai pada Tabel 13.

4. Merekap progress keterpenuhan peta jabatan analis kebijakan sampai dengan tahun 2024 (besetting)

Untuk mengetahui keterpenuhan jabatan analis kebijakan di Kementerian Pertanian diperlukan penghitungan eksisting JFAK. Tabel 14 menunjukkan kebutuhan JFAK sampai tahun 2026, bezetting (kondisi eksisting) tahun 2023 dan 2024, serta lowongan yang masih ada sampai tahun 2026.

Tabel 14. Keterpenuhan peta jabatan analis kebijakan, 2024

Kebutuhan (2022-2026)				Bezetting*data per Sept 2023				Bezetting*data per Agust 2024					Selisih*data per Agust 2024			
Pertama	Muda	Madya	Utama	Pertama	Muda	Madya	Utama	Pertama	Muda	Madya	Utama	Total	Pertama	Muda	Madya	Utama
95	69	71	12	7	42	30	5	11	42	20	3	76	84	27	51	9

Dari hasil penghitungan di atas bahwa masih ada lowongan untuk masing-masing jenjang jabatan analis kebijakan, yaitu AK pertama masih ada 84 lowongan, muda 27 lowongan, madya 51 lowongan, dan utama 9 lowongan. Peta jabatan ini disetujui hingga tahun 2026, dan jika diperlukan tambahan dapat dilakukan revisi ke LAN, sebagai unit pengampu analis kebijakan.

5. Sosialisasi Permenpan RB No 18 Tahun 2024

Transformasi tata kelola jabatan fungsional Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2024 tentang jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 di PSEKP dan dilaksanakan secara *hybrid*. Peserta yang hadir adalah seluruh JFAK Kementan dan pengelola kepegawaian unit kerja terkait.

Sosialisasi ini mengundang dua orang narasumber yang kompeten dari Pusaka LAN dan merupakan K/L pertama kali melakukan sosialisasi. Ada beberapa hal mendasar dari hasil sosialisasi terkait perubahan di jabatan analis kebijakan, antara lain:

- a. Tugas analis kebijakan adalah melakukan analisis dan advokasi, yang dibedakan antar jenjang adalah tingkat kompleksitasnya, pada jenjang Ahli Pertama kompleksitas rendah, jenjang Ahli Muda kompleksitas sedang, jenjang Ahli Madya kompleksitas tinggi, dan Ahli Utama kompleksitas sangat tinggi.
- b. Syarat pendidikan untuk jenjang Ahli Madya minimal kualifikasi pendidikan Magister (S2) dan jenjang Ahli Utama minimal kualifikasi pendidikan Doktor (S3).
- c. Analis kebijakan yang telah lulus uji kompetensi menjadi Ahli Madya namun pendidikan belum terpenuhi syaratnya (S-2), maka diberi kesempatan selama maksimal 4 tahun harus sudah lulus S-2 dan untuk utama diberikan waktu 8 tahun untuk menempuh S-3 setelah diterbitkan peraturan tersebut.
- d. Analis kebijakan yang telah uji kompetensi dan memenuhi syarat naik jenjang jabatan tetapi belum tersedia formasi, maka dapat naik pangkat satu tingkat lebih tinggi sambil menunggu ketersediaan formasi.
- e. Perpindahan jabatan dari pelaksana, akan diangkat di analis kebijakan Ahli Pertama.

6. *Sebagai narahubung antara Kementerian Pertanian dengan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan serta menginfokan hal-hal yang berkaitan dengan JFAK Kementerian Pertanian*

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2039/KPTS/OT.110/A/07/2024 tentang Sekretariat dan Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Bidang Pertanian serta Sekretariat Jabatan Fungsional nonbidang Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian tanggal 11 Juli 2024, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) ditugaskan sebagai sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang bertugas melakukan koordinasi dengan instansi Pembina LAN dan memberikan layanan konsultasi teknis terhadap jabatan fungsional analis kebijakan.

Selama tahun 2024, sekretariat JFAK telah melakukan beberapa koordinasi dengan Pusaka LAN misalnya permohonan narasumber untuk sosialisasi Permenpan RB No. 18 Tahun 2024. Selain itu, juga sekretariat JFAK Kementan melakukan diskusi terkait dengan pembaruan hasil rekomendasi ujikom supaya disesuaikan dengan peraturan terbaru.

7. *Membantu menyiapkan workshop Tata Kelola Kebijakan Pertanian yang akan diselenggarakan tanggal 22-23 Oktober 2024*

Acara workshop Tata Kelola Kebijakan Kementaerian Pertanian dalam upaya mempersiapkan pengukuran IKK tahun 2025 berjalan dengan lancar. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung peningkatan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025. Terdapat sembilan Permentan yang perlu

dilengkapi *evidence*. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dan mengundang narasumber dari LAN sebagai K/L yang melakukan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan. Dari narasumber tersebut memperoleh gambaran bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan nilai IKK tahun 2023 ke 2025.

Seluruh eselon 1 yang terlibat penyusunan Permentan tersebut turut hadir dan diskusi dengan pendamping dari PSEKP untuk menyusun strategi dalam melengkapi berkas-berkas penilaian IKK tahun 2025. Dengan berkolaborasi harapannya dapat lebih mempermudah dalam pemenuhan *evidence* IKK tahun 2025.

8. Menyiapkan PAK konvensional ke integrasi

Dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2022 dan Perka BKN 3 Tahun 2023 mengharuskan adanya integrasi PAK konvensional ke integrasi. Total ada 63 JFAK yang telah disusun PAK konvensional ke integrasi. Untuk mengakses PAK tersebut di *link* di bawah ini.

- a. <https://tinyurl.com/PAK2022BBSDMP>
- b. <https://tinyurl.com/PAK2022PKH>
- c. <https://tinyurl.com/PAK2022DITJENBUN>
- d. <https://tinyurl.com/PAK2022Tanpan>
- e. <https://tinyurl.com/PAK2022Tanpan>
- f. <https://tinyurl.com/PAK2022PSP>
- g. <https://tinyurl.com/PAK2022integrasi>
- h. https://bit.ly/NIKN_KEMENTAN

9. Menyiapkan berkas untuk pelatihan advokasi

Pada tahun 2024, PSEKP mengusulkan dua JFAK untuk mengikuti pelatihan advokasi yaitu Dr. Adi Setiyanto dan Dr. Wahida, tetapi yang dipanggil hanya Dr. Wahida. Hal ini dikarenakan kuota Pusbangkom TSK LAN terbatas sehingga perlu ada proporsional peserta dari masing-masing K/L.

Dr. Wahida mengikuti pelatihan advokasi secara daring dan luring. Daring mulai tanggal 23-27 Oktober 2024, sedangkan pelatihan luring mulai tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2024. Pelatihan ini menjadi hal yang baru dan baru pertama kali diikuti JFAK PSEKP, dan ke depannya pelatihan advokasi menjadi syarat untuk kenaikan jenjang Ahli Muda ke Ahli Madya.

10. Hasil survei kinerja sekretariat JFAK tahun 2024

Target tingkat kepuasan layanan kesekretariatan jabatan fungsional analis kebijakan (3,25 skala likert). Hasil penilaian layanan sekretariat JFAK pada TW1 sebesar 3,44; TW2 sebesar 3,55; nilai layanan pada TW3 sebesar 3,94; dan pada TW4 sebesar 3,86, rata-rata pada tahun 2024 adalah 3,69. Dari hasil survei menunjukkan bahwa kinerja sekretariat JFAK masuk dalam rentang skala likert 3-4 yang menandakan bahwa layanannya masuk kategori memuaskan. Beberapa layanan yang diberikan sekretariat JFAK antara lain.

- a. Membantu verifikasi dan mengusulkan ke LAN uji kompetensi analis kebijakan baik kenaikan jenjang maupun perpindahan jabatan.
- b. Membantu mengevaluasi penyusunan PAK analis kebijakan baik yang dari pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan kenaikan jenjang.
- c. Menginformasikan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK.
- d. Merekap progress keterpenuhan peta jabatan analis jabatan sampai dengan tahun 2024 (bezetting).
- e. Merekap seluruh usulan ujikom analis kebijakan pada tahun 2024.
- f. Membantu pelaksanaan tindak lanjut persiapan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025.
- g. Sosialisasi Permenpan RB No. 18 Tahun 2024.
- h. Sebagai narahubung antara Kementerian Pertanian dengan pusat pembinaan analis kebijakan serta menginfokan hal-hal yang berkaitan dengan JFAK Kementerian pertanian.

Dari hasil survei terhadap layanan sekretariat JFAK Kementerian Pertanian, dijelaskan pada bagian berikutnya. Layanan terbagi menjadi empat kategori yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, serta layanan secara daring/ *online*.

11. Kebijakan Pelayanan

Kebijakan pelayanan menjadi bagian penting dalam proses layanan sekretariat JFAK Kementerian Pertanian. Hal ini dikarenakan menyangkut ketepatan waktu layanan serta kemudahan dalam menerima layanan tersebut. Dari hasil survei menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan sudah sangat bagus (Gambar 9). Hal ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh tim sekretariat JFAK, Kementan serta seluruh pengelola kepegawaian unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Rata-rata kebijakan pelayanan sekretariat JFAK pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,73, masuk dalam kategori memuaskan.

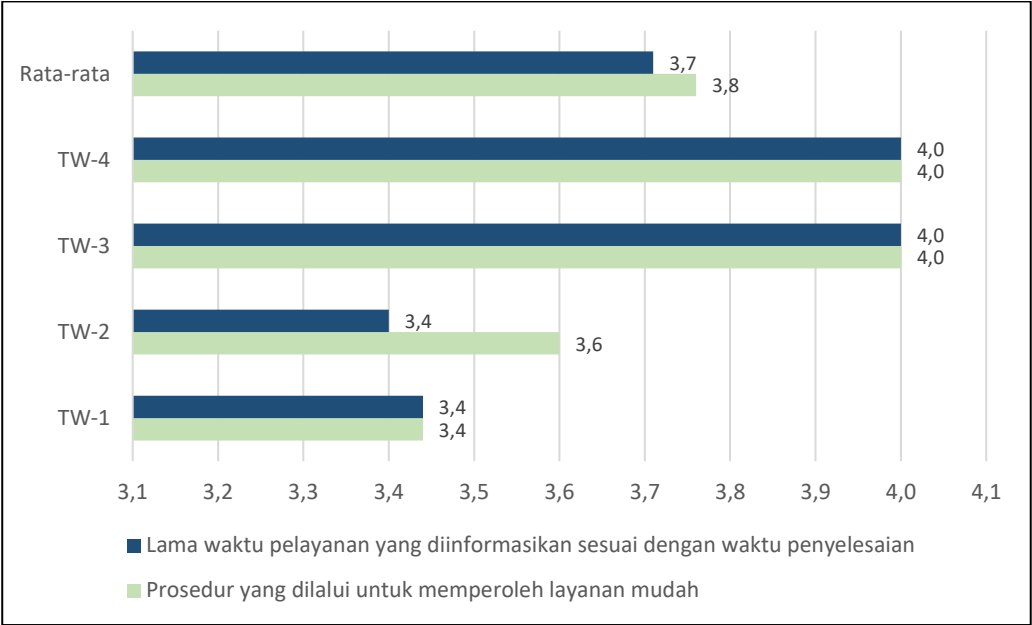
Dari hasil survei menunjukkan bahwa prosedur yang dilalui untuk memperoleh layanan relatif mudah dan lama waktu pelayanan cukup cepat untuk merespons pertanyaan dari para pengguna. Harapannya, ke depan akan lebih terstruktur lagi dalam layanan dapat mencontoh dari Pusaka LAN untuk layanan yang lebih prima.

12. Profesionalisme SDM

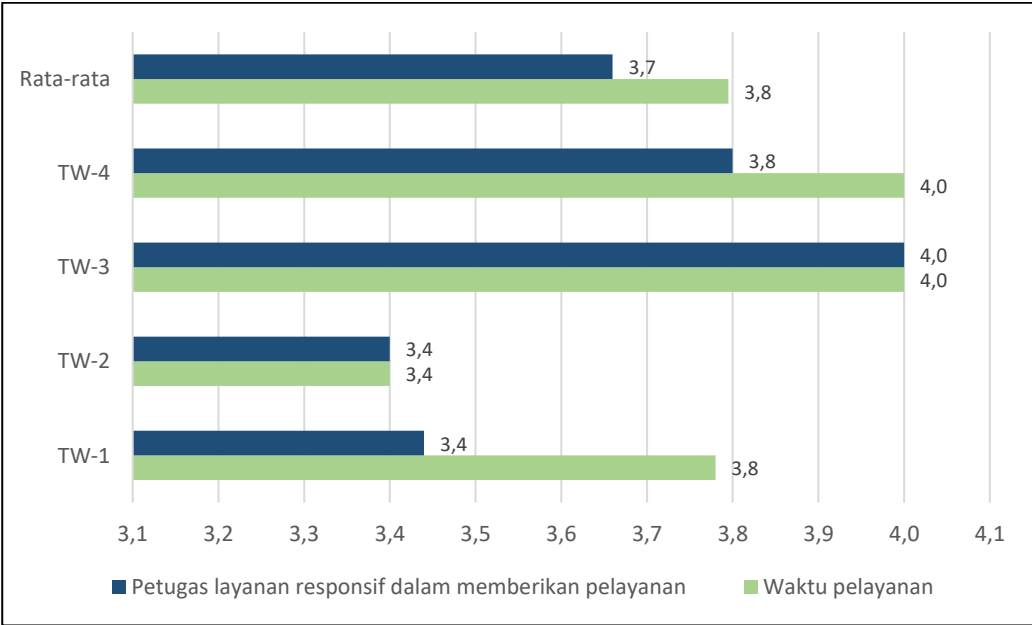
Penilaian kinerja profesionalisme SDM diukur dari bagaimana respons dari petugas dalam memberikan layanan. Selain itu, juga dilihat dari waktu yang diperlukan dalam layanan. Misalnya jam kerja tanpa jeda istirahat. Dari hasil survei menunjukkan bahwa petugas responsif dalam pelayanan (Gambar 10). Rata-rata tingkat kepuasan profesionalisme SDM terhadap layanan sekretariat JFAK pada skor 3,73 yaitu masuk dalam kategori memuaskan.

Skor untuk layanan petugas rata-rata sebesar 3,7 artinya memuaskan. Sementara rata-rata untuk waktu pelayanan memperoleh skor 3,8 yaitu juga memuaskan. Hal ini dikarenakan tim butuh waktu untuk merespons setiap

pertanyaan dari para analis kebijakan atau kepegawaian. Sekretariat JFAK tidak dapat langsung menjawab seluruh pertanyaan karena perlu konfirmasi ke instansi Pembina Pusaka LAN dan perlu untuk mencari peraturan-peraturan terkait supaya info yang diberikan valid.



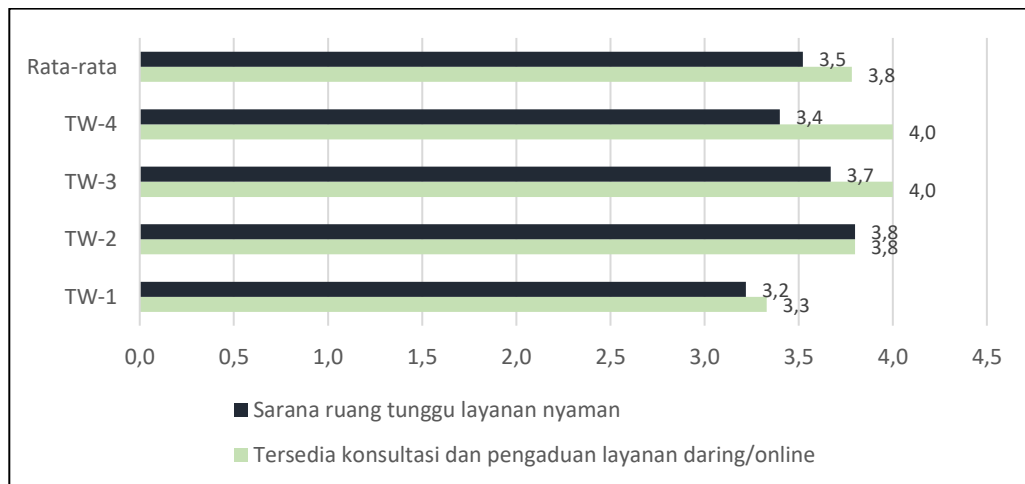
Gambar 9. Penilaian kebijakan pelayanan sekretariat JFAK Kementan, 2024



Gambar 10. Penilaian profesionalisme SDM, sekretariat JFAK Kementan, 2024

13. Sarana dan Prasarana, Layanan Secara Daring/Online

Untuk sarana dan prasarana memperoleh nilai/skor 3,5; sementara layanan daring sebesar 3,8. Saat ini, memang belum ada ruang khusus sekretariat JFAK jadi masih menjadi satu dengan kepegawaian PSEKP. Ke depannya akan ada ruang khusus untuk sekretariat JFAK, Kementan untuk memudahkan dalam menerima tamu untuk berkonsultasi. Selain itu, sebagian besar konsultasi dilakukan secara daring. Hal ini sejalan dengan perolehan skor/nilai untuk konsultasi lewat daring memperoleh nilai 4, artinya layanannya sangat baik seperti yang disajikan pada Gambar 11.



Gambar 11. Sarana, prasarana, dan layanan daring sekretariat JFAK Kementan, 2024

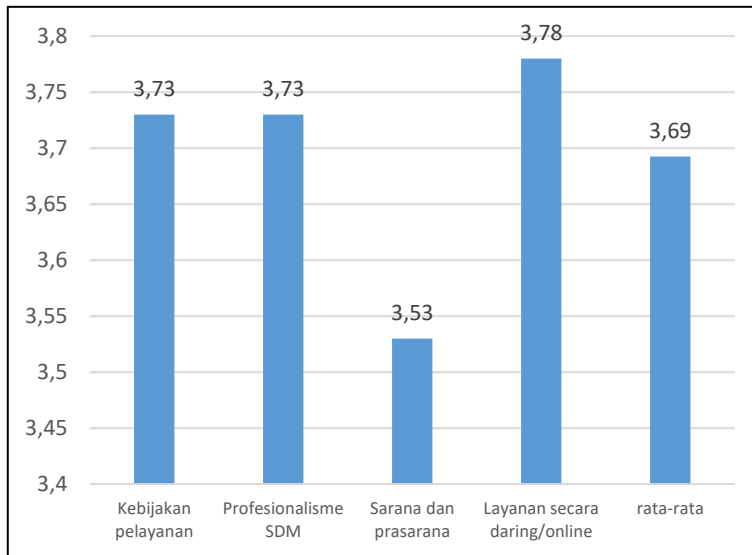
Dari hasil survei tersebut, ada beberapa masukan untuk perbaikan layanan sekretariat JFAK ke depannya antara lain pada waktu tertentu diperlukan semacam forum (diluar WAG yang ada) untuk membahas permasalahan/kendala yang dihadapi JFAK.

14. Hasil Survei Keseluruhan

Terdapat empat kategori penyusun evaluasi kinerja sekretariat JFAK Kementan, dan dari keempat kategori penilaian tersebut diambil rata-rata untuk penilaian secara keseluruhan yang menunjukkan angka 3,69 skala likert dari 4 (Gambar 12). Angka tersebut menunjukkan bahwa pelayanan secara keseluruhan masuk dalam kategori memuaskan, tetapi masih perlu beberapa perbaikan ke depannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa masukan konstruktif dapat dirangkum sebagai berikut:

- Adanya sistem informasi terpadu yang berisi program dan kegiatan yang telah dilakukan.
- Perlu menambahkan media sosial untuk memudahkan dalam penyebaran informasi.
- Updating infografis layanan.

- d. Diperlukan semacam forum (diluar WAG yang ada) untuk membahas permasalahan/kendala yang dihadapi JFAK.



Gambar 12. Hasil survei kinerja sekretariat JFAK Kementan

Dari hasil survei menunjukkan bahwa dari keempat kategori penilaian layanan sekretariat JFAK, untuk layanan secara daring menduduki peringkat teratas, karena dengan kemajuan teknologi dan tanpa batas waktu, layanan daring menjadi pilihan yang tepat. Kemajuan teknologi sangat membantu untuk memberikan layanan prima, dan ada jejak digital sehingga lebih mudah untuk ditelusur misalnya ada info-info penting. Untuk nilai terendah yaitu sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan, sebagian besar layanan dilakukan secara daring, untuk bertatap muka hanya beberapa kali saja sehingga untuk menyediakan ruangan khusus masih belum menjadi prioritas.

Permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan kegiatan di Subkelompok Kepegawaian tahun 2024

Kekurangan jumlah SDM yang mendukung Tusi PSEKP.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut

- Sedang proses membangun aplikasi/digitalisasi sehingga dapat mengoptimalkan pegawai yang ada.
- Untuk beberapa pekerjaan tidak harus kepegawaian yang mengerjakan, tetapi dapat dibantu langsung oleh masing-masing pegawai non kepegawaian.
- Pengusulan peta jabatan untuk dari CPNS 2025, PPPK, dan mutasi ahli tugas.

III. SARANA DAN PRASARANA

3.1. Aset

Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan sebagai kegiatan utama PSEKP didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, yaitu terdiri dari barang-barang tidak bergerak dan barang-barang yang bergerak. Barang-barang yang tidak bergerak terdiri dari: (1) tanah bangunan rumah negara golongan II, (2) bangunan gedung kantor permanen, (3) gedung pertemuan Dr. Ir. Ismunadji; bangunan *groundtank*/rumah panel, serta (4) rumah negara golongan II tipe C dan D permanen. Sementara barang-barang bergerak secara umum meliputi alat angkutan (kendaraan roda 4 dan roda 2), *furniture*, elektronik, serta aset tetap lainnya.

Pengelolaan Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) walaupun merupakan tanggung jawab Bagian Umum, tetapi secara moral adalah tanggung jawab seluruh pegawai yang menggunakan. Secara rinci daftar kondisi barang yang dimiliki PSEKP sampai pada periode 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 15.

3.1.1. Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)

Barang tidak bergerak yang dimiliki PSEKP meliputi tanah dan bangunan. Keseluruhan tanah yang dimiliki PSEKP seluas 1.558 m² yang terdiri dari tanah bangunan rumah negara golongan II seluas 1.558 m² terletak di Ciapus, Bogor. Sementara itu, bangunan yang dimiliki PSEKP adalah kantor yang terdiri atas dua unit bangunan di Jl. Tentara Pelajar 3B; satu unit bangunan gedung pertemuan, satu unit bangunan *groundtank*/rumah panel, empat buah rumah dinas (2 rumah golongan II Tipe C Permanen dan 2 rumah Tipe D Permanen), dan satu pagar permanen yang secara keseluruhan dalam kondisi baik. Rincian barang tidak bergerak disajikan pada Tabel 15.

3.1.2. Barang-Barang Bergerak

Pada periode tahun 2024, jumlah barang-barang bergerak yang dimiliki oleh PSEKP sebanyak 3.812 unit seluruhnya dalam kondisi baik. Barang-barang bergerak tersebut meliputi sarana transportasi/kendaraan dinas, mesin dan peralatan kantor, sarana komunikasi, dan barang bergerak penunjang kegiatan kantor lainnya. Secara rinci kondisi barang bergerak terdapat pada Tabel 15.

Tabel 15. Daftar rincian kondisi barang inventaris Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2024 (Periode 31 Desember 2024)

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	R	RS
I. BARANG TIDAK BERGERAK					
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	1		
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	-		
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2		

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	R	RS
4.	Rumah Negara Gol. II type C dan DPermanen	4	4		
II. BARANG BERGERAK					
5.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	1	1		
6.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	10	10		
7.	Sepeda Motor	10	10		
8.	Meja Dorong Saji/ Trolley saji	2	2		
9.	Tripod	1	1		
10.	Alat Penggiling Kopi	1	1		
11.	Rak Penyimpanan	4	4		
12.	Lemari Penyimpanan	3	3		
13.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	4	4		
14.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inci)	1	1		
15.	Mesin Penghitung Uang	1	1		
16.	Mesin Fotocopy Folio	1	1		
17.	Lemari Besi/ Metal	37	37		
18.	Lemari Kayu	79	79		
19.	Rak Besi	12	12		
20.	Rak Kayu	3	3		
21.	Filling Cabinet Besi	63	63		
22.	Locker	4	4		
23.	Roll Opek	3	3		
24.	Lemari Display	1	1		
25.	Hydrant	1	1		
24.	CCTV	24	24		
25.	Papan Visual	2	2		
26.	Alat Penghancur Kertas	1	1		
27.	Penangkal Petir	1	1		
28.	LCD Projektor/Infocus	9	9		
29.	Proyector Spider Bracket	4	4		
30.	Meja Kerja Kayu	104	104		
31.	Kursi Besi/Metal	712	712		
32.	Sice	30	30		
33.	Bangku Panjang Besi/Metal	1	1		
34.	Meja Rapat	78	78		
35.	Meja Komputer	3	3		
36.	Meja Resepsionis	2	2		
37.	Workstation	93	93		

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	R	RS
38.	Meubelair Lainnya	1	1		
39.	Jam Elektronik	7	7		
40.	Mesin Penghisap Debu	1	1		
41.	Mesin Pemotong Rumput	2	2		
42.	Lemari Es	1	1		
43.	A.C Sentral	63	63		
44.	A.C Split	44	44		
45.	Televisi	9	9		
46.	Tape Recorder	2	2		
47.	Amplifier	1	1		
48.	Equalizer	1	1		
49.	Loudspeaker	11	11		
50.	Sound System	1	1		
51.	Wireless	2	2		
52.	Microphone	1	1		
53.	Microphone Table Stand	2	2		
54.	Mic Confrence	3	3		
55.	Camera Video	1	1		
56.	Tustel	1	1		
57.	Tangga Almunium	1	1		
58.	Dispenser	7	7		
59.	Kabel Roll	8	8		
60.	DVD Player	2	2		
61.	Audio Mixing Consule	1	1		
62.	Audio Mixing Portable	36	36		
63.	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	3	3		
64.	Microphone/ Wireless MIC	1	1		
65.	Power Supply Microphone	1	1		
66.	UPS	5	5		
67.	Power Amplifier	1	1		
68.	Compact Disc Recorder	1	1		
69.	Blitzer	2	2		
70.	Video Presenter	1	1		
71.	Voice Recorder	11	11		
72.	Rak Peralatan	1	1		
73.	Tripod Camera	1	73		
74.	Lighting Stand Tripod	7	7		

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	R	RS
75.	Lensa Kamera	2	2		
76.	Layar Film/Projector	7	7		
77.	Headset	1	1		
78.	Camera Digital	5	5		
79.	Video Confrence	2	2		
80.	LCD Monitor	1	1		
81.	Camera Confrence	1	1		
82.	Mesin Jilid	2	2		
83.	Telephone PABX	3	3		
84.	Pesawat Telephone	39	39		
85.	Telephone Mobile	18	18		
86.	Handy Talky (HT)	6	6		
87.	Finger Printer	2	2		
88.	Radio Communication Matching Switch (RCMS)	1	1		
89.	Feeder Lainnya	1	1		
90.	Genset	1	1		
91.	Diagnostik Set	1	1		
92.	Timbangan	1	1		
93.	Tripod	2	2		
94.	TV Monitor	6	6		
95.	Ketel Pemasakan	7	7		
96.	Alat Crimp Tester	1	1		
97.	Alat Pemadam Kebakaran	24	24		
98.	Data Input	1	1		
99.	UPS	4	4		
100.	Wireless Data Transmision System	1	1		
101.	Cable Tester	1	1		
102.	DC/ AC Power Supply	1	1		
103.	Internet	3	3		
104.	P.C Unit	117	117		
105.	Lap Top	11	11		
106.	Note Book	33	33		
107.	Personal Komputer Lainnya	7	7		
108.	Komputer Unit lainnya	2	2		
109.	Hard Disk	1	1		
110.	CPU	1	1		
111.	Printer	83	83		

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	R	RS
112.	Scanner	59	59		
113.	External/ Portable Hardisk	6	6		
114.	Server	4	4		
115.	Router	24	24		
116.	Laptop Case	6	6		
117.	Capasitor Bank	1	1		
118.	Sumur Pemboran Air	1	1		
119.	Rumah Panel	1	1		
120.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2	2		
121.	Pagar Permanen	1	1		
122.	Jaringan Transmisi Dibawah 100 KVA	1	1		
123.	Monografi	434	434		
124.	Buku Lainnya	34	34		
125.	Majalah	86	86		
126.	Buletin	350	350		
126.	Laporan	758	758		
127.	Atlas	3	3		

Sumber : Data Sakti Laporan Kondisi Barang Per 31 Desember 2024

Keterangan: B : Baik

R : Rusak

RS : Rusak Sekali

a. Barang Inventaris Alat Angkutan

Pada tahun 2024, kendaraan roda empat yang dimiliki PSEKP terdiri dari 10 unit minibus (kapasitas penumpang <14 orang) dalam kondisi baik. Kendaraan bermotor roda tiga pengangkut barang sejumlah 1 unit dan sepeda motor roda dua sebanyak 10 unit dalam keadaan baik. Terdapat penghapusan dua unit sepeda motor roda dua karena sudah dalam kondisi rusak.

b. Barang Inventaris Peralatan Kantor

Pada tahun anggaran 2024 barang inventaris peralatan kantor berjumlah 3.812 unit yang semuanya dalam kondisi baik. Pada bulan November 2024 telah dilakukan penghapusan terhadap barang rusak sehingga seluruh barang inventasi peralatan kantor dalam kondisi baik. Rekapitulasi daftar dan kondisi barang inventaris dapat dilihat pada Tabel 16.

3.2. Anggaran DIPA, PNPB, dan Kerja Sama Penelitian

Keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan utama didukung oleh kegiatan penunjang. Secara umum

perkembangan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 67,64%. Rincian pagu, realisasi, dan sisa anggaran tahun 2024 disajikan pada Tabel 17.

Anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2024 terdiri dari tiga jenis pengeluaran, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Realisasi anggaran per jenis pengeluaran selama tahun 2024 diuraikan pada Tabel 18. Realisasi anggaran per kegiatan dan rekapitulasi PNPB PSEKP disajikan pada Tabel 19 dan Tabel 20.

Tabel 16. Rekapitulasi kondisi barang inventaris peralatan kantor Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024

No.	Jenis Barang	Jumlah	Status	
			Baik	Rusak
1.	Tanah dan bangunan rumah negara	11	11	0
2.	Kendaraan bermotor roda 2, roda 3, dan roda 4	21	21	0
3.	Barang perlengkapan perkantoran	3.780	3.780	0
4.	Total	3.812	3.812	0

Tabel 17. Perkembangan pelaksanaan keuangan kegiatan utama dan kegiatan penunjang Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024

Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	
		Rp	%	Rp	%
Kegiatan Utama (Rekomendasi Kebijakan Sosek dan Pembangunan Pertanian)	8.371.456.000	4.155.077.694	49,63	4.216.378.306	50,37
Kegiatan Penunjang	12.575.040.000	10.014.276.576	79,63	2.560.763.424	20,37
Total	20.946.496.000	14.169.354.270	67,64	6.777.141.730	32,26

Tabel 18. Realisasi anggaran per jenis pengeluaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024

Kode	Jenis Pengeluaran	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
51	Belanja Pegawai	7.256.570.000	5.436.521.844	74,92	1.820.048.156	25,08
52	Belanja Barang	12.371.456.000	8.539.196.092	69,02	2.832.259.908	30,98
53	Belanja Modal	1.318.470.000	706.866.440	53,61	611.603.560	46,39
	Jumlah	20.946.496.000	14.682.584.376	70,10	6.263.911.624	29,90

Tabel 19. Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024

Kode	Program/Kegiatan Output	Pagu (Rp)	Realisasi		Saldo Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
4992.001	Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	8.317.522.000	4.155.077.694	49,63	4.216.378.306	50,37
4992.951	Layanan Sarana Internal	980.470.000	614.496.440	62,67	365.973.560	37,33
4992.994	Layanan Perkantoran	11.256.570.000	9.399.780.136	83,50	1.856.789.864	16,50
4992.971	Layanan Prasarana Internal	338.000.000	0	0,00	338.000.000	100,00
Jumlah		20.946.496.000	14.169.354.270	67,64	6.777.141.730	32,26

Tabel 20. Rekapitulasi PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 2024

Kode Mak	Uraian Mak	Perkiraan Target Penerimaan (Rp.)		Penerimaan (Rp.)		Penyetoran (Rp.)		Sisa Target Penerimaan Target (Rp.) %	
1	2	3	4	5	6	7			
Penerimaan Umum									
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	8.836.000	3.523.152	3.523.152	-	39,87			
425112	Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	0	8.732.500	8.732.500	-				
425999	Penerimaan Anggaran Lain-lain	0	348.444	348.444	-				
Jumlah Penerimaan Umum		8.836.000	12.595.096	12.595.096	-	142,54			
Penerimaan Fungsional									
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC	-	-	-	-	-			
Jumlah Penerimaan Fungsional									
Jumlah Umum + Fungsional		8.836.000	12.595.096	12.595.096	-	142,54			

IV. PROGRAM

4.1. Tujuan dan Luaran Kegiatan

Tujuan umum kegiatan penyusunan program adalah untuk mendapatkan arah kajian analisis kebijakan yang lebih terencana dan sistematis agar pelaksanaan kegiatan dan analisis kebijakan lebih efisien, efektif, dan akuntabel.

Secara rinci pelaksanaan kegiatan program TA 2024 bertujuan untuk:

1. Membuat perencanaan program dan anggaran kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian PSEKP TA. 2024;
2. Merencanakan kegiatan analisis kebijakan sosial ekonomi pertanian PSEKP TA 2024; dan
3. Memperoleh saran tindak lanjut pelaksanaan program yang akan datang berdasarkan evaluasi kegiatan TA 2023.

Luaran yang diharapkan:

1. Program perencanaan anggaran dan kegiatan PSEKP TA. 2024;
2. Saran tindak lanjut pelaksanaan program yang akan datang; dan
3. Paket perencanaan kegiatan analisis kebijakan sosial ekonomi pertanian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2024.

4.2. Perencanaan Kegiatan Analisis Kebijakan Tahun Anggaran 2024

Tujuan perencanaan kegiatan adalah agar seluruh kegiatan PSEKP dapat terlaksana secara optimal sesuai tahapan yang telah direncanakan. Sesuai dengan siklus perencanaan, penyusunan kegiatan PSEKP dilakukan pada satu tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Artinya, rencana kegiatan TA 2024 dilakukan pada TA 2023; perencanaan kegiatan TA 2025 dilakukan pada TA 2024; dan seterusnya. Usulan bentuk dan besaran anggaran untuk kegiatan rutin dikoordinasikan oleh penanggung jawab kegiatan masing-masing bagian dan kelompok berdasarkan kebutuhan riil kegiatan serta ketersediaan anggaran.

Mekanisme Perencanaan Kegiatan Analisis Kebijakan TA 2024 dan Pelaksanaan Tupoksi Tim Kerja Program Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Tahapan perencanaan kegiatan analisis kebijakan PSEKP pada saat ini merujuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. PSEKP dengan dikoordinasi oleh Setjen, diharapkan lebih mampu berperan besar dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan pertanian dalam lingkup yang lebih luas.

Tahap pertama dari siklus proses perencanaan analisis kebijakan dimulai dengan penjarangan topik-topik kajian analisis kebijakan PSEKP yang disinkronkan dengan Rencana Strategis (Renstra) PSEKP, Sekjen, serta program-program utama Kementerian Pertanian. Tahap selanjutnya dari

penjaringan isu adalah penentuan topik yang menjadi prioritas yang akan dikaji. Pada tahap ini disusun matriks ringkas kajian yang memuat gambaran judul, justifikasi, dan ruang lingkup yang akan dilakukan. Proses selanjutnya adalah penentuan penanggung jawab dan mentoring penyusunan proposal. Setelah proposal tersusun, maka dilanjutkan evaluasi dan penajaman kembali.

Pada tahap penajaman proposal diberikan saran dan komentar untuk penyempurnaan proposal tersebut terhadap aspek-aspek: (a) perumusan masalah, *review* hasil kajian sebelumnya dan justifikasi kajian, (b) perumusan tujuan dan keluaran, (c) kerangka pemikiran (landasan teoritis), (d) perencanaan *sampling* (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, responden), (e) analisis data dan jenis data untuk menjawab setiap tujuan kajian, dan (f) perencanaan operasional (SDM, dana, dan lain-lain). Perbaikan-perbaikan tersebut disampaikan kembali kepada penyusun proposal sebagai bahan penyempurnaan proposal operasional yang akan dipresentasikan dalam kegiatan seminar dengan mengundang pihak-pihak terkait.

Seiring dengan tahap-tahap perencanaan kegiatan kajian tersebut (TOR-RKAKL-Proposal) dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan dalam hal redaksional judul kajian, rencana kegiatan, penanggung jawab, lokasi, maupun biaya/anggaran kajian. Beberapa penyebab perubahan tersebut antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan tingkat Kementerian Pertanian terkait prioritas kegiatan, (2) penghematan anggaran akibat kebijakan nasional, dan (3) perubahan terkait administrasi kegiatan sehingga berdampak pada pelaksanaan rencana kegiatan; serta (4) Berdasarkan hasil pembahasan pimpinan dan mempertimbangkan dukungan PSEKP terhadap program Kementerian Pertanian, ketersediaan sumber daya manusia, serta indikator kinerja utama (IKU).

Indikator utama PSEKP pada TA 2024 terdiri dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). SK PSEKP TA 2024 adalah meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Sasaran tersebut diukur dengan IKSK yaitu: (i) rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan, dengan target capaian 93 persen dan (ii) tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dengan target capaian sebesar 3,25 skala likert IKU PSEKP. Pada bulan November 2024 terdapat revisi IKU, dimana terdapat penambahan 2 indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu: (i) persentase Capaian Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP sebesar 66,08 persen, dan (ii) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker PSEKP sebesar 92,8 persen.

PSEKP melaksanakan delapan kajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian serta 19 analisis kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian dalam bentuk policy brief pada TA 2024 (Tabel 21 dan Tabel 22). Delapan kajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian yang dihasilkan tersebut lebih sedikit dibanding jumlah kajian pada TA 2023, hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pengurangan anggaran pelaksanaan analisis kebijakan, akibat adanya kebijakan Automatic Adjustment (AA) dan pengurangan perjalanan dinas.

Sesuai alur perencanaan kegiatan, pada tahun 2024 juga telah dirumuskan juga judul kajian TA. 2025. Berdasarkan DIPA PSEKP 2025 awal, PSEKP merencanakan menghasilkan 20 rekomendasi kebijakan, yaitu 6 dari kegiatan analisis yang dilakukan selama 1 tahun dan 14 dari analisis kebijakan yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih pendek (Tabel 23). Judul tersebut merupakan hasil penjarangan isu aktual yang merupakan prioritas pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian.

Tabel 21. Judul analisis kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian PSEKP periode satu tahun dan semester, 2024

No.	Judul analisis kebijakan
Periode Satu Tahun	
1.	Outlook Pertanian dan Strategi Pencapaian Target Pembangunan Pertanian 2025-2029
2.	Dinamika Capaian Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)
3.	Koordinasi, Bimbingan, dan Dukungan Teknis Supervisi dan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian
Periode Semester	
1.	Pembaruan Sistem Perbenihan Padi dan Jagung untuk Menjamin Ketersediaan Benih Bermutu
2.	Membangun Sistem Perbenihan Komoditas Hortikultura yang Berdaya Saing di Pasar Dalam Negeri
3.	Pemanfaatan Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dalam Meningkatkan Ekspor Produk Pertanian
4.	Strategi Meningkatkan Kinerja Penyuluhan melalui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022
5.	<i>Blue Print</i> Kementerian Pertanian Menuju Lumbung Pangan Nasional

Tabel 22. Judul policy brief, 2024

No.	Judul <i>policy brief</i>
1.	Penetapan Neraca Komoditas Beras Umum
2.	Permohonan perubahan persetujuan impor beras dan jagung pakan
3.	Perpanjangan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Skema Komersial
4.	Memahami Lonjak Harga Jagung 2024
5.	Memahami Fenomena Lonjak Harga Gabah dan Beras dari Struktur Biaya Usaha Tani Padi dan Biaya Pengolahan Beras
6.	Prospek Keberlanjutan Produksi Karet Alam Indonesia
7.	Prediksi Penurunan Luas Panen dan Produksi, Serta Harga Gabah dan Beras Selama Tahun 2024
8.	Fenomena Harga Beras di Atas Harga Eceran Tertinggi
9.	Penguatan Sistem Perbenihan Padi dan Jagung

No.	Judul <i>policy brief</i>
10.	Mengukur Daya Saing Usaha Tani Padi Indonesia dengan Negara Produsen Utama
11.	Strategi Percepatan Implementasi Perpres No.35 Tahun 2022 Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan
12.	Mewaspada Musim Panen Raya dan Produksi Padi 2024
13.	Penguatan Sistem Perbenihan Hortikultura menuju Kemandirian Benih Hortikultura
14.	Strategi Peningkatan Pemanfaatan berbagai Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri
15.	Strategi Pencapaian Sasaran Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi
16.	Potensi Dampak Pencabutan Larangan Ekspor Beras India terhadap Harga Beras Domestik
17.	Strategi Peningkatan Produksi Susu mendukung Program Makan Bergizi
18.	Penyempurnaan Neraca Pangan sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi Provinsi Maluku
19.	Rekomendasi Kebijakan Penyesuaian HPP Padi

Tabel 23. Judul proposal/KAK analisis kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian PSEKP periode satu tahun dan semester-1 TA 2025

No.	Judul analisis kebijakan
1.	Dinamika Capaian Kebijakan dan Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)
2.	Evaluasi Peningkatan Produksi Padi melalui Peningkatan Areal Tanam Padi dalam Upaya Mencapai Swasembada
3.	Strategi Pengembangan Pangan Lokal Mendukung Program Makan Bergizi
4.	Strategi Pencapaian Pengembangan Biodiesel B-50, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri dan Ekspor
5.	Strategi Peningkatan Produksi Susu Sapi Dalam Negeri Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Program Minum Susu
6.	Strategi Optimasi Potensi Peningkatan Produksi Pangan pada Lahan Sub Optimal
7.	Kebijakan Tata Kelola Perbenihan Komoditas Perkebunan Menjamin Ketersediaan Benih Bermutu
8.	Strategi Pencapaian Keberlanjutan Swasembada Pangan Beras dan Jagung
9.	Penyempurnaan Tata Kelola Subsidi Pupuk
10.	Strategi Kebijakan Pengurangan Susut Hasil Pertanian
11.	Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani dalam Kawasan Sentra Produksi Pangan
12.	Hilirisasi Komoditas Perkebunan Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Petani, Daya Saing dan Ekspor
13.	Strategi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian: Analisis Hasil Sensus Pertanian 2023
14.	Analisis Sistem Rantai Pasok Pangan Utama Ibukota Negara

No.	Judul analisis kebijakan
15.	Analisis Efektivitas Kebijakan Penanganan dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi Pertanian
16.	Strategi Penerapan Smart Farming dan Digitalisasi Mendukung Modernisasi Pertanian
17.	Rekomendasi dalam rangka mendukung kebijakan pimpinan (4 Rekomendasi).

4.3. Permasalahan yang Menonjol dalam Pelaksanaan Kegiatan di Tim Kerja Program pada Tahun 2024

Selama kurun waktu 2024, permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan kegiatan di Tim Kerja Program adalah:

- Kegiatan yang direncanakan sering mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan kondisi anggaran;
- Perubahan keputusan/arahan dari pimpinan menyebabkan kegiatan yang direncanakan perlu disesuaikan;
- Perubahan sering terjadi pada saat anggaran sudah di bahas dan sudah terbit menjadi DIPA, misalnya automatic adjustment yang sudah dilakukan beberapa tahun ini.
- Belum kompatibelnya rincian anggaran yang ada di DIPA/RKAKL dengan jenis kebutuhan anggaran yang terjadi di lapangan.
- Sering munculnya kegiatan baru dari pimpinan yang mendadak pada tahun berjalan, padahal kegiatan yang ada sudah direncanakan, dibahas dengan stakeholders pada tahun anggaran sebelumnya.

Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Tim Kerja Program tersebut adalah:

- Dokumentasi arsip-arsip perencanaan program dan perbaikan koordinasi kegiatan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan perubahan perencanaan yang bersifat segera/mendadak baik akibat kebijakan Kementan atau Kementerian Keuangan.
- Peningkatan kemampuan staf baik terkait dengan operasionalisasi *software*, pemahaman dalam pembebanan mata anggaran dan peraturan-peraturan administratif lainnya, serta selalu melakukan monitoring untuk *updating software* dan informasi lainnya.
- Memperluas jaringan kerja sama melalui berbagai skema kolaborasi dengan institusi lain yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan pertanian.

V. SINOPSIS ANALISIS KEBIJAKAN PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN TAHUN 2024

5.1. Outlook Pembangunan Pertanian 2025-2029 dan Strategi Pencapaiannya

Kinerja pembangunan pertanian periode 2020 – 2023 menunjukkan sasaran strategis yang ditetapkan tidak tercapai, baik dari sisi PDB maupun produksi komoditas utama. Program utama pembangunan pertanian 2025-2029 diformulasikan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia.

Program utama yang penting untuk dijalankan pada 2025-2029 adalah: (1) mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, rawa, dan mempercepat pencetakan sawah baru, serta melakukan rehabilitasi, penguatan jaringan irigasi dan pemanfaatan maksimal bendungan yang ada dan pembangunan bendungan baru; (2) mendorong efisiensi pengelolaan lahan, penerapan teknologi budi daya GAP, penggunaan benih unggul, serta pengurangan kehilangan hasil panen dan food loss and waste. Alokasi pupuk bersubsidi dan peremajaan tanaman yang tidak produktif; (3) meningkatkan perbaikan jalan pertanian, ketersediaan pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat, serta pemanfaatan lahan kosong, pengambilalihan HGU terlantar, dan perlindungan lahan pertanian produktif melalui insentif ekonomi agar lahan tidak beralih fungsi; (4) revitalisasi penyuluhan pertanian, pengembangan koperasi dan korporasi usaha tani, serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dengan memperkuat akses pembiayaan melalui KUR, asuransi pertanian, dan promosi investasi. (5) hilirisasi produk pertanian, subsidi input/output, pengendalian impor, serta promosi ekspor perlu diperkuat untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian; (6) mengembangkan program pekarangan pangan bergizi dan urban farming untuk meningkatkan ketahanan pangan yang mendukung peningkatan produksi unggas, telur, dan ternak produktif; dan (7) memperkuat kebijakan mandiri energi B-50 melalui pengembangan industri biodiesel dan optimalisasi pasar domestik serta internasional, sekaligus menyesuaikan kebijakan anti-deforestasi untuk mendukung daya saing kelapa sawit di pasar global.

5.2. Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (PANEL PETANI NASIONAL)

Kegiatan luas panen dan produksi padi menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah ditengah upaya pencapaian swasembada pangan. Pemerintah sangat masif menjalankan program peningkatan produksi padi baik melalui ekstensifikasi (cetak sawah, peningkatan IP) di lahan-lahan suboptimal maupun intensifikasi. Namun masifnya program tersebut perlu diarahkan agar memperoleh hasil yang optimal. Jika tidak dirumuskan strategi yang cermat, dikhawatirkan program yang masif tersebut tidak berujung pada hasil yang diharapkan.

Upaya ekstensifikasi dengan melakukan cetak sawah dan optimalisasi lahan suboptimal mengalami beberapa kendala. Permasalahan cekaman

lingkungan dan serangan hama sangat masif pada lahan-lahan sawah suboptimal menjadi kendala utama disamping kurangnya alsintan yang sesuai dengan kondisi tipologi lahan. Kondisi ini saling berkait dengan teknik budidaya dan tata kelola air yang belum memadai sehingga berdampak pada lambatnnya waktu tanam dan waktu panen.

Pada upaya intensifikasi, selain kurangnya penggunaan alsintan, masih rendahnya penggunaan benih bermutu merupakan kendala utama yang terjadi di lapangan. Masih banyak petani yang menggunakan benih sisa panen pada musim sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari preferensi petani untuk menanam varietas lokal yang sesuai dengan kondisi lahan. Kondisi ini ditambah dengan implementasi kebijakan subsidi pupuk yang masih belum efektif sehingga pemupukan menjadi tidak tepat baik jumlah maupun waktunya.

Peningkatan kapasitas petani sebagai pelaku utama dalam melakukan budi daya juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kondisi SDM petani Indonesia yang saat ini mengalami fenomena aging farmer dan rendahnya tingkat pendidikan petani harus mendapat perhatian oleh pemerintah. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah baik *on farm* maupun *off farm* juga sangat diperlukan.

Strategi pencapaian swasembada pangan perlu diarahkan pada upaya-upaya mengatasi kendala yang dihadapi baik dalam upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi. Percepatan waktu tanam dan waktu panen dapat dilakukan dengan peningkatan bantuan traktor dan *combine harvester*. Introduksi teknologi yang diperlukan berupa penerapan sistem tanam pindah, penggunaan bibit varietas unggul baru (VUB) serta distribusi pupuk untuk memastikan pupuk tersedia secara enam tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu pupuk).

5.3. Koordinasi, Bimbingan dan Dukungan Teknis Supervisi dan Pendampingan Program Strategis Kementan

Kegiatan koordinasi, bimbingan dan dukungan teknis supervisi dan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian pada tahun 2024 dilaksanakan berupa kegiatan Pendampingan Implementasi Program Peningkatan Produksi Padi melalui Pompanisasi. Dalam rangka percepatan peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan, pompanisasi, dan perluasan areal tanam padi gogo, Kementerian Pertanian telah membentuk Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 243/KPTS/OT.050/M/04/2024 pada tanggal 1 April 2024. Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan pengarah, penanggung jawab sarana, dan penanggung jawab lapangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada Bulan Juni 2024 terdapat perubahan personil untuk penanggung jawab lapangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diterbitkan Kepmentan No.265/KPTS/OT.050/M/06/2024 menggantikan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 243/KPTS/OT.050/M/04/2024.

Dalam Kepmentan No.265/KPTS/OT.050/M/06/2024, Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) mendapat mandat menjadi penanggung jawab empat kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Temanggung, dan Wonosobo. Selain menjadi PJ di empat

kabupaten tersebut, juga merangkap menjadi Liosion Officer (LO) Provinsi Jawa Tengah membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian sebagai PJ Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, tugas PJ adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi, dan pertambahan areal tanam padi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pelaksanaan program pompanisasi di wilayah tanggung jawab PSEKP berada di Kabupaten Purbalingga, Temanggung, Banjarnegara, dan Wonosobo. Kabupaten Banjarnegara selain mendapat program pompanisasi, juga mendapat program penanaman padi gogo. Bentuk bantuan dalam rangka peningkatan produksi padi di empat kabupaten di wilayah tanggung jawab PSEKP, antara lain pompa air, irigasi perpompaan, perpipaan, dan traktor. Bantuan yang berupa pompa air diutamakan untuk lahan sawah yang dekat dengan sumber air seperti sungai atau mata air yang berpotensi dapat digunakan untuk mengairi sawah pada musim kemarau. Sementara untuk bantuan perpipaan diutamakan untuk lahan sawah yang lokasi sumber airnya agak jauh, sehingga perlu dibantu pipa untuk mengalirkan air dari sumber air ke lahan sawah. Bantuan berupa irigasi perpompaan ke kelompok tani dengan paket mencakup bangunan rumah pompa, unit pompa air, dan pipa untuk mengalirkan air ke lahan sawah. Program pompanisasi diberikan ke kelompok tani, dinas pertanian provinsi/kabupaten/kota, dan Komando Distrik Militer (Kodim).

Pemanfaatan pompa air diprioritaskan pada sawah tadah hujan dengan Indeks Pertanaman (IP) padi kurang dari dua. Adanya program pompanisasi diharapkan dapat membantu petani menyedot air dari sumber air terdekat untuk mengairi sawah pada musim kemarau (MT-2 dan MT-3), sehingga lahan sawah yang semula IP-100 menjadi IP-200 atau yang semula IP-200 menjadi IP-300. Selain itu, lahan yang semula ditanami nonpadi pada MT-2, dengan adanya pompa air yang menjamin ketersediaan air pada MT-2, diharapkan petani tertarik menanam padi pada MT-2. Penambahan areal tanam padi pada musim kemarau, diharapkan dapat meningkatkan produksi padi secara nasional.

Sebagian besar bantuan pompa air yang diterima oleh empat kabupaten di wilayah tanggung jawab PSEKP telah dimanfaatkan oleh kelompok tani. Wilayah sawah tadah hujan yang sebelumnya hanya tanam padi satu kali pada musim hujan, saat ini pada MT-2 sudah mulai tanam padi. Bantuan pompa air yang diberikan ke kantor Dinas Pertanian kabupaten dan Kodim dikenal dengan istilah “brigade” dapat dimanfaatkan kelompok tani dengan sistim pinjam pakai. Penggunaan pompa brigade Kodim oleh kelompok tani yang membutuhkan, diatur melalui Koramil dan secara teknis di lapangan dipantau oleh Babinsa yang ada di setiap desa.

Target penanaman padi melalui Program Pompanisasi yang ditetapkan dalam Lampiran Kepmentan No. 243/KPTS/OT.050/M/ 04/2024, untuk Kabupaten Purbalingga seluas 2.329 hektare, Kabupaten Temanggung seluas 1.090 hektare, Kabupaten Banjarnegara seluas 2.005 hektare, dan Kabupaten Wonosobo seluas 1.652 hektare. Rangkaian kegiatan selama tahun 2024 disajikan pada Gambar 13.



Gambar 13. Dokumentasi kegiatan pendampingan program peningkatan produksi padi melalui pompanisasi, 2024

5.4. Analisis Responsif Dinamika Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan dilakukan pada semester 1 dan semester 2 tersebut bersifat khusus, yakni penugasan secara *ad-hoc* melalui penunjukan oleh Kepala Pusat sesuai dengan isu-isu aktual di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang berkembang selama tahun 2024. Analisis kebijakan dan fungsional lainnya seperti fungsional statistisi dan pranata komputer yang melibatkan dan ditugaskan dalam kegiatan analisis tersebut disesuaikan kapabilitasnya dengan topik kegiatan yang dilakukan. Realisasi dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah 99,92% dari target pagu efektif Rp333.420.000,00

a. Pembaruan Sistem Perbenihan Padi dan Jagung untuk Menjamin Ketersediaan Benih Bermutu

Benih padi memegang peranan penting dalam upaya peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman pangan. Oleh karena itu penggunaan benih unggul padi bermutu membutuhkan ketersediaan benih yang tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat harga. Target Kementerian Pertanian mengakselerasi produksi padi tahun 2024 untuk mencapai swasembada pangan membutuhkan alokasi tanam padi seluas 11,89 juta hektar dengan kebutuhan benih padi inbrida sebesar 297,25 juta ton benih padi inbrida. Namun ketersediaan benih bersertifikat yang masih dibawah 50 persen membutuhkan upaya perbaikan dari sistem perbenihan padi, yang mencakup sub sistem perakitan, produksi, distribusi, pengawasan dan sertifikasinya.

Transformasi kelembagaan litkajibang-rap ke BRIN menghilangkan fungsi perakitan dan produksi benih penjenis oleh Kementerian Pertanian sehingga mengancam keberlanjutan penyediaan benih unggul padi inbrida. Produksi dan penyediaan benih sebar oleh produsen benih dan petani

penangkar berkurang signifikan ketika harga gabah lebih mahal daripada harga benih dan perubahan iklim mengganggu pola tanam benih. Disamping itu, fungsi pengawasan produksi dan peredaran benih oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) belum optimal karena sumberdaya yang tidak mendukung.

Beberapa konsep pembaruan sistem perbenihan yang diusulkan terkait dengan keberadaan BBPSIP Padi sebagai produsen benih penjenis masih sangat diperlukan. Untuk keberlangsungan fungsi produksi benih padi inbrida, maka BBPSIP Padi yang semula berada di bawah BSIP seyogyanya dialihkan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai UPT di bawah Direktorat Perbenihan yang memang mempunyai fungsi melakukan produksi dan penyediaan benih padi. UPT tersebut bekerja sama dengan provinsi (BBI dan BPSB) sentra produksi padi dalam memproduksi benih penjenis untuk dipergunakan di provinsi tersebut. BPSB agar diposisikan sebagai lembaga pengawasan yang independen langsung di bawah gubernur atau inspektorat atau sekretariat daerah sehingga fungsi pengawasan terhindar dari intervensi kepentingan pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya BPSB dalam melakukan pengawasan produksi, distribusi dan sertifikasi benih dapat diatasi dengan mengembangkan sertifikasi mandiri oleh produsen benih melalui LSSM Mandiri dan mendorong perluasan fungsi UPBS di bawah BSIP provinsi menjadi LS-Pro yang dapat membantu mengawasi sertifikasi mutu benih di daerah.

b. Membangun Sistem Perbenihan Komoditas Hortikultura yang Berdaya Saing di Pasar Dalam Negeri

Peranan benih merupakan kunci utama keberhasilan agribisnis hortikultura. Permintaan benih hortikultura terus meningkat seiring dengan transformasi kegiatan pertanian yang makin berorientasi pada agribisnis. Ketersediaan benih hortikultura di pasar domestik sebagian besar dipasok oleh industri benih nasional terutama perusahaan multinasional atau Penanaman Modal Asing (PMA). Di sisi lain, produsen lokal (PMDN) masih beroperasi dalam skala terbatas dan kurang dapat bersaing dengan perusahaan PMA. Perusahaan PMA melakukan impor benih untuk komoditas tertentu. Salah satu ancaman terkait pemasukan yaitu regulasi pemasukan benih yang menyebutkan bahwa pemasukan benih untuk pengadaan benih nasional dapat dilakukan apabila tidak melebihi dua tahun sejak varietas dilepas atau terdaftar. Namun, di lapangan terdapat dugaan pemanfaatan "celah" regulasi oleh beberapa produsen.

Produksi benih hortikultura dilakukan oleh perusahaan benih swasta, penangkar benih, petani, dan pemerintah. Benih yang dihasilkan petani sering kali kurang berkualitas karena berasal dari hasil panen sebelumnya sehingga menurunkan produktivitas dan keseragaman. Pengembangan benih oleh sektor swasta terutama untuk komoditas sayuran, berlangsung secara intensif. Perusahaan swasta sering kali mengembangkan benih sendiri atau mengimpor benih yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Terkait dengan pemasukan benih, penerapan dari Permentan 15/2017 dan Permentan 17/2018 serta Permentan 37/2016 terdapat ketidaksinkronan yang berdampak pada beredarnya benih impor di pasar domestik. Benih

tersebut dibutuhkan oleh industri benih dan petani serta tidak sebatas pada jenis sayuran kubis, lobak, brokoli, dan sawi putih. Penyediaan benih hortikultura melalui impor khususnya dalam jumlah yang sangat besar memiliki dampak signifikan terhadap pasar benih domestik, baik dari segi harga maupun daya saing. Namun, meskipun jumlah impor kecil, benih impor yang dianggap lebih berkualitas dapat memengaruhi persepsi dan preferensi petani terhadap benih lokal.

Beberapa rekomendasi kebijakan antara lain (1) harmonisasi regulasi antara Permentan 15/2017, Permentan 17/2018, dan Permentan 37/2016; (2) dukungan terhadap riset dan inovasi; (3) penyederhanaan proses regulasi dan sertifikasi; (4) penguatan dukungan perusahaan domestik; (5) pemanfaatan teknologi digital untuk distribusi; (6) penguatan mekanisme pengawasan; dan (7) kolaborasi antarpelaku usaha.

c. Pemanfaatan Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dalam Meningkatkan Ekspor Produk Pertanian

Berbagai perjanjian kerja sama perdagangan (FTA) antara Indonesia dengan negara-negara mitra yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendorong ekspor produk pertanian, nyatanya masih belum optimal pemanfaatannya. Terlebih bagi negara yang belum siap, seperti Indonesia, FTA lebih diterjemahkan sebagai upaya negara mitra untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan impor.

Penyusunan kebijakan/regulasi Kementan dalam mendorong perdagangan produk pertanian belum didasarkan pada FTA yang ada. Pemahaman FTA di tingkat pelaku usaha (terutama menengah dan kecil) juga relatif rendah karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, termasuk Kementan. Hal ini berdampak terhadap rendahnya tingkat pemanfaatan FTA dalam meningkatkan ekspor dan perluasan pasar produk pertanian. Kondisi ini sulit untuk dipungkiri karena pemahaman staf di direktorat teknis terkait terhadap FTA pun masih minim.

Beberapa FTA mengindikasikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan ekspor produk pertanian, namun sebagian FTA lainnya justru berdampak lebih besar terhadap peningkatan impor produk pertanian dari negara mitra. Perdagangan produk pertanian Indonesia umumnya masih bersifat satu arah dan business as usual. Produk ekspor/impor masih cenderung sama dari waktu ke waktu (belum terdiversifikasi). Ekspor masih didominasi oleh produk mentah/intermediate, sedangkan impor didominasi produk olahan.

Unit kerja teknis Kementan seharusnya dapat melakukan monitoring dan evaluasi dari masing-masing FTA yang diimplementasikan secara reguler. Upaya ini dapat dioptimalkan jika diikuti dengan program diseminasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada para pelaku usaha. Saat ini upaya tersebut masih belum menjadi prioritas di direktorat teknis Kementan.

Dokumen pendukung FTA berupa Perpres, UU, dan PMK seharusnya dapat dijadikan rujukan utama bagi Kementan untuk mengimplementasikan FTA dan mereviu kebijakan internal. Pemanfaatan FTA dapat dioptimalkan melalui penyusunan peraturan (Permentan) dan kebijakan terkait peningkatan

ekspor produk pertanian yang merujuk pada regulasi terkait FTA yang ada. Di samping itu, perlu adanya sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, dan Badan Karantina Indonesia dalam rangka meningkatkan kesiapan Indonesia dalam pemanfaatan FTA untuk mendorong peningkatan.

d. Strategi Meningkatkan Kinerja Penyuluhan Pertanian Melalui Implementasi Perpres Nomor 5 Tahun 2022

Kinerja penyuluhan pertanian dinilai semakin menurun setelah terbitnya UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang tidak mengizinkan berdirinya badan koordinasi penyuluhan dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan. Perubahan kelembagaan ini juga menyebabkan tidak adanya hubungan langsung dan vertikal antara penentu kebijakan di tingkat pusat dan pelaksana kegiatan di daerah.

Upaya untuk menguatkan kembali fungsi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, diterbitkan Perpres No.35/2022. Namun, sampai saat ini implementasi dari Perpres ini masih belum terlihat langkahnya, terutama pada substansi penguatan hubungan kerja antara pusat dan daerah dengan pembentukan satminkal di provinsi dan kabupaten/kota sebagai kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah yang baru belum ada yang terbentuk.

Strategi percepatan implementasi Perpres No.35 Tahun 2022 harus segera dilakukan dengan mensosialisasikan substansi Perpres No.35/2022 melalui beragam media (elektronik, medsos) dan forum koordinasi dengan PEMDA. Pembentukan satu satminkal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib dilakukan melalui surat keputusan dari gubernur/bupati/walikota. Untuk mempercepat pembentukan satminkal, diperlukan kerja sama antara Kementan dan Kemendagri. Perencanaan, pembinaan, pengawalan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi harus dilakukan dalam percepatan implementasi Perpres, agar berjalan lebih efisien dan efektif. Perlu dibentuk Tim monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan implementasi Perpres No. 35/2022, dengan SOP dan anggota yang memiliki kapasitas. Pembuatan *pilot project* Satminkal penyuluhan pertanian di beberapa daerah yang memiliki UPTD Penyuluhan pertanian diperlukan untuk menjadi percontohan dan didukung dengan kelengkapan sarana prasarana dan TIK. Dukungan anggaran yang berbasis kinerja dari pusat dan daerah terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu diperkuat. Selain itu, Kementan harus memperkuat sumberdaya dan melakukan kerjasama dengan banyak pihak antara lain dengan Kemendagri, Kominfo, Perguruan Tinggi, BRIN, PEMDA dan pihak terkait lainnya.

VI. KERJA SAMA DAN LAYANAN HASIL ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

6.1. Kerja Sama

Kegiatan kerja sama kajian yang dilakukan PSEKP pada TA 2024 dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan sumber dana, yaitu kegiatan kerja sama sumber dananya berasal dari hibah luar negeri dan lembaga atau institusi dalam negeri. Sumber dana dari hibah luar negeri berasal dari kerja sama antara PSEKP dengan lembaga The Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR) dan kegiatan kerja sama yang dananya bersumber dari dalam negeri berasal dari kerja sama antara PSEKP dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Seluruh kegiatan kerja sama ini berstatus lintas-tahun (*multiyears*), yang secara rinci informasi disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Kegiatan kerja sama kajian di PSEKP TA 2024

Nama Donor	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Status Dana	Hibah Luar Negeri	Hibah Luar Negeri	Hibah Luar Negeri	Swakelola dari BDPDKS
Judul Kegiatan	Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for Indonesia, Philippines, Australia & the Asia-Pacific Region (IndoAWM)	Evaluating Service Provision Approaches and Value-Chain Interventions to Support Milk Cooperatives to Grow the Smallholder Dairy Sector of Indonesia (IndoDairy 2)	Evidence to Underpin Indonesia's Agricultural Technology Transformation	Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terhadap Efisiensi Biaya dan Daya Saing Kelapa Sawit Rakyat
UPT Pelaksana	PSEKP	PSEKP	PSEKP	PSEKP
Nama Ketua Tim	Prof. Dr. Handewi P. Saliem	Dr. Wahida	Dr. Wahida	Dr. Adi Setiyanto
Tahun Mulai	2018	2024	2024	2022
Tahun Berakhir	2024	2029	2027	2024
Nilai Hibah	AUD 136,448	AUD 246.381	AUD 219.200	Rp6.396.432.000,00
Nomor Register	2QKBB1PA	2HK7TXXA	2V3CPU5A	-

a. *Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for Indonesia, Philippines, Australia & the Asia-Pacific Region (IndoAWM)*

Kegiatan kajian ini merupakan kerja sama antara PSEKP dengan ACIAR sebagai donor hibah. Dalam pelaksanaannya ACIAR juga bekerja sama dengan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura (Puslitbanghorti) yang selanjutnya menunjuk Balai Penelitian Buah (Balitbu) sebagai pelaksana kegiatannya, Direktorat Perlindungan Hortikultura (Ditlinhorti), Universitas Gajah Mada, dan *Department of Agriculture and Fisheries* (Queensland). Kontrak telah ditandatangani oleh PSEKP pada bulan November 2018. Semula kegiatan IndoAWM ini akan dilaksanakan pada periode 2018-2023, namun dalam perjalanannya terjadi beberapa kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 2023 berupa penambahan dana dan perpanjangan waktu hingga 30 Juni 2024. Selanjutnya, perubahan kedua berupa penambahan durasi kegiatan hingga tanggal 31 November 2024, berdasarkan pertimbangan adanya kegiatan *workshop*, diseminasi, revidi akhir kegiatan, dan penyelesaian proses administrasi untuk penutupan kegiatan IndoAWM.

Tujuan kegiatan IndoAWM adalah menganalisis dampak sosial ekonomi terkait penerapan teknologi *Wide Area Management* (WAM) yang diterapkan pada budi daya mangga. Lokasi kegiatan mencakup Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Sasaran kegiatan adalah para petani mangga di dua kabupaten tersebut. Kegiatan yang dilakukan antara lain survei lapang, memberikan pelatihan kepada petani mangga tentang pentingnya budi daya mangga yang baik untuk menghasilkan mangga berkualitas, menganalisis dampak sosial ekonomi, melakukan sosialisasi dan pelatihan, dan memberikan pendampingan kepada petani mangga terkait pemasaran mangga ke pasar modern. Kemudian, pada tahun 2023, ACIAR menambahkan kajian terkait gender pada usaha tani mangga yang menjadi sampel dalam kegiatan AWM ini untuk mengetahui peran dan pengaruh gender dalam usaha tani mangga.

Tahun 2024 ini, merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan kegiatan ini, sehingga pada tahun ini tim berfokus pada penyelesaian seluruh kewajiban proyek ini. Beberapa hal yang dilakukan tim pada tahun ini, yaitu penyusunan laporan akhir AWM dan Gender, penulisan artikel ilmiah, dan *End of Project Review*. Kegiatan IndoAWM telah memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, terutama dalam peningkatan kualitas dan nilai ekonomi mangga Gedong Gincu serta pengurangan dampak lalat buah. Salah satu hasil utama dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan harga mangga Gedong Gincu (GG). Sebelum penerapan AWM, tingkat kerusakan akibat lalat buah mencapai 50-60%, terutama pada mangga yang digincukan, sehingga petani lebih memilih memanen dalam kondisi hijau. Namun, setelah AWM diterapkan, hampir semua petani mulai memanen dalam bentuk gincu, yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Selain itu, tingkat kerusakan mangga berkurang drastis, dari 3.000 kg hanya sekitar 6 kg (30 buah) yang rusak. Peningkatan harga juga sangat signifikan, di mana harga mangga Gedong meningkat dari Rp14.000/kg menjadi Rp35.000/kg.

Penerapan AWM *Integrated Pest Management* (IPM) juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani. Tim IndoAWM memberikan pendampingan kepada petani untuk menjual hasil panen langsung ke ritel modern seperti PT. AEON, sehingga petani berhasil menghindari ketergantungan pada pedagang pengumpul dan memperoleh harga yang lebih tinggi. Selain itu, pengurangan penggunaan pestisida membantu menekan biaya produksi, sehingga meningkatkan keuntungan petani. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa teknologi AWM dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan daya saing pertanian.

Dari sisi peran gender, survei yang dilakukan IndoAWM mengungkapkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait pembelian pestisida dan input pertanian lainnya, karena mereka mengelola keuangan rumah tangga. Data gender yang dikumpulkan dalam laporan IndoAWM membantu mengidentifikasi perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pertanian mangga, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pertanian yang lebih inklusif.

Selain manfaat ekonomi dan sosial, penerapan AWM juga berdampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan petani. Dengan mengurangi penggunaan pestisida, teknologi ini membantu menekan risiko kesehatan bagi petani sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan sekitar perkebunan mangga. Hal ini menjadi langkah penting dalam menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, penerapan AWM berpotensi memberikan dampak yang lebih luas. Keberhasilan program IndoAWM menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan hama terpadu dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing pertanian Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

b. Evaluating service provision approaches and value-chain interventions to support milk cooperatives to grow the smallholder dairy sector of Indonesia (IndoDairy 2)

Kegiatan IndoDairy2 mulai dilaksanakan pada 5 Juni 2024, setelah perjanjian kerja sama dengan ACIAR sebagai donor disetujui oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dengan nilai kontrak AUD 246.381. Seluruh proses serta tahapan administrasi telah dilaksanakan sesuai peraturan pengelolaan hibah yang berlaku. Berdasarkan perjanjian kerja sama, kegiatan IndoDairy 2 akan berakhir pada 30 April 2029.

Kegiatan IndoDairy2 dilaksanakan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait peningkatan peran koperasi dan institusi yang memiliki fungsi seperti koperasi dalam memberikan berbagai jasa terhadap anggotanya (peternak sapi perah). IndoDairy 2 akan melengkapi pemahaman akan rumah tangga peternak sapi perah dan berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak serta dalam upaya memahami hubungan peternak dengan koperasi dan industri pengolahan susu. Selain PSEKP yang memiliki peran merumuskan kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan ini, IndoDairy 2 juga melibatkan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University dan Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro yang akan melaksanakan pengumpulan data di tingkat koperasi.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan tim IndoDairy2 yang melibatkan pemangku kebijakan di sektor persusuan, akademisi, peternak, dan koperasi peternak sapi perah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim IndoDairy2 pada tahun 2024, antara lain (1) Dairy Nutrition Workshop di Malang yang membahas manajemen pakan di tingkat peternak dan koperasi serta merumuskan solusi peningkatan nutrisi pakan sapi perah; (2) pengumpulan data di Jawa Barat dan Jawa Tengah melalui FGD untuk memahami tantangan koperasi susu dan mencari solusi dalam penyediaan pakan. (3) Dairy Policy

Advisory Committee (DPAC) yang akan menjadi forum koordinasi antar kementerian dan pemangku kepentingan industri susu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan; dan (4) workshop dengan tim IPB, UNDIP, CQ University dan ACIAR mengenai evaluasi dan capaian tahun 2024 serta menyusun rencana kerja 2025

c. Evidence to Underpin Indonesia's Agriculture Technology Transformation (Digital AgTech)

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Beanstalk Ag Tech Pty Ltd dengan Universitas Brawijaya dan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian untuk melakukan “mapping” berbagai platform digitalisasi di sektor pertanian sebagai bagian dari proses transformasi sektor pertanian menuju pembangunan pertanian yang modern, adaptif dan inklusif. Kegiatan ini dibiayai dari dana hibah ACIAR yang pelaksanaannya menggabungkan aktivitas penelitian dengan penyusunan rekomendasi kebijakan. Kontrak kegiatan ini telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian pada 17 September 2024. dan telah memenuhi seluruh proses serta tahapan administrasi sesuai peraturan pengelolaan hibah yang berlaku. Berdasarkan perjanjian kerja sama, kegiatan ini akan berakhir pada 30 April 2027.

Tim Digital AgTech pada tahun 2024, melakukan berbagai diskusi mengenai digitalisasi pertanian dengan Bappenas, BPSDMP, PEPI dan Ditjen Hortikultura, membahas implementasi teknologi digital di sektor pertanian. Dismaping itu, tim Digital AgTech juga melakukan mengumpulkan data di berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Lampung, dengan fokus pada evaluasi implementasi teknologi digital, peran pemangku kepentingan, serta dampaknya bagi petani. Data yang dikumpulkan kemudian digunakan dalam kegiatan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis digital yang lebih komprehensif. Berbagai kegiatan yang dilakukan di tahun 2024 ini ditujukan untuk mapping lokasi yang akan menjadi sampel dari kajian ini.

d. Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat terhadap Efisiensi Biaya dan Daya Saing Kelapa Sawit Rakyat

Kegiatan kajian ini merupakan mandat dari Kementerian Pertanian terkait perkembangan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Inisiatif tersebut diwujudkan dengan melakukan bentuk kerjasama kegiatan kajian antara Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kegiatan kerjasama tersebut awalnya akan dilaksanakan hingga tahun 2025 dengan rancangan kegiatan dilakukan setiap tahun sesuai tahun anggaran berjalan. Kegiatan kajian pertama dimulai pada akhir tahun 2022 dan berlanjut pada tahun berikutnya yakni tahun 2023 sehingga praktis tahun 2024 merupakan tahap ke-tiga yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan antar tahun terjadi dinamika mengingat adanya kepentingan dari pihak pemberi dana dalam hal ini BPDPKS, namun pelaksanaan pada setiap tahun anggaran dapat berjalan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Tahap pertama kegiatan dilakukan pada periode September-Desember 2022 sementara tahap kedua

dilakukan pada periode Juli-Desember 2023. Tahap ketiga atau terakhir kegiatan ini dilaksanakan pada Januari-Desember 2024.

Tujuan kegiatan kajian adalah mengetahui pengaruh Program PSR terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi biaya usaha tani dan daya saing kelapa sawit di Indonesia. Analisis yang dilakukan meliputi perubahan produktivitas, capaian efisiensi biaya usaha tani dan daya saing global antara pekebun peserta program dan bukan penerima program PSR. Tujuan kegiatan kajian ini diturunkan menjadi tujuan per tahun dan rincian tujuan kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut: (1) melakukan survei dan wawancara responden pada masing-masing provinsi terpilih; (2) melakukan advokasi dari hasil rumusan dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun sebelumnya; (3) Melakukan diskusi publik (stakeholder meeting) untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dan strategi pengembangan PSR tahap berikutnya dengan mengundang stakeholder kelapa sawit rakyat mulai level pusat, provinsi, dan kabupaten; (4) merancang *database* input dan output usahatani petani kelapa sawit penerima dan bukan penerima program PSR sesuai dengan karakteristik masing-masing lokasi, dan karakteristik responden petani; (5) menganalisis pengaruh Program PSR terhadap penerimaan, produktivitas, produksi, efisiensi biaya usahatani dan daya saing global kelapa sawit di provinsi terpilih; (6) melakukan identifikasi proporsi kelompok responden petani yang memiliki kemampuan produktivitas dan efisiensi biaya tinggi dan proporsi usahatani kelapa sawit yang memproduksi secara kompetitif dan proporsi dari total produksi yang dihasilkan secara kompetitif yang dihasilkan dari pelaksanaan Program PSR dengan membandingkannya dengan Non Program PSR di provinsi terpilih; (7) Menganalisis pengaruh peningkatan efisiensi biaya usahatani penerima Program PSR terhadap daya saing global produksi kelapa sawit di Provinsi terpilih dengan melakukan perbandingan dengan non program PSR; (8) mematangkan rekomendasi perbaikan ditingkat petani dalam rangka produktivitas, efisiensi biaya dan daya saing produksi kelapa sawit rakyat; (9) merumuskan usulan kebijakan dan strategi akselerasi program PSR, dan rekomendasi model perbaikan dan strategi pengembangan PSR tahapan berikutnya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya dan daya saing secara lebih komprehensif dan aplikatif untuk diimplementasikan di level petani.

Hingga akhir tahun 2024, analisis kajian ini menunjukkan: (1) produksi dan produktivitas sawit petani PSR lebih tinggi, namun pendapatan usahatannya sedikit lebih rendah dibandingkan petani non PSR; (2) petani PSR lebih efisien baik secara teknis maupun biaya dibandingkan petani non PSR; (3) petani non PSR memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang sedikit lebih baik dibandingkan petani PSR; (4) faktor yang mempengaruhi daya saing sawit rakyat adalah efisiensi biaya, luas lahan, dan indeks harga konsumen; dan (5) hambatan utama implementasi program PSR adalah pada aspek teknis terkait intervensi Aparat Penegak Hukum. Rekomendasi kebijakan yang disarankan terkait kelengkapan basis data petani sawit, kualitas perencanaan program, sinkronisasi dan koordinasi antar stakeholder terkait, dan perlunya re-survei untuk mengetahui dampak program terhadap kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan.

6.2. Layanan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Kegiatan diseminasi dan publikasi PSEKP dilakukan dengan menggunakan berbagai media. Pada tahun 2024, publikasi rutin berkala yang masih diterbitkan adalah Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) secara OJS yang tercetak dalam dua nomor setiap tahun, dan Newsletter terbit tercetak tiga kali setahun. PSEKP juga memiliki media diseminasi digital berupa website dan media sosial (facebook, twitter, instagram, dan youtube). Kegiatan diseminasi juga dilakukan dengan menerbitkan buku tematik. Layanan perpustakaan juga tersedia yang dapat diakses secara digital maupun melalui kunjungan langsung.

6.2.1. Bentuk-bentuk Diseminasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

1. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian (AKP)

Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) adalah jurnal ilmiah yang membahas isu aktual pembangunan pertanian yang memuat artikel analisis kebijakan responsif dan antisipatif pertanian daerah dan nasional. Pada Tahun 2017, untuk menjaring lebih banyak naskah dan memperkaya artikel AKP, maka PSEKP melakukan kerja sama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) sesuai dengan surat Nomor: 727.7/HM.140/A.11/6/2017 dan Nomor: 1304/SK/PP.PERHEPI/ VI/2017.

Analisis Kebijakan Pertanian terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala LIPI Nomor: 672/Akred/P2MI-LIPI/07/2015. Pada tahun 2018, AKP terakreditasi kembali berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan nomor sertifikat 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018. Reakreditasi Kembali telah diajukan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 148/M/KPT/2020 AKP ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2. Akreditasi berlaku selama lima tahun, yaitu Volume 17 Nomor 2 Tahun 2019 sampai Volume 22 Nomor 1 Tahun 2024.

Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian terbit dalam bentuk tercetak dan daring (*online journal system-OJS*). Terbitan dalam bentuk OJS dapat diakses pada alamat: <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/issue/view/617>. Pada tahun 2024 terdapat 311 artikel yang masuk selama OJS aktif. Dari sejumlah artikel tersebut, terdapat 41 artikel yang diterima untuk diproses lebih lanjut untuk diterbitkan dan 11 artikel sudah diterbitkan pada Volume 22 Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2024. Artikel yang ditolak dengan pertimbangan ketidaksesuaian dengan ruang lingkup AKP dan penulis yang tidak melakukan perbaikan sesuai penilaian reviewer. Pengelolaan artikel di Jurnal AKP berdasarkan Open Journal System pada 2024 terdapat pada Tabel 25. Rincian judul dan penulis artikel yang diterbitkan pada Jurnal AKP Volume 22 Nomor 1 dan Nomor 2 disajikan pada Tabel 26 dan Tabel 27.

Tabel 25. Pengelolaan artikel di Jurnal AKP berdasarkan *Open Journal System*, 2024

<i>Trends</i>	Akumulasi jumlah artikel sejak OJS aktif
<i>Submissions Received</i>	311
<i>Submissions Accepted</i>	41
<i>Submissions Declined</i>	163
<i>Submissions Declined (Desk Reject)</i>	157
<i>Submissions Declined (After Review)</i>	6
<i>Submissions Published</i>	111
<i>Other Submissions</i>	238

Tabel 26. Judul dan penulis artikel Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 22 No. 1, Juni 2024

No.	Judul	Penulis
1.	Implementasi Kebijakan Usaha Pakan untuk Mendukung Pengembangan Industri Perunggasan	Lidya Rahma Shaffitri, Wahida, Resty Puspa Perdana, Nyak Ilham, Esty Asriyana Suryana
2.	Pengembangan Model Integrasi Karet-Sapi di Daerah Sentra Perkebunan Karet: Studi Kasus di Banyuasin, Sumatera Selatan	Andrea Akbar, Sahuri
3.	The Dynamics of Indonesia Agricultural Development and Livelihoods in Drylands: Concepts, Actors, and Challenges	Komang Ariyanto
4.	Dinamika Perubahan Nilai Indikator Strategis Pembangunan Pertanian dan Transformasi Perdesaan	Rangga Ditya Yofa; Sumedi, Sri Hery Susilowati
5.	Ketersediaan Beras Menuju Kemandirian Pangan: Pendekatan Sistem Dinamik	Risna Rahmatul Wajdah; Rita Nurmalina, Yusalina
6.	Hubungan Karakteristik Mahasiswa dengan Minat Bekerja di Pertanian: Studi Kasus Fakultas Pertanian, Universitas Sintuwu Maroso	Nurmayanti H Ahmad, Andri Amaliel Managanta, Toyip, Ita Mowidu

Tabel 27. Judul dan penulis artikel Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 22 No. 2, Desember 2024

No.	Judul	Penulis
1.	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kesetaraan Gender di Sektor Pertanian Indonesia	Rizghina Ikhwan, Agung Saras Sri Raharjo, Ahmad Makki Arrozi
2.	Dinamika Perilaku dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peternak Susu: Kasus di Magelang, Jawa Tengah	Wardi Wardi; Rosa Zulfikhar, Muzizat Akbarrizki, Budi Purwo Widiarso
3.	Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Penerapan Strategi Adaptasi Perubahan Iklim oleh Petani Kentang di Jawa Timur	Desta Prasanthi Anggraini, Fahriyah, Rosihan Asmara

No.	Judul	Penulis
4.	Manfaat Pendirian Koperasi Untuk Mengelola Usaha Penyewaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA): Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	Sri Hanggana
5.	Volatilitas Harga Daging dan Telur Ayam Ras di Indonesia	Atikah Fajriyah Mubarak, Agus Setiadi, Komalawati, Suci Wulandari, Eddy Supriadi Yusuf
6.	Penyempurnaan Indikator Keterjangkauan pada Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi	Nita Yulianis, Farit Mochamad Afendi, Achmad Suryana, Drajat Martianto, Miftahul Jannah, Sri Harjanti Nugraeni, Ambar Rukmi Dyah Kusumawardani, Annisa M. Imaniyar, Arif Kurniawan
7.	Strategi Pengurangan Kehilangan Pascapanen Produk Hortikultura	Ira Mulyawanti, Esty Asriyana Suryana

2. Agro Socio-economic Newsletter

PSEKP juga memiliki terbitan berkala berupa *Agro Socio-economic Newsletter* yang merupakan media berbahasa Inggris, diterbitkan dalam upaya memperluas pembaca, baik untuk berbagai mitra dan lembaga riset serta lembaga pemerintahan di dalam negeri dan di luar negeri. *Agro Socio-economic Newsletter* terbit dalam bentuk cetak tiga kali dalam setahun sejak 2007. Namun untuk terbitan tercetak, Nomor 3 yang terjadwal terbit pada Desember tahun berjalan, dicetak pada tahun berikutnya. Majalah ini berisi lima topik: temuan-temuan penelitian PSEKP yang menarik (*research finding*), tinjauan terhadap kebijakan pemerintah yang terbaru tentang pembangunan pertanian (*recent policy development*), kegiatan penelitian PSEKP (*research activities*), publikasi terbaru PSEKP (*publication*), berita kegiatan PSEKP pada forum nasional maupun internasional (*ICASEPS news*).

Selama tahun 2024 telah dicetak *Agro Socio-economic Newsletter* Volume 16 Nomor 3 Desember 2023, Volume 17 Nomor 1 April 2024 dan Volume 17 Nomor 2 Agustus 2024. Sementara itu Volume 17 Nomor 3 Desember 2025 akan dicetak pada tahun anggaran berikutnya (Gambar 7).



Gambar 14. Agro Socio-economic Newsletter yang dikelola PSEKP, 2024

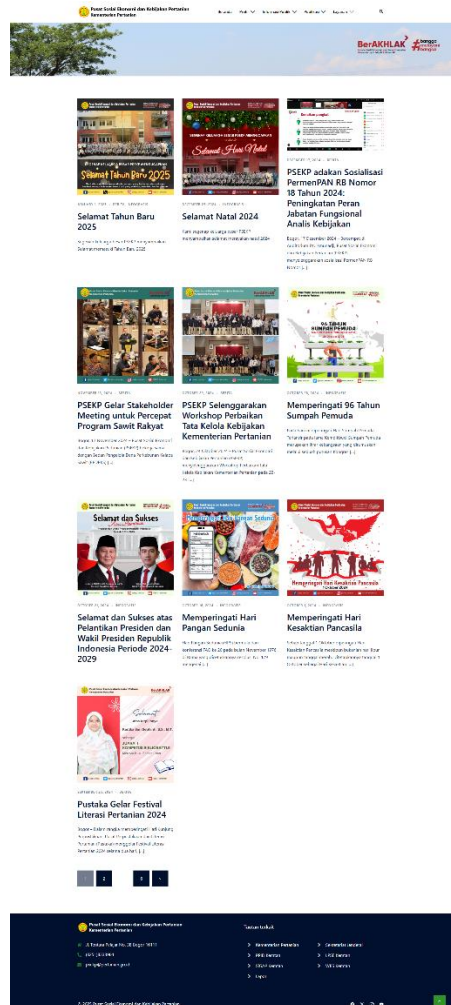
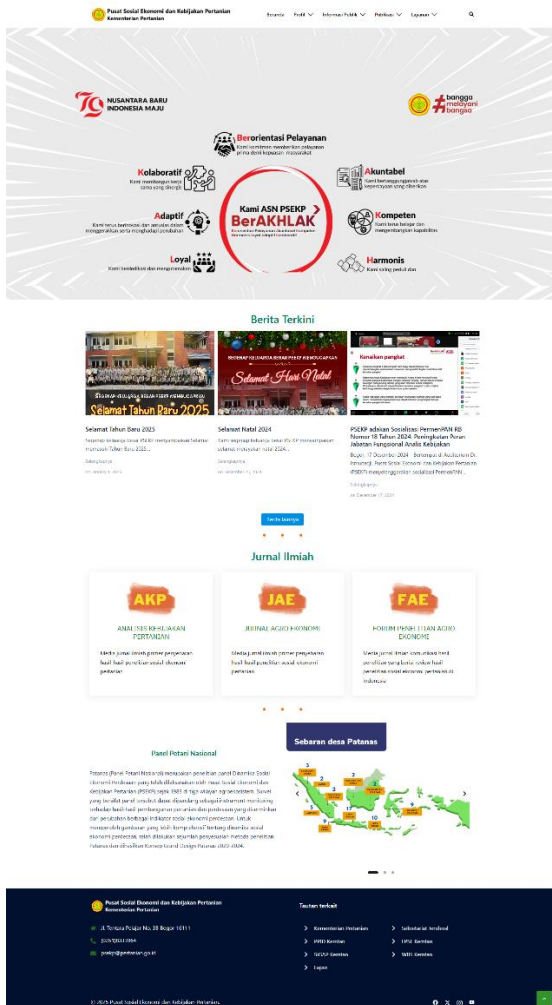
3. Website dan Media Sosial

a. Website

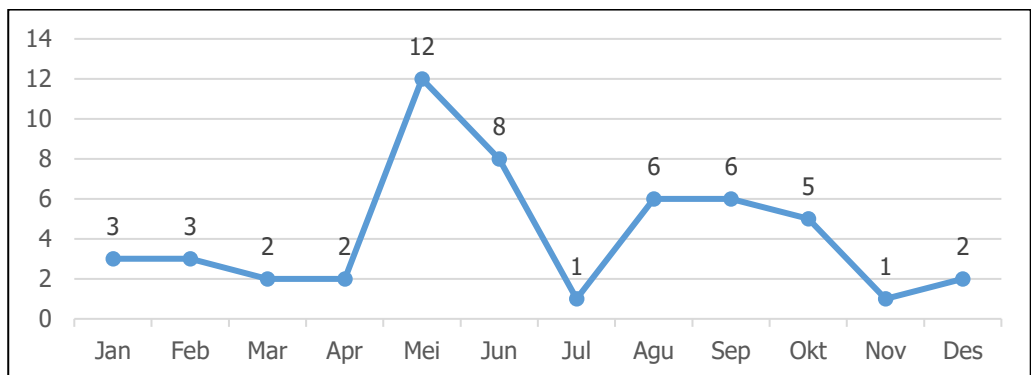
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) memiliki website sebagai media komunikasi dan diseminasi di era digital. Website merupakan platform ideal untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat, baik melalui unggahan artikel, berita, infografis, dan publikasi lainnya. Website dapat menjadi representasi digital yang mencerminkan identitas dan profesionalisme organisasi. Website juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kredibilitas organisasi PSEKP. Hal ini perlu didukung dengan desain yang menarik, navigasi yang intuitif, serta konten yang selalu terkini dan informatif.

Website PSEKP dapat diakses melalui tautan <http://psekp.setjen.pertanian.go.id>. Website PSEKP menyajikan berbagai informasi seputar PSEKP, informasi publik, output PSEKP yang dipublikasikan, dan kegiatan yang dilaksanakan PSEKP. Tampilan website disajikan pada Gambar berikut ini.

Informasi seputar PSEKP yang ditampilkan pada website meliputi sejarah, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi. Informasi publik yang ditampilkan antara lain DIPA, laporan kinerja, dan laporan tahunan. Output PSEKP yang dipublikasikan di website meliputi hasil policy brief, hasil analisis kebijakan, newsletter, dan buku tematik. Terdapat penambahan halaman baru pada website terkait konferensi internasional yang rutin diselenggarakan PSEKP per dua tahun, yaitu International Conference on Agriculture, Natural Resources, and Rural Development (ICANaRD). Kegiatan yang dilaksanakan PSEKP disajikan pada website dalam bentuk berita atau infografis yang diunggah setiap bulannya. Selama tahun 2024 terdapat total 51 unggahan konten baik berupa berita maupun infografis. Berikut rekapitulasi jumlah berita yang diunggah per bulan di tahun 2024.

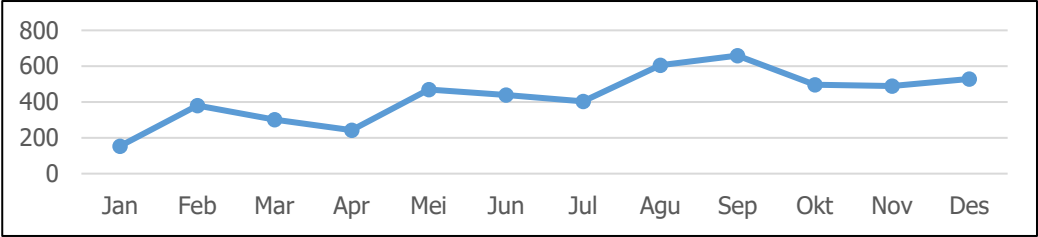


Gambar 15. Tampilan website PSEKP



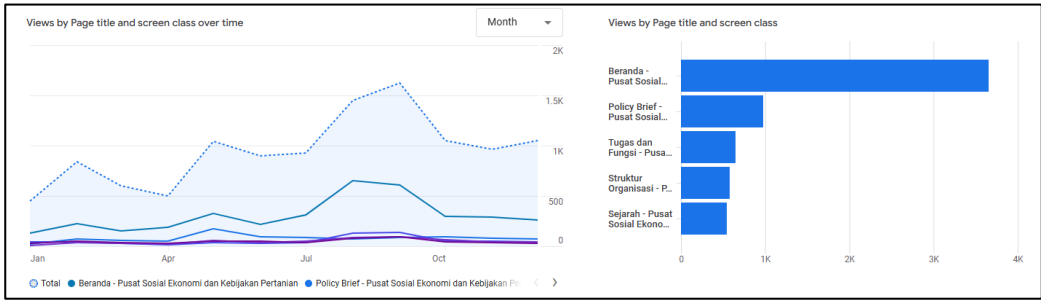
Gambar 16. Rekapitulasi jumlah unggahan berita per bulan pada Website PSEKP 2024

Analisis pengaksesan website dilakukan setiap bulannya menggunakan tools Goggle Analytics. Jumlah pengunjung website didapatkan dari perhitungan Google Analytics. Selama tahun 2024 terdapat total 5.171 pengunjung yang diakumulasi dari pengunjung tiap bulan. Detil demografi pengunjung website beragam dengan mayoritas berasal dari Indonesia. Berikut rekapitulasi jumlah pengunjung website per bulan di tahun 2024.



Gambar 17. Rekapitulasi jumlah pengunjung per bulan, 2024

Berdasarkan hasil analisis dari Google Analytics didapatkan halaman pada website yang sering dikunjungi antara lain beranda, policy brief, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sejarah, analisis kebijakan, dan berita. Berikut gambaran jumlah kunjungan pada 5 halaman yang paling sering diakses.



Gambar 18. Rekapitulasi pengunjung pada halaman yang sering diakses

Website PSEKP dapat diakses 24 jam sehari dengan menggunakan browser apa saja selama komputer yang digunakan terkoneksi dengan internet. Backup data website dilakukan rutin setiap bulan. Hal ini dilakukan sebagai tindakan mitigasi jika terjadi serangan siber yang berdampak pada hilangnya data website.

b. Medsos

Dalam rangka menyebarluaskan informasi kegiatan lingkup PSEKP dan Kementerian Pertanian, PSEKP mengelola empat jenis media sosial yang berbeda dengan jangkauan pembaca yang juga beragam. Keempat medsos PSEKP tersebut dapat dilihat pada alamat:

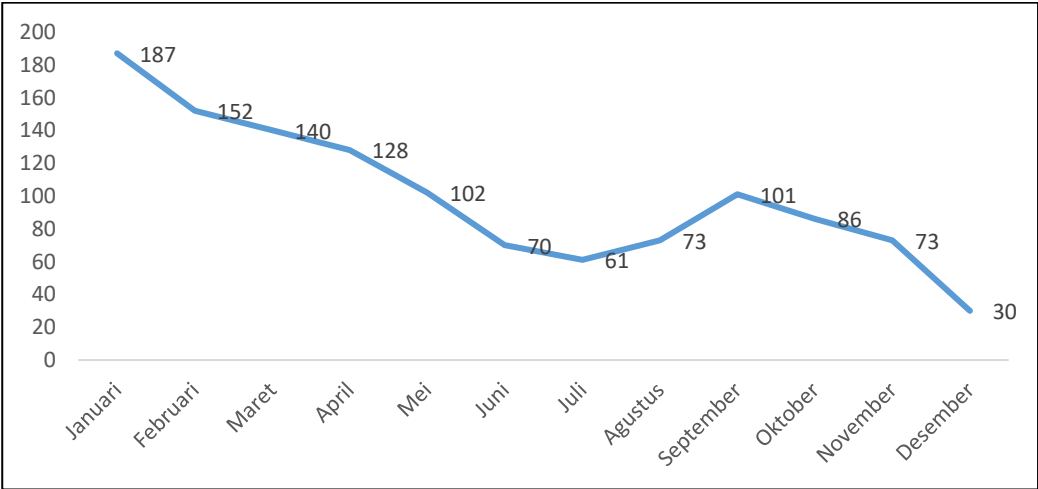
- <https://www.facebook.com/PSEKP.KementerianPertanian/>
- https://twitter.com/PSEKP_KEMENTAN/
- https://www.instagram.com/PSEKP_KEMTAN/
- https://www.youtube.com/results?search_query=psekp

Unggahan konten pada medsos dilakukan setiap hari meliputi reposting berita dari website Kemtan, berita tentang aktivitas yang dilakukan PSEKP, dan berita pertanian dengan permintaan khusus untuk diviralkan. Selama tahun 2024, aktivitas medsos terbanyak terjadi di facebook dan twitter. Jumlah unggahan terbanyak dilakukan melalui medsos facebook diikuti dengan twitter. Namun dibandingkan facebook dan twitter, interaksi terbanyak terdapat di twitter mencapai 950 dengan like sebanyak 856. Demikian pula jumlah follower di twitter yang jauh lebih banyak daripada facebook, instagram dan youtube. Peningkatan jumlah follower medsos PSEKP selama tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 adalah follower di instagram. Sementara itu peningkatan follower youtube sebesar 7,02 persen, facebook 3,58 persen dan twitter 1,22 persen. Rekap unggahan media sosial PSEKP disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Rekap unggahan Media Sosial PSEKP, Tahun 2024

Medsos	Jumlah unggahan	Interaksi	Likes	Komen	Share/RT/ views/klik	Followers	
						2024	2023
Facebook	30	420	341	5	74	4425	4.272
Twitter	20	950	856	4	90	6990	6.906
Instagram	1	24	24	0	0	2030	1.895
Youtube	0	5	1	0	4	122	114

Perkembangan jumlah unggahan berita setiap bulan selama tahun 2024 disajikan pada Gambar 1. Jumlah berita per bulan memiliki keterkaitan dengan jumlah aktivitas PSEKP setiap bulannya. Jumlah berita paling banyak diupload pada bulan Januari dibandingkan di akhir tahun karena kegiatan koordinasi maupun evaluasi tahun sebelumnya memang banyak dilakukan di awal tahun. Sementara itu, pemberitaan di akhir tahun dominan terkait dengan evaluasi dan pelaporan kegiatan yang sudah berjalan.



Gambar 19. Perkembangan jumlah berita pada Media Sosial PSEKP, 2024

6.2.2. Distribusi Publikasi

Distribusi publikasi hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dilakukan untuk menyebarluaskan dan mendiseminasikan kepada pengguna yang relevan dengan tugas dan fungsi PSEKP. Pengguna inilah yang menjadi penerima publikasi dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu satuan kerja (Satker) lingkup internal Kementerian Pertanian, K/L luar Kementan dan Perguruan Tinggi. Jenis Publikasi yang didistribusikan adalah Newsletter tiga volume tahun 2023, Forum Agroekonomi Vol. 39 No. 2, Forum Agroekonomi Vol. 40 No.1, Analisis Kebijakan Pertanian Vol.19 No.2, Analisis Kebijakan Pertanian Vol.20 No.1, Jurnal Agroekonomi Vol. 39 No. 2, Jurnal Agroekonomi Vol. 40 No. 1 dan Laporan Tahunan PSEKP tahun 2022 dan 2023. Realisasi distribusi publikasi menurut penerima yang sekaligus pengguna hasil analisis PSEKP sebagaimana disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29. Distribusi publikasi dokumentasi hasil analisis PSEKP, 2024

No.	Jenis Publikasi Dokumentasi Hasil Analisis PSEKP Yang Didistribusikan	Penerima		
		Satker Lingkup Kementan	K/L luar Kementan	Perguruan Tinggi
1.	Newsletter Vol. 16 No. 3	9	1	5
2.	Newsletter Vol. 17 No. 1	8	-	-
3.	Forum Agro Ekonomi Vol. 40 No. 2	9	1	10
4.	Forum Agro Ekonomi Vol. 41 No. 1	9	1	10
5.	Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 20 No. 2	9	2	8
6.	Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 21 No. 1	9	2	2
7.	Jurnal Agro Ekonomi Vol. 40 No. 2	9	1	10
8.	Jurnal Agro Ekonomi Vol. 41 No. 1	9	1	10

6.2.3. Perpustakaan

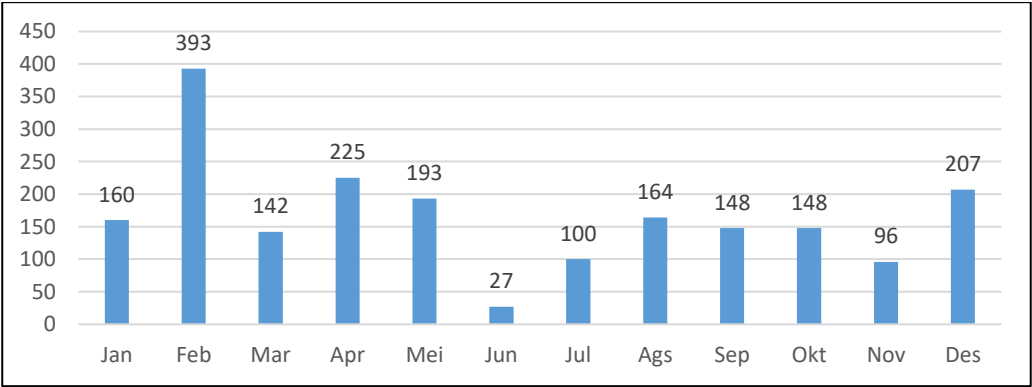
Perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah unit pelaksana dalam tim kerja pemanfaatan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Sebagai perpustakaan khusus, perpustakaan PSEKP berperan dalam menyediakan layanan informasi yang mendukung tugas dan fungsi PSEKP.

Pada tahun 2024, Perpustakaan PSEKP menetapkan sejumlah target kinerja untuk meningkatkan layanan dan pemanfaatan koleksi yang tersedia. Dalam aspek ketersediaan koleksi, perpustakaan berupaya menambah jumlah judul baru, baik dalam bentuk cetak maupun digital, serta melakukan digitalisasi dokumen dan laporan kegiatan. Selain itu, pengembangan pangkalan data perpustakaan digital juga menjadi fokus utama. Dari segi pemanfaatan fasilitas, Perpustakaan PSEKP menargetkan peningkatan jumlah kunjungan, baik secara langsung maupun daring, serta peningkatan angka peminjaman atau unduhan koleksi dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menjaga kualitas layanan, perpustakaan menargetkan pencapaian indeks kepuasan pengguna minimal 3,25 dalam skala Likert. Sebagai upaya

memperluas jangkauan informasi, promosi perpustakaan juga akan diintensifkan melalui berbagai platform media sosial, seperti WhatsApp Group, Instagram, dan Facebook Fanpage).

a. Ketersediaan Koleksi

Sepanjang tahun 2024, Perpustakaan PSEKP secara rutin menambah koleksi baru serta koleksi digital setiap bulannya. Secara keseluruhan, sebanyak 2.003 judul baru, termasuk hasil digitalisasi dokumen dan laporan kegiatan, berhasil ditambahkan. Pola fluktuatif dalam penambahan koleksi ini mencerminkan komitmen Perpustakaan PSEKP dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna secara berkelanjutan. Peningkatan signifikan pada bulan Desember dipengaruhi oleh agenda akhir tahun, yang bertujuan untuk memastikan tercapainya target tahunan dalam pengembangan koleksi perpustakaan.



Gambar 20. Penambahan koleksi baru dan koleksi digital

Untuk meningkatkan kualitas layanan dengan menambah koleksi tercetak guna memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Selama tahun tersebut, sebanyak 45 judul buku baru berhasil ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan. Penambahan ini mencakup berbagai topik yang relevan dengan bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, sesuai dengan fokus utama perpustakaan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya sumber referensi bagi peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan literatur terbaru yang dapat mendukung kegiatan penelitian dan pengambilan keputusan di sektor pertanian.

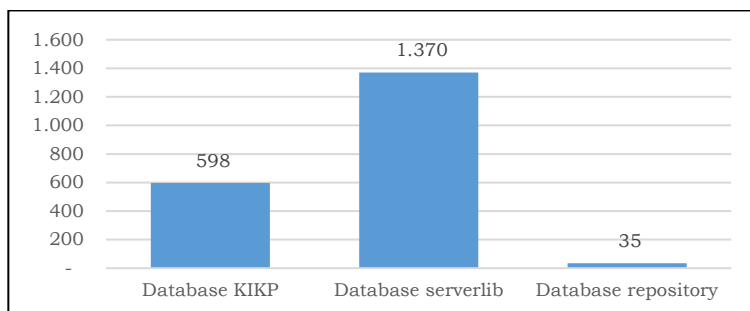
Tabel 30. Judul penambahan koleksi tercetak baru Perpustakaan PSEKP, 2024

No.	Uraian
1.	Bunga Rampai Rantai Pasok Pertanian, Speciality Kopi Indonesia di Pasar Global
2.	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2021 (Buku 1, 2 dan 3)

No.	Uraian
3.	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2022 (Buku 1, 2 dan 3)
4.	Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, Februari 2022
5.	Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, Agustus 2022
6.	Keadaan Pekerja di Indonesia, Februari 2022
7.	Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia, Februari 2022
8.	Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia, Agustus 2022
9.	Indikator Ekonomi 2022 (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2021)
10.	Statistik Pendapatan Agustus 2022
11.	Neraca Arus Dana Indonesia Triwulanan 2019-2022:2
12.	Neraca Pemerintah Umum Indonesia 2016-2021
13.	Statistik Indonesia 2023
14.	Pangan Berdaulat, Generasi Sehat, Bangsa Bermartabat
15.	Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Pertanian: Karakteristik dan Penanggulangannya
16.	Ragam Topik dalam Kajian Ekonomi Pertanian dan Agribisnis: Teori dan Praktik Analisis Data
17.	Keong Mas Hama Padi Tantangan Dan Peluang
18.	Bioteknologi Industri Susu
19.	Metode dan Aplikasi Perhitungan: Pemanfaatan Data Sekunder di Bidang Ekonomi Pertanian dan Agribisnis
20.	Pemikiran Guru Besar Universitas Gadjah Mada Menuju Indonesia Maju 2045: Bidang Agro
21.	Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan Rawa: Kearifan Kebijakan dan Keberlanjutan
22.	Trivia Rawa: Serba Serbi Sumber Daya Lahan Rawa
23.	Erosi Dan Konservasi Lahan
24.	Analisis Pangan
25.	Kebakaran Lahan Gambut: Dari Asap Sampai Kanalisasi
26.	Dinamika Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia
27.	Aspek Dasar Agronomi Berkelanjutan
28.	Debat Gambut
29.	Sistem Pertanian Terpadu: Pengukuran Potensi Sumber Daya & Ekonomi Pada Ruminansia Kecil
30.	Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata guna Lahan
31.	Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan
32.	Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian
33.	Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional
34.	Petunjuk Praktis Menulis Buku

No.	Uraian
35.	Fisiologi Pascapanen Buah dan Sayur
36.	Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian
37.	Karakteristik dan Keragaman Genetik Ayam Lokal Indonesia
38.	Manajemen Agribisnis Kelapa Sawit
39.	Pengantar Ilmu Pertanian
40.	Artificial Intelligence and Smart Agriculture Applications
41.	The Digital Age in Agriculture
42.	Engendering Agricultural Development
43.	Internet Of Things (IoT) Enabled Automation in Agriculture
44.	Internet Of Things for Agriculture 4.0
45.	Sustainable Agriculture for Food Security

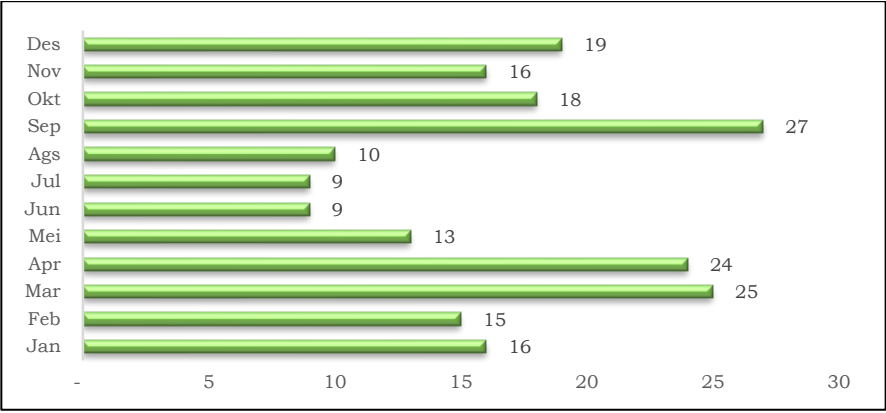
Sepanjang tahun 2024, Perpustakaan Digital PSEKP terus menambah jumlah record pada berbagai aplikasi utama yang dikelolanya, seperti Katalog Induk Kementerian Pertanian (KIKP), Serverlib, dan Repository Kementerian Pertanian. Secara keseluruhan, jumlah record yang ditambahkan mencapai 2.003, mencerminkan komitmen Perpustakaan PSEKP dalam memperluas akses informasi digital bagi peneliti, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas.



Gambar 21. Penambahan *record* pada beberapa aplikasi perpustakaan digital PSEKP

b. Kunjungan Onsite

Kunjungan onsite mengacu pada kehadiran langsung pengguna di perpustakaan untuk memanfaatkan berbagai fasilitas, seperti ruang baca, layanan referensi, dan koleksi cetak. Data kunjungan onsite mencerminkan sejauh mana perpustakaan tetap relevan dan menarik bagi pengguna lokal. Sepanjang tahun 2024, jumlah total kunjungan langsung ke Perpustakaan PSEKP mencapai 201 orang. Secara umum, tren kunjungan onsite menunjukkan pola fluktuatif, dengan beberapa bulan mengalami peningkatan signifikan. Pada awal tahun, kunjungan relatif stabil, dengan puncak tertinggi terjadi pada Maret dan disusul oleh April. Namun, pertengahan tahun menunjukkan penurunan tajam, dengan jumlah kunjungan terendah tercatat pada bulan Juni dan Juli. Aktivitas onsite kembali meningkat pada bulan September, yang mencatat angka kunjungan tertinggi sepanjang tahun 2024.



Gambar 22. Kunjungan onsite Perpustakaan PSEKP per bulan

c. Kunjungan online

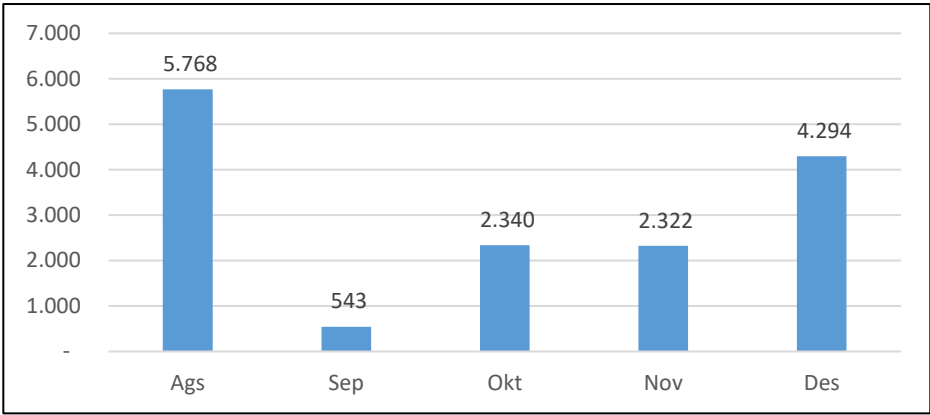
Kunjungan online mencerminkan interaksi pengguna dengan layanan digital perpustakaan melalui berbagai platform, seperti Katalog Induk Kementerian Pertanian-KIKP (<https://kikp-pertanian.id/psekp/opac/>), Serverlib (<http://serverlib/homepse/>), dan Repositori (<https://repository.pertanian.go.id/>). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas perpustakaan dalam menyediakan akses informasi yang mudah dijangkau. Sepanjang tahun 2024, total kunjungan digital pada tiga platform perpustakaan digital PSEKP mencapai 2.614.768 hits. Tren kunjungan digital menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan KIKP mencatat jumlah kunjungan tertinggi dibandingkan Serverlib dan Repositori. Hal ini mengindikasikan bahwa KIKP memiliki tingkat popularitas dan fungsionalitas yang lebih luas di antara pengguna.

Tabel 31. Kunjungan digital Perpustakaan PSEKP, 2024

Kunjungan digital	KIKP	Serverlib	Repositori
Jan	162	369	-
Feb	251,927	41	-
Mar	24,049	92	-
Apr	11,730	68	-
Mei	77,999	605	-
Jun	460,043	0	-
Jul	184,970	209	-
Ags	130,590	0	5,768
Sep	139,294	315	543
Okt	396,325	391	2,340
Nov	362,706	195	2,322
Des	557,201	220	4,294
Total	2,596,996	2,505	15,267

d. Pinjaman dan unduhan

Layanan pinjaman dan unduhan mencerminkan tingkat pemanfaatan koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk fisik melalui peminjaman buku cetak maupun dalam bentuk digital melalui unduhan e-book, jurnal, atau dokumen lainnya. Data ini menjadi indikator relevansi dan kualitas koleksi yang tersedia bagi pengguna.



Gambar 23. Transaksi pinjaman buku dan unduhan perpustakaan digital PSEKP Agustus-Desember 2024

Sepanjang tahun 2024, pencatatan transaksi pinjaman buku dan unduhan dari perpustakaan digital PSEKP dimulai pada bulan Agustus, dengan total transaksi mencapai 15.267 kali. Unduhan koleksi, terutama publikasi terbitan PSEKP, paling banyak dilakukan melalui platform Repositori. Bulan Agustus mencatat jumlah transaksi tertinggi, yakni 5.768 kali, yang bertepatan dengan perayaan Hari Kunjung Perpustakaan yang diselenggarakan oleh PUSTAKA. Promosi lomba dalam rangka acara tersebut turut mendorong masyarakat untuk mengakses platform Repositori Kementerian Pertanian, di mana publikasi terbitan PSEKP tersedia untuk diunduh.

Tabel 32. Jumlah views dan unduhan per judul publikasi terbitan PSEKP pada platform Repositori Kementan, 2024.

No	Judul	Views	Unduh
1.	Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog	72	314
2.	Implementasi Ilmu Sosial Dalam Pengembangan Lahan Rawa: Sebagai Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045	42	26
3.	Transformasi Pertanian dan Perdesaaan untuk Kesejahteraan Petani	96	244
4.	Isu Kontemporer Kebijakan Pembangunan Pertanian 2000-2004	17	19
5.	Membumikan IPTEK Pertanian. Seri 1	27	23
6.	Pemetaan dan Reviu Proses Bisnis Perencanaan Kawasan Perkebunan Kopi di Indonesia	108	601

No	Judul	Views	Unduh
7.	Pemantapan Model Pengembangan Kawasan Agribisnis Sayuran Sumatera (KASS)	31	340
8.	Temuan-temuan Pokok dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian dari Hasil-hasil Penelitian PSEKP Tahun 2015	40	172
9.	Redesain Kebijakan Pembangunan Pertanian: Kontribusi Profesor Riset PSEKP 1995-2021	36	239
10.	Menuju Transformasi Kelembagaan Dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan	132	149
11.	Temuan-Temuan Pokok dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian: Hasil Penelitian PSEKP Tahun 2019	29	215
12.	Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional	50	267
13.	Temuan-temuan Pokok dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian dari Hasil-hasil Penelitian PSEKP Tahun 2014	35	130
14.	Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian	104	830
15.	Pandangan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Terhadap Kinerja Kebijakan Subsidi Pupuk Selama Ini dan Perbaikannya Ke Depan	24	19
16.	Wilayah Rawan Pangan dan Gizi Kronis di Papua, Kalimantan Barat dan Jawa Timur	55	219
17.	Investasi dan Perdagangan dalam Perspektif Transformasi Pertanian	39	323
18.	Membumikan IPTEK Pertanian. Seri 2	38	26
19.	Model Proyeksi Harga Jangka Pendek Beberapa Komoditas Pangan dan Perkebunan di Indonesia	27	34
20.	Ancaman El Nino dan Produksi Padi	53	257
21.	Tambal Sulam Kebijakan Perberasan	27	28
22.	Kaji Tindak (Action Research) Pemberdayaan Petani di Daerah Tertinggal	34	115
23.	Penyusunan Bahan Advokasi Delegasi Indonesia Dalam Perundingan Multilateral	26	118
24.	Diversifikasi Usaha Rumah Tangga dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia	35	84
25.	Analisa Notifikasi Dalam Kerangka Modalitas Perjanjian Pertanian WTO	12	61
26.	Kebijakan Swasembada Pangan Berkelanjutan: Komponen Strategis Dalam Prespektif Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015	36	67
27.	Temuan-Temuan Pokok dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Dari Hasil-Hasil Penelitian PSEKP 2016	30	42

No	Judul	Views	Unduh
28.	Panel Petani Nasional: Rekontruksi Agenda Peningkatan Kesejahteraan Petani	34	60
29.	Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan: Agenda Inovasi Teknologi dan Kebijakan	140	6,706
30.	Ragam Pemikiran Menjawab Isu Aktual Pertanian	30	79
31.	[PSEKP Talks] Mengukur Efektivitas Kebijakan Pertanian #1	44	17
32.	Toko Tani Indonesia: Membenahi Rantai Pasok dan Stabilisasi Harga Pangan	27	98
33.	Pengembangan Kelembagaan Kemitraan Usaha Hortikultura di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Bali	41	854
34.	Posisi Indonesia dalam Perundingan Perdagangan Internasional di Bidang Pertanian: Analisis Skenario Modalitas	38	112
35.	Situasi Harga Pangan Global: Saatnya Mewaspadaai Efek Berantai Harga Pangan di Pasar Domestik	7	11
37.	Agro-Socioeconomic Newsletter. Vol. 15 No. 1, April 2022	18	46
38.	Agro-Socioeconomic Newsletter. Vol. 16 No. 1, April 2023	5	0
39.	Agro-Socioeconomic Newsletter. Vol. 16 No. 2, April 2023	1	0
Total		1,640	12,945

e. **Kualitas Layanan Perpustakaan**

Tidak Untuk mengukur kualitas layanan perpustakaan, dilakukan survei kepuasan layanan Perpustakaan PSEKP. Responden dari survei ini adalah para pemustaka atau pengguna perpustakaan, baik secara langsung maupun online. Evaluasi layanan Perpustakaan PSEKP diukur dengan menggunakan metode SERVQUAL atau service quality. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengukur sejauh mana persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan dengan mengacu pada lima indikator utama, yaitu bukti fisik (*tangibles*), kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*emphaty*). SERVQUAL menjadi salah satu metode yang paling populer dalam menilai kualitas layanan, terutama dalam konteks layanan kepada konsumen seperti perpustakaan. Dengan menerapkan metode ini, Perpustakaan PSEKP berupaya memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi standar kualitas yang tinggi dan dapat memuaskan para penggunanya.

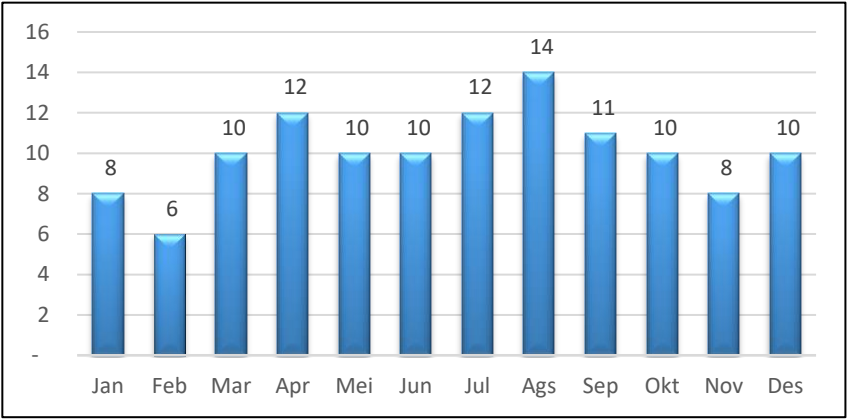
Tabel 33. Hasil survei kepuasan layanan Perpustakaan PSEKP

Indikator	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Bukti Fisik (<i>Tangibles</i>)	3,68	3,71	3,73	3,68
Kehandalan (<i>Reliability</i>)	3,58	3,51	3,51	3,58
Daya Tanggap (<i>Responsiveness</i>)	3,70	3,60	3,63	3,70
Jaminan (<i>Assurance</i>)	3,61	3,56	3,54	3,61
Empati (<i>Emphaty</i>)	3,64	3,73	3,64	3,64
Skor Rata-rata	3,64	3,62	3,61	3,64

Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna terhadap layanan Perpustakaan PSEKP, diperoleh hasil survei dengan total skor rata-rata kepuasan pengguna selama tahun 2024 adalah sebesar 3,63, di mana skor ini melebihi target dari 3,25.

f. Promosi Perpustakaan

Upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan, perpustakaan telah melakukan beberapa kegiatan promosi dengan menggunakan media sosial whatsapp group, Instagram, dan fanpage facebook.



Gambar 24. Jumlah konten promosi perpustakaan per bulan, 2024

Promosi perpustakaan melalui media sosial ini dirancang untuk memastikan perpustakaan mampu menjawab kebutuhan informasi pengguna secara efektif dan efisien. Selama tahun 2024, total konten promosi Perpustakaan PSEKP sebanyak 121 konten.

Konten promosi berupa video Kliping Berita Pertanian Sepekan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan memperkenalkan koleksi perpustakaan secara lebih luas; flyer KOPERTANI (KOLEksi PERpusTakaan terkiNI) yang menginformasikan isi koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan PSEKP; dan flyer ucapan hari besar..

g. Perpustakaan Terinspirasi

Akuntabilitas kinerja Perpustakaan PSEKP juga telah mendapatkan pengakuan lebih luas. Pada bulan September 2024, Perpustakaan PSEKP menerima penghargaan sebagai Perpustakaan Terinspirasi lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas inovasi layanan, konsistensi dalam meningkatkan aksesibilitas koleksi digital, dan program literasi yang berdampak luas. Pengakuan ini menjadi motivasi bagi perpustakaan untuk terus memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pengembangan kebijakan sektor pertanian.

Selama tahun 2024, Perpustakaan PSEKP telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan yang relevan, efisien, dan berkualitas. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa layanan di

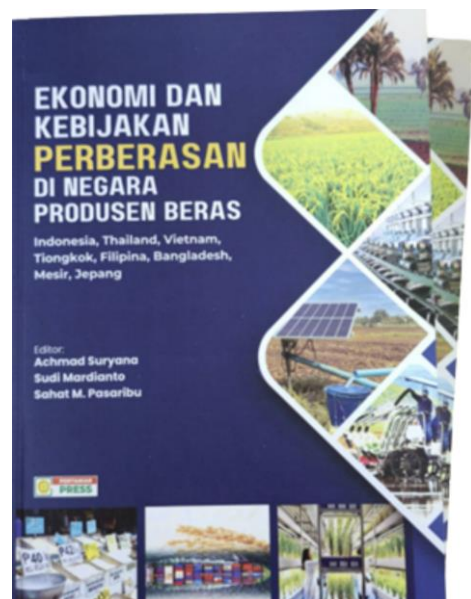
Perpustakaan PSEKP sudah memenuhi sebagian besar ekspektasi pengguna. Skor rata-rata survei kepuasan layanan perpustakaan sebesar 3,63 mengindikasikan bahwa sebagian besar pengunjung merasa puas dengan layanan yang diberikan, meskipun ada beberapa area yang dapat diperbaiki. Perpustakaan PSEKP tetap perlu mempertahankan kualitas fasilitas fisik yang sudah baik, sambil melakukan inovasi untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Sedangkan untuk meningkatkan penguatan responsivitas dan empati, perlu dilakukan peningkatan pelatihan pengelola perpustakaan sebagai upaya prioritas untuk peningkatan daya responsif terhadap kebutuhan pengguna.



Gambar 25. Perpustakaan PSEKP menerima penghargaan sebagai Perpustakaan Terinspirasi Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024

6.3. Launching Buku Perberasan

Beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik, sehingga fluktuasi harga beras berdampak langsung terhadap pencapaian ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Beberapa negara di dunia dengan dinamika ekonomi beras yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem pangan nasional antara lain Indonesia, Thailand, Filipina, Jepang, Vietnam, Tiongkok, Bangladesh, dan Mesir, telah dan sedang melakukan tata kelola sistem komoditas padi/beras melalui berbagai instrumen kebijakan. Langkah ini ditempuh dengan harapan dapat menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan dan menjamin kesejahteraan para petaninya.



Buku berjudul “Ekonomi dan Kebijakan Perberasan di Negara Produsen Beras” merupakan output konferensi internasional yang diselenggarakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) pada bulan Oktober 2023. Tema konferensi internasional tersebut adalah *Strategic Measures towards Resilience of Rural Resources and Sustainable Rice Supply Chain*. Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait tata kelola dan kebijakan perberasan di beberapa negara produsen dunia, dan *lesson learned* yang diperoleh dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan ekonomi perberasan dan para akademisi di Indonesia.



Buku tersebut merupakan kumpulan materi dari para penyaji utama pada acara konferensi internasional, yaitu para Duta Besar Republik Indonesia atau yang mewakili dari negara produsen beras, yaitu Thailand, Filipina, Jepang, Vietnam, Tiongkok, Bangladesh, dan Mesir, serta dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen Tanaman Pangan), Kementerian Pertanian. Pembelajaran bagi pembangunan pertanian Indonesia yang diperoleh dari materi tujuh negara produsen beras tersebut, dari aspek produksi adalah (a) Melaksanakan upaya produksi dan produktivitas melalui perluasan lahan baku padi dan peningkatan IP padi, dan pemanfaatan teknologi frontier; (b) Meningkatkan efisiensi usahatani padi; (c) Pemberian insentif yang langsung diterima petani; dan (d) upaya perlindungan petani dengan mendorong petani memanfaatkan asuransi pertanian. Pada aspek konsumsi, pembelajaran bagi Indonesia menyangkut upaya untuk mengerem pertumbuhan atau bahkan menurunkan tingkat konsumsi per kapita, sedangkan pada aspek distribusi dan perdagangan adalah bagaimana memastikan stabilitas ketersediaan pasokan pangan dan harga beras dan menjamin kecukupan pangan masyarakat.

Buku Ekonomi dan Kebijakan Perberasan sudah diluncurkan pada tanggal 23 Desember 2024 bertempat di Aula Ismunadji PSEKP. Acara launching menghadirkan penyaji isi buku oleh Prof. Achmad Suryana dan pengulas buku oleh Prof. Dr. Hasil Sembiring dengan peserta dari berbagai kalangan yang terkait seperti para akademisi, praktisi dan pemerintah.

VII. EVALUASI DAN PELAPORAN

7.1. Kegiatan Evaluasi

Struktur organisasi Tim Kerja Evaluasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian PSEKP berada dalam lingkup Kelompok Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sesuai dengan Kepmentan Nomor 608/KPTS/OT.050/M/11/2024. Secara umum cakupan tugas Tim Kerja Evaluasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, antara lain: (1) mengkoordinir kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan analisis kebijakan, (2) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan manajemen/pelayanan dukungan analisis kebijakan dan administrasi institusi, (3) melaksanakan kegiatan seminar proposal dan hasil analisis kebijakan, (4) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN), dan (5) menyusun berbagai laporan institusi yang bersifat reguler maupun non reguler, baik untuk keperluan, Sekretariat Jenderal maupun Kementerian Pertanian. Tugas pelaporan dilaksanakan secara paralel dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Koordinasi kegiatan monev dilaksanakan mulai dari pelaksanaan seminar proposal dan kerangka acuan kerja, penyusunan dan perbaikan proposal operasional, penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) analisis kebijakan, penyusunan *outline* analisis kebijakan, penyusunan kuesioner, penyusunan review/pustaka terkait analisis kebijakan yang akan dilaksanakan, penyusunan laporan kemajuan, seminar hasil analisis kebijakan, pengecekan kelengkapan laporan akhir hasil hingga penyusunan bahan diseminasi hasil analisis kebijakan. Secara umum pelaksanaan kegiatan monev pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Terkait dengan kegiatan pelaporan, Tim Kerja Evaluasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian bertugas menyusun berbagai macam laporan dari hasil analisis kebijakan untuk kepentingan institusi yang ditujukan kepada *stakeholders* atau pengguna lainnya. Laporan yang bersifat bulanan adalah bahan untuk Rapat Pimpinan tingkat Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian, Laporan *Output* Utama, *up-dating* e-monev BAPPENAS, dan *up-dating* e-SAKIP.

Terkait dengan kegiatan pelaporan, Tim Kerja Evaluasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian bertugas menyusun berbagai jenis laporan seperti hasil kegiatan analisis kebijakan untuk kepentingan institusi yang ditujukan kepada *stakeholders* atau pengguna lainnya. Penyusunan laporan yang sifatnya rutin bulanan adalah bahan untuk Sekretariat Jenderal dan laporan kinerja penyerapan anggaran melalui aplikasi SAKTI terintegrasi, serta pelaporan pada aplikasi *e-monev* BAPPENAS.

Kegiatan lain yang cukup penting dan sudah terlaksana dengan baik adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) yang bersifat rutin tahunan. LAKIN merupakan laporan yang berisi kinerja institusi pada tahun yang bersangkutan. LAKIN PSEKP dari tahun ke tahun mengalami perbaikan dan penyempurnaan, khususnya menyangkut format laporan. Penyusunan LAKIN PSEKP sampai saat ini tidak mengalami hambatan yang berarti, kecuali cukup sulit dalam melakukan pengukuran manfaat dan dampak hasil kegiatan analisis mengingat

output yang dihasilkan bukanlah berupa teknologi yang bersifat *tangible* (teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan rumusan rekomendasi kebijakan yang bersifat *intangible*. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil kegiatan analisis PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak baru terlihat setelah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.

Pelaporan rutin tahunan lainnya yang juga telah dilakukan dengan baik adalah Laporan Tahunan PSEKP tahun 2023 yang menguraikan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum, Kelompok Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, serta Kelompok Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Materi pokok yang disajikan dalam laporan tahunan tersebut meliputi organisasi PSEKP, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, program, pendayagunaan hasil analisis dengan publikasi, dan kegiatan kerja sama, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, dalam Laporan Tahunan 2023 disajikan pula sinopsis hasil-hasil kegiatan analisis kebijakan yang telah dilakukan PSEKP selama tahun 2023.

7.2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan analisis kebijakan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang bersifat netral. Selain kegiatan analisis kebijakan yang dilakukan analisis kebijakan dan fungsional tertentu lainnya seperti fungsional statistisi, pranata komputer, serta lainnya, diperlukan juga dukungan pelayanan institusi secara keseluruhan. Keduanya diperlukan dalam satu kesatuan yang saling terkait secara fungsional sehingga dapat memperoleh keluaran (*output*) analisis kebijakan sesuai kebutuhan pengguna (*stakeholders*). Kegiatan monitoring dan evaluasi (*monev*) sangat membantu dalam memberikan umpan balik (*feed back*) untuk menyempurnakan sistem yang ada menjadi lebih baik.

Kegiatan *monev* PSEKP selama tahun 2024 mencakup *monev* kegiatan analisis kebijakan dan *monev* kegiatan pendukung. *Monev* kegiatan analisis kebijakan dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan mulai dari: (1) tahap persiapan dengan materi meliputi: proposal/KAK operasional, juklak kegiatan analisis kebijakan, rencana laporan (*outline*), serta kuesioner (*outline* kuesioner data primer dan sekunder); (2) tahap pelaksanaan analisis kebijakan dengan materi meliputi: kuesioner, laporan perjalanan, *entry/input* data (baik data primer maupun sekunder); (3) tahap pengolahan data dan penulisan dengan materi meliputi pengolahan data, tabulasi, dan tabel analisis data primer dan sekunder, serta draft laporan; (4) seminar akhir berupa advokasi dan diseminasi hasil analisis kebijakan, dan laporan final. Sedangkan *monev* pelayanan dilakukan terhadap kelengkapan administrasi dan kinerja pelayanan sebagai pendukung kegiatan analisis kebijakan, yang meliputi pelayanan keuangan, pengolahan data atau komputerisasi, perpustakaan, publikasi, kendaraan dan sarana kegiatan. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan agar hasil-hasil analisis kebijakan dapat berkualitas dan bermanfaat bagi para pengguna.

7.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TA 2024

Pelaksanaan kegiatan Monev kajian analisis kebijakan lingkup PSEKP TA 2024 dilakukan oleh Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi yang ditugaskan oleh Kepala Pusat melalui Keputusan Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nomor 27/KPTS/LB.050/A.11/01/2024. Tugas Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi adalah: (1) melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan mulai tahap awal hingga akhir, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi jika terjadi penyimpangan, (2) memberikan penilaian terhadap hasil analisis kebijakan menurut tahapan sekaligus memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, dan (3) melaporkan hasil kerja kepada Kepala Pusat secara berkala atau pada saat diperlukan serta mentaati ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi terfokus pada kegiatan analisis kebijakan mulai penyusunan proposal/KAK operasional hingga penyusunan laporan hasil. Sementara tahapan penjaringan judul analisis hingga tersusunnya proposal/KAK merupakan bagian tugas Tim Teknis. Sedangkan Tim Editor bertugas menangani *output* analisis kebijakan menjadi berbagai produk publikasi ilmiah yang ditujukan baik untuk *stakeholders* maupun pengguna lainnya.

Secara garis besar Tim Kerja Evaluasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian telah mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan analisis kebijakan, mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dukungan analisis kebijakan dan administrasi institusi, melaksanakan kegiatan seminar proposal berupa penajaman rumusan masalah kebijakan, seminar kemajuan kegiatan analisis, dan seminar akhir tahun berupa advokasi dan diseminasi, mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan hasil analisis kebijakan, laporan institusi, baik untuk keperluan Sekretariat Jenderal maupun Kementerian Pertanian, dan Laporan Kinerja (LAKIN).

7.3.1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Analisis Kebijakan

Agar tercipta kesesuaian antara perencanaan (*input*), pelaksanaan analisis kebijakan dan pengolahan data/informasi (proses), serta pelaporan (*output*), maka perlu dirancang metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang baik agar tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat tercapai. Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan analisis kebijakan PSEKP tahun 2024 menggunakan Juklak Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2024. Kegiatan monev pada tahun 2024 ini ditujukan terhadap dua judul kegiatan analisis kebijakan periode satu tahun, satu judul kegiatan koordinasi, bimbingan dan dukungan teknis supervisi dan pendampingan program strategis Kementan yaitu pendampingan pompanisasi, rancang bangun pembangunan pertanian 2025-2029, empat judul kegiatan analisis kebijakan periode semester 1, serta satu paket kegiatan analisis kebijakan responsif yang sumber dana berasal dari APBN (DIPA) TA 2024.

a. Monitoring dan Evaluasi Tahap Awal

Perencanaan merupakan tahap awal dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim analisis kebijakan dan seluruh bidang pelayanan di lingkup PSEKP. Perencanaan yang dilakukan menyangkut tiga aspek, yaitu: (a) jenis dan lokasi kegiatan yang akan dilakukan, (b) susunan tim dan jadwal kegiatan, dan (c) rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Setiap tim analisis kebijakan dan bidang pelayanan hendaknya menyusun perencanaan yang menyangkut ketiga aspek tersebut. Tujuannya adalah agar dapat dirancang sinkronisasi antara kegiatan analisis kebijakan dan kegiatan pelayanan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi.

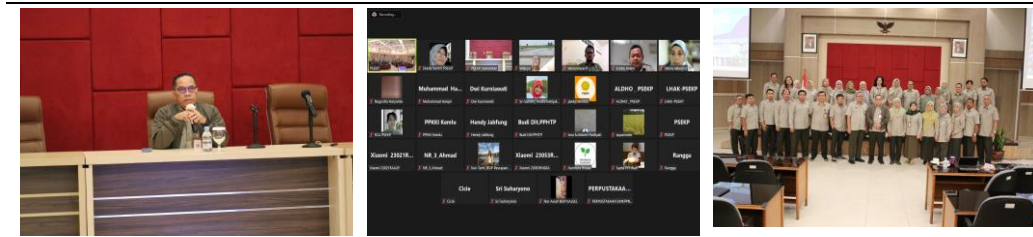
Pada tahap awal, pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan di lingkup PSEKP secara substantif meliputi dua kegiatan, yaitu: (a) menyusun proposal/KAK operasional yang merupakan acuan bagi seluruh rangkaian kegiatan analisis kebijakan, dan (b) mempersiapkan bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan yang telah dirancang dalam proposal/KAK operasional, seperti petunjuk pelaksanaan (juklak), kuesioner, rencana kerangka laporan hasil (*outline*), dan penulisan tinjauan pustaka yang terkait dengan topik analisis kebijakan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan tersebut memiliki peranan penting untuk menghasilkan analisis kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan pertanian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Proposal/KAK yang disusun dengan baik menurut kaidah-kaidah ilmiah diharapkan dapat menghasilkan luaran kegiatan yang berkualitas. Oleh karena itu, proposal/KAK harus didukung dengan bahan dan perlengkapan yang memadai, seperti petunjuk pelaksanaan dan kuesioner sebagai pedoman pelaksanaan analisis kebijakan serta pengumpulan data primer dan data sekunder di lapangan. Kegiatan monitoring evaluasi pada tahap awal bertujuan untuk menyempurnakan bahan kelengkapan survei.

Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi tahap awal pada tahun 2024 diawali dengan kegiatan seminar proposal/KAK operasional berupa penajaman rumusan rancangan kebijakan untuk mengevaluasi relevansi analisis kebijakan yang akan dilakukan dengan masalah pembangunan pertanian di tingkat nasional. Seminar proposal/KAK operasional kegiatan analisis kebijakan PSEKP TA 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 di Auditorium Dr. Ismunadji dan zoom meeting PSEKP. Jumlah proposal/KAK yang diseminarkan pada tahun 2024 sebanyak enam judul yang sumber dananya berasal dari DIPA PSEKP. Kegiatan seminar proposal/KAK bertujuan untuk mempertajam dan menyempurnakan arah, tujuan serta sasaran kegiatan analisis kebijakan PSEKP pada TA 2024. Kegiatan seminar proposal/KAK operasional PSEKP DIPA TA 2024 dilakukan dengan mengundang berbagai *stakeholders* terkait, yaitu Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan lingkup Kementerian Pertanian; seluruh manajemen, pejabat fungsional perencana, statistisi, dan pegawai PSEKP.

Dalam upaya mempertajam dan menyempurnakan arah, tujuan serta sasaran kegiatan hasil analisis kebijakan, diundang sebagai pembahas Prof. Dr. Achmad Suryana (Guru Besar UIKA Bogor), Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S (Dosen Polbangtan Bogor), Dr. Ketut Kariyasa (Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian), Iman Kustiaman, S.H., M.H. (Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian

Perdagangan), Dr. Ir. Lely Nuryati, M.Sc. (Kepala PPVTPP, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian), dan Dr. Abdul Basit (Perencana Ahli Utama, Kementerian Pertanian). Langkah ini ditempuh agar rencana kegiatan analisis kebijakan yang disusun dalam proposal/KAK operasional dapat dievaluasi secara obyektif oleh pihak lain, terutama yang menyangkut kaidah-kaidah ilmiah dalam pelaksanaan kegiatan, serta sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Hasil seminar proposal/KAK ini selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka penajaman proposal operasional. Pelaksanaan seminar proposal /KAK TA 2024 seperti yang terlihat pada Gambar 14.



Gambar 26. Seminar proposal/KAK tim analisis kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 29 Februari 2024

Berdasarkan hasil seminar proposal/KAK tersebut, selanjutnya Tim Analis Kebijakan melakukan penyempurnaan proposal/KAK operasional. Kemudian dilakukan diskusi internal untuk mengevaluasi perbaikan proposal/KAK operasional sesuai dengan masukan dari hasil seminar yang telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi perbaikan proposal/KAK operasional tersebut selain mengacu hasil koreksi Tim Monev juga mengacu pada notulen seminar proposal/KAK. Langkah ini merupakan cara yang ditempuh dalam memantau dan mengevaluasi kesiapan tim untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal/KAK operasional. Tujuan diskusi tersebut adalah: (a) untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, (b) evaluasi materi dan penyempurnaan bahan pengumpulan data lapangan, baik data primer maupun data sekunder, dan (c) menciptakan sinkronisasi kegiatan yang akan dilakukan oleh tim dengan bidang pelayanan terkait.

Dalam monitoring dan evaluasi internal tersebut dilihat pula aspek yang berkaitan dengan kelengkapan pelaksanaan kegiatan, yaitu: kesesuaian proposal/KAK operasional, petunjuk pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan (juklak), rencana kerangka laporan hasil dan kuesioner. Hasil penilaian kegiatan monitoring dan evaluasi untuk masing-masing tim selanjutnya dimasukkan dalam tiga kategori penilaian, yaitu: (1) kategori I: tidak bermasalah, artinya jika ada perbaikan dapat dilakukan tanpa menghentikan kegiatan analisis kebijakan, (2) kategori II, perlu perbaikan bahan kelengkapan survei sesuai rekomendasi, artinya tim harus melakukan perbaikan sebelum turun ke lapang, dan (3) kategori III, perlu perbaikan bahan kelengkapan survei sesuai rekomendasi, setelah perbaikan tersebut disetujui oleh Kepala PSEKP maka Tim analisis kebijakan dapat melakukan kegiatan lapang.

b. Laporan Perjalanan

Pembuatan laporan perjalanan oleh tim analisis kebijakan bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapang agar dapat diantisipasi pemecahan masalahnya, (2) mendapatkan bahan perumusan kebijakan dari temuan dan isu-isu aktual hasil temuan di lapang, (3) tertib administrasi, dan (4) penyempurnaan rencana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Rincian obyek monitoring dan evaluasi untuk laporan perjalanan mencakup:

- (1) Perkembangan pengumpulan data (primer dan sekunder) sesuai dengan rencana yang dirumuskan dalam proposal/KAK.
- (2) Temuan dan isu aktual yang perlu ditindaklanjuti. Salah satu tujuan monitoring dan evaluasi tahap ini adalah untuk memperoleh bahan *policy brief*.
- (3) Jadwal kegiatan. Pengecekan jadwal kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan dan penyempurnaan rencana kegiatan selanjutnya.
- (4) Penyelesaian administrasi. Secara administratif, serapan dana harus seimbang dengan volume kegiatan analisis kebijakan yang telah dilakukan. Oleh karena itu penyelesaian administrasi yang terkait dengan perjalanan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (5) Temuan masalah dalam pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan. Dalam proses pengumpulan data di lapang kemungkinan akan ditemui berbagai masalah dan hambatan, oleh karena itu dengan kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat diupayakan solusi pemecahannya.

Laporan perjalanan dibuat sesuai dengan frekuensi perjalanan tim analisis kebijakan ke lapangan. Secara umum, seluruh tim pada tahun anggaran 2024 telah menyusun laporan perjalanan dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain adalah: kurang terbukanya beberapa instansi serta responden tertentu, seperti pedagang besar, eksportir, dan industri pengolahan hasil pertanian sehingga kesulitan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, juga refocusing anggaran yang menghambat kegiatan analisis kebijakan ke lapangan.

c. Pengolahan Data

Monitoring dan evaluasi terhadap pengolahan data dilakukan untuk mengantisipasi masalah dalam pengolahan data serta meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian pengolahan dan analisis data. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan ini adalah target atau rencana penyelesaian dibanding tingkat pencapaian pada masing-masing tahap kegiatan. Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi pada pengolahan data dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan masing-masing tim. Untuk keteraturan pelaksanaan pengolahan data, telah dibuat aturan bahwa setiap tim yang akan berangkat ke lapangan (dimulai pada tahap II) harus sudah menyerahkan isian kuesioner

dari survei tahap sebelumnya. Isian data dalam kuesioner harus sudah teredit dengan baik oleh Tim analisis kebijakan.

Data yang diolah dalam kegiatan pengolahan data ini meliputi data primer dan sekunder yang mendukung kegiatan analisis kebijakan. Data primer biasanya diperoleh melalui wawancara di lapang, baik di tingkat petani, kelompok tani, atau lembaga perdesaan lainnya, penggilingan padi, industri pengolahan hasil pertanian, pedagang, eksportir, dan lain-lain, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran data-data yang dipublikasikan oleh instansi terkait maupun melalui internet. Data primer yang diolah dari kuesioner jumlah dan ketebalannya bervariasi setiap tim. Jumlah kuesioner yang besar dari masing-masing tim membutuhkan pengaturan dalam pengerjaannya, terutama pada tahap *entry data* dan proses validasi data. Proses *input data* dan pengolahan data menggunakan sistem FIFO (*First In First Out*), artinya tim yang menyerahkan kuesioner lebih dulu akan di-*entry* dan diolah lebih dulu, demikian seterusnya sehingga tercipta kelancaran dalam kegiatan pelayanan data. Tahun 2024 ini hampir sebagian besar tim yang melakukan pengolahan data secara mandiri, kegiatan PATANAS yang dibantu oleh tim pengolah data.

d. Monitoring dan Evaluasi Tengah Tahun

Kegiatan advokasi dan diseminasi hasil kegiatan analisis kebijakan tengah tahun dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024 di Auditorium Ismunadji dan zoom meeting PSEKP, Bogor. Bertindak sebagai penanggung adalah penanggung yang sama pada saat kegiatan seminar proposal/KAK operasional kegiatan analisis kebijakan. Tujuan utama kegiatan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan adalah untuk: (1) meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil penelitian, (2) meningkatkan kualitas hasil analisis, dan (3) memonitor hasil monev sebelumnya secara berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan kegiatan analisis dapat selesai tepat waktu dan diperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan pengalaman, kontrol yang cukup ketat terhadap penyusunan laporan tengah tahun sangat membantu ketepatan tim analisis kebijakan dalam menyelesaikan laporan hasil analisis sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Format dan isi laporan kemajuan sudah dipandu dalam Pedum Monev. Berdasarkan format laporan kemajuan, maka tim analisis kebijakan periode tahunan sebenarnya telah mempersiapkan sebagian draft laporan hasil analisis.



Gambar 27. Kegiatan monitoring dan evaluasi tengah tahun kajian analisis kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 13 Agustus 2024

Secara umum seluruh Tim Anjak telah menyusun laporan kemajuan dengan baik sesuai format yang ditentukan. Selain itu, tim analisis umumnya juga telah menyerahkan laporan kemajuan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tim analisis dapat melanjutkan proses penyelesaian kegiatan dengan melaksanakan kegiatan survei lapang, proses pengolahan data dan penyelesaian draft laporan akhir. Sementara untuk Tim analisis kebijakan periode semesteran, output yang dihasilkan pada kegiatan monev tengah tahun adalah laporan akhir analisis.

e. Monitoring dan Evaluasi Tahap Akhir

Kegiatan seminar PSEKP merupakan mata rantai penting dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tahap akhir untuk penyempurnaan hasil analisis kebijakan. Kegiatan advokasi dan diseminasi hasil kegiatan analisis kebijakan sekaligus dengan *launching* buku” Ekonomi dan Kebijakan Perberasan di Negara Produsen Beras” dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2024 di Auditorium Ismunadji dan zoom meeting PSEKP, Bogor. Kegiatan seminar hasil dan *launching* buku tersebut bertujuan untuk mempertajam dan menyempurnakan hasil kegiatan analisis kebijakan PSEKP untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pada TA 2024. Kegiatan seminar hasil analisis kebijakan PSEKP TA 2024 dilakukan dengan mengundang berbagai *stakeholders* terkait, yaitu Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian; Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian; dan instansi di luar Kementerian Pertanian seperti BRIN, IPB, serta seluruh manajemen, pejabat fungsional, dan pegawai PSEKP (Gambar 15).

Kegiatan seminar hasil difokuskan kepada konsistensi antara judul, tujuan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Umpan balik yang diperoleh dalam seminar hasil tersebut digunakan untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan akhir kegiatan analisis kebijakan serta penyusunan *Policy Brief*.



Gambar 28. Kegiatan advokasi dan diseminasi hasil kajian analisis kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 23 Desember 2024

e. Draft Laporan Akhir Kajian

Penulisan draft laporan akhir analisis kebijakan merupakan salah satu tahap atau mata rantai penting dalam proses pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan. Pada tahapan ini, jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan atau hasil yang diperoleh tim dapat segera dilakukan

koreksi atau penyesuaian. Indikator evaluasi terdiri atas empat komponen utama, yaitu: (1) konsistensi proposal dengan laporan hasil analisis kebijakan, (2) koherensi pelaporan terkait kedalaman dan ketajaman hasil pembahasan, perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan, (3) aspek editorial yang menyangkut redaksional, penyajian tabel, kelengkapan pustaka, dan (4) ketepatan waktu penyelesaian laporan dan konsistensi format serta isi laporan sesuai dengan Juklak Monev TA 2024.

Pada tahap penyusunan draft laporan akhir, ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu: (1) konsistensi antara proposal dan draft laporan hasil analisis kebijakan, (2) perlunya perbaikan dari segi koherensinya, dan (3) perlunya penyempurnaan dari sisi redaksional. Dari sisi substansi, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa secara umum Tim analisis kebijakan telah menyusun draft laporan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, konsistensi antara judul, tujuan, metodologi, hasil dan pembahasan dan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan secara umum telah tersusun dengan baik. Terkait ketepatan waktu dalam penyelesaian laporan akhir, secara umum sudah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Draft laporan hasil analisis kebijakan yang dievaluasi diharapkan sudah mengakomodir seluruh masukan dari seminar.

Berdasarkan hasil evaluasi, Tim melakukan perbaikan/revisi draft laporan akhir menjadi Laporan Akhir Analisis Kebijakan Tahun 2024. Pada setiap akhir tahun anggaran, Tim analisis kebijakan selain menyelesaikan laporan akhir, juga harus menyusun *Policy Brief* (dalam Bahasa Indonesia dan *optional* dalam Bahasa Inggris) dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan akhir perlu mendapatkan penekanan khusus karena merupakan produk akhir yang akan menjadi bahan referensi untuk kegiatan analisis kebijakan lanjutan atau kegiatan lain yang relevan. Dalam rangka diseminasi hasil analisis kebijakan terdapat sejumlah *output* yang perlu dikomunikasikan kepada *stakeholders* utama dan masyarakat pengguna iptek sosial ekonomi dalam arti luas. Bahan diseminasi tersebut meliputi bahan rapat pimpinan di tingkat Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian, materi untuk forum diskusi *ad hoc* di PSEKP, forum tingkat nasional, bahan publikasi/penerbitan ilmiah (baik terbitan PSEKP maupun di luar PSEKP) dan bahan laporan tahunan PSEKP TA 2024. Tim analisis kebijakan wajib menyiapkan bahan diseminasi tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga pemerintah, PSEKP diharapkan mampu memberikan hasil-hasil analisis kebijakan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya. Pengguna hasil-hasil analisis kebijakan PSEKP secara umum adalah *stakeholders* pembangunan pertanian di tingkat pusat, daerah, dan akademisi. Mengingat hasil analisis kebijakan PSEKP sangat bermanfaat bagi *stakeholders*, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam kegiatan mendatang seyogyanya mengakomodasikan aspirasi para pengguna hasil analisis kebijakan PSEKP, terutama para *stakeholders* di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian masukan dan saran dari *stakeholders* tersebut akan lebih menyempurnakan kegiatan analisis kebijakan yang akan dilakukan.

Penyusunan *policy brief* otoritas penilaiannya berada di tangan struktural dengan finalisasi koreksi dan saran perbaikan dari Kepala PSEKP. Di sisi lain, otoritas penilaian bahan publikasi PSEKP dilakukan sepenuhnya oleh Dewan

Redaksi. Dengan mengacu pada prosedur tersebut, maka evaluasi terhadap bahan diseminasi dalam konteks pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dibatasi sampai pada penentuan status materi tersebut. Hal tersebut merupakan kewajiban dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka statusnya adalah apakah tim telah memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan materi diseminasi tersebut. Kalau persyaratan kelengkapan pengajuan ini belum dipenuhi, perlu dikemukakan faktor-faktor penyebabnya sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya.

Keluaran atau *output* kajian (data dan laporan) lingkup PSEKP telah didokumentasikan secara baik. Dokumentasi data dibedakan atas data primer dan data sekunder. Dokumentasi yang terkait data primer meliputi: (1) kuesioner dan Buku Kode Variabel, dan (2) file data hasil *entry*. Dokumentasi yang terkait data sekunder meliputi: (1) dokumen asli, (2) dokumen olahan, dan (3) file data hasil pengolahan data. Secara umum hasil kegiatan sosial ekonomi dan kebijakan pertanian PSEKP dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

Pertama, sintesis pertimbangan dan advokasi kebijakan pembangunan pertanian. Hasil kegiatan ini digunakan untuk memberikan opsi rumusan kebijakan (sintesis), pemikiran akademis mengenai evaluasi kebijakan pembangunan pertanian (pertimbangan) dan memperjuangkan suatu kebijakan yang dianggap layak dan patut atau menolak kebijakan yang dianggap tidak layak dan tidak patut (advokasi). Sintesis kebijakan disampaikan langsung kepada pimpinan Kementerian Pertanian. Selain itu, PSEKP juga memiliki media reguler Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian sebagai sarana penyuluhan, diseminasi dan diskusi kebijakan.

Kedua, rekayasa model inovatif kelembagaan pembangunan pertanian. Kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengatur hubungan antarmanusia untuk penguasaan faktor produksi yang langka. Keberlanjutan sistem produksi dimungkinkan apabila inovasi teknologi dapat memberikan manfaat bagi pengguna. Mengingat pentingnya faktor kelembagaan dalam pembangunan pertanian, maka PSEKP memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aspek kelembagaan ini.

Ketiga, analisis deskriptif mengenai kinerja dan dinamika lingkungan strategis pembangunan pertanian yang meliputi: (1) ekonomi makro dan mikro serta perdagangan internasional, (2) pengelolaan sumber daya dan agribisnis berkelanjutan, (3) sistem inovasi teknologi pertanian, (4) ketahanan pangan dan kemiskinan, dan (5) dinamika sosial ekonomi perdesaan. Hasil kegiatan ini, berupa parameter mengenai perilaku ekonomi makro dan mikro untuk menunjang analisis maupun perumusan model kebijakan pembangunan pertanian. Parameter-parameter tersebut merupakan landasan untuk penyusunan model simulasi maupun analisis perumusan kebijakan. Hasil analisis deskripsi digunakan untuk menyusun *highlight* situasi terkini kinerja pembangunan pertanian dan lingkungan strategisnya. Laporan singkat ini dibuat dan disampaikan secara reguler kepada pimpinan Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan *well informed policy making*.

7.3.2. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Kajian Analisis Kebijakan

PSEKP dalam melaksanakan fungsi kegiatan analisis kebijakannya, didukung oleh beberapa aspek kegiatan, yaitu: pelayanan keuangan,

pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana prasarana. Kelima aspek tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka mendukung kegiatan analisis kebijakan di PSEKP. Dengan demikian diharapkan keluaran yang dihasilkan dapat berdaya dan berhasil guna serta sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja kegiatan analisis kebijakan.

a. Pelayanan Keuangan

Kegiatan analisis kebijakan perlu didukung pelayanan keuangan untuk kelancaran administrasi keuangan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelayanan keuangan adalah untuk meningkatkan ketepatan perencanaan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Instrumen kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelayanan keuangan adalah DIPA yang dirinci berdasarkan jenis pengeluaran, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sebelum pelaksanaan kegiatan ke lapang, kegiatan monitoring dan evaluasi juga melibatkan tim dengan pelaksana keuangan untuk penyesuaian jadwal keberangkatan dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan prosedur keuangan di lapang yang harus dilakukan oleh tim analisis kebijakan.

Indikator yang digunakan pada kegiatan ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan solusi pemecahan masalah. Dalam pelaksanaan kinerja keuangan yang berhubungan dengan kegiatan analisis kebijakan, terlihat adanya kemudahan dalam pencairan dana. Hal ini tampak dalam pencairan dana relatif berjalan lancar. Di samping kegiatan ke lapang, pencairan dana untuk perjalanan dinas ke wilayah Jabodetabek untuk pengumpulan data sekunder dan informasi lainnya juga mengalami kemudahan dan tertib administrasi.

b. Pelayanan Pengolahan Data

PSEKP dalam melaksanakan kegiatan analisis kebijakan didukung oleh pelayanan pengolahan data yang bertugas untuk menginput / *entry* data (primer dan sekunder) serta informasi yang diperoleh dari lapang serta mengolah data tersebut sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Indikator yang digunakan pada kegiatan monev layanan pengolahan data adalah: (1) sumber daya manusia (SDM), dan (2) *hardware*. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya manusia adalah: (1) jumlah orang, (2) pembagian kerja, dan (3) kompetensi. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi *hardware* adalah: (1) jumlah komputer tersedia, (2) kapasitas, dan (3) manajemen pemanfaatan *hardware*. Sedangkan indikator yang digunakan dalam jadwal kerja pengolahan data untuk setiap judul analisis kebijakan adalah: (1) perencanaan dan (2) pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan data, bila dilihat dari sisi pengadaan sarana prasarana telah tersedia dengan baik, seperti: jumlah tenaga input data, validasi data dan pengolahan data, perangkat komputer, printer, serta sarana pendukung lainnya. Ketersediaan sarana pengolahan data sudah cukup memadai. Unit pengolahan data, selain melakukan kegiatan pengolahan data hasil analisis kebijakan, juga melakukan kegiatan database

PSEKP, seperti *entry* data, *updating* data, dan melayani permintaan data sekunder untuk para analis kebijakan dan *stakeholders*. Mengingat banyaknya kegiatan tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan waktu sedemikian rupa sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Kondisi pada tahun 2024 juga tidak semua tim melakukan *entry* dan pengolahan data di layanan pengolahan data. Tim melakukan kegiatan *entry* dan pengolahan data sendiri.

c. Database

Seiring dengan perkembangan teknologi, data dan informasi untuk bahan analisis kebijakan sebagian diperoleh dari *database* yang dimiliki PSEKP. Data dan informasi selain dimanfaatkan untuk analisis/kajian perumusan kebijakan, juga diperlukan dalam menunjang implementasi kebijakan, monitoring, maupun evaluasi. Suatu rekomendasi kebijakan yang baik harus memenuhi syarat: tepat dalam memahami permasalahan, tepat dalam perumusan tujuan, konsisten dengan Haluan Negara, antisipatif terhadap dinamika empiris, dan realistis (dalam arti dapat diimplementasikan), berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak tanpa mengorbankan prinsip efisiensi dan keberlanjutan dalam pembangunan. Syarat-syarat seperti itu dapat dipenuhi hanya jika rekomendasi kebijakan dihasilkan dari suatu kegiatan, analisis, ataupun studi yang relevan dan berlandaskan prinsip-prinsip kegiatan ilmiah.

Dalam kegiatan ilmiah, peranan data sangat strategis. Bahkan pada hakekatnya nilai hasil kegiatan ilmiah sangat ditentukan oleh data dan informasi yang menjadi bahan analisisnya. Guna memenuhi kebutuhan terhadap data yang berkualitas dan dengan cepat dapat diperoleh, maka manajemen data merupakan salah satu aktivitas pokok dari suatu lembaga/instansi. Manajemen data yang baik bukan hanya membantu terciptanya pelaksanaan kajian yang baik tetapi juga mempermudah sistem verifikasi data dan informasi antar lembaga terkait.

Output yang dihasilkan oleh suatu lembaga yang terlibat dalam kegiatan analisis adalah data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta rekomendasi kebijakan. Oleh karena sifatnya untuk mendukung pemecahan masalah, maka hampir semua kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan *output* tersebut adalah kegiatan terapan. Sebagai pengguna utama, maka *stakeholder* terpenting adalah pemerintah. Meskipun demikian, *user* lain juga sangat banyak, misalnya para peneliti, mahasiswa, petani, peternak, wartawan, dan lain sebagainya. Sejak beberapa tahun yang lalu, PSEKP telah melakukan aktivitas manajemen data. Dalam kegiatan ini, tercakup tiga aspek: (a) pengembangan sistem informasi *database*, (b) pengembangan kapabilitas programmer dan analis, (c) pengembangan infrastruktur pendukung. Ketiga aspek itu mutlak dibutuhkan dalam mewujudkan sistem data yang berdaya guna. Saat ini SDM programmer dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas tim *database*.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan *database* tahun 2024 hasilnya cukup banyak dan bervariasi, yaitu dari membangun sistem informasi *database*, *updating* (pemutakhiran) data, *entry* data pada pengadaan data yang sudah dikelola oleh lembaga lain, seperti BPS, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Bulog, FAO dan sebagainya. Data-data yang diperoleh

selanjutnya dilakukan *editing* dan validasi agar data yang ditampilkan sesuai dengan sumbernya dan siap saji. Kegiatan *database* tahun 2024 merupakan kelanjutan dari kegiatan *database* yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, kegiatan *database* melakukan pemutakhiran data, penambahan jenis/subyek data yang dimasukkan ke dalam *database* PSEKP, serta melakukan penyusunan format *database* masih dalam bentuk *long-format* agar lebih memudahkan pengguna untuk pengambilan data dalam *database*. Dengan penyusunan format *database* dalam bentuk *long-format*, pemutakhiran dan perluasan jenis/subyek data yang dimasukkan ke dalam *database*; diharapkan pelaksanaan kegiatan kajian analisis kebijakan dapat didukung oleh *database* PSEKP. Data yang ditampilkan dalam *database* secara umum adalah series hingga tahun 2024, namun ada beberapa jenis data yang belum sampai ke data terkini (*current data*). Hal ini disebabkan beberapa kendala, seperti publikasi dari instansi terkait belum keluar, perubahan format tabel/jenis data yang ditampilkan oleh instansi terkait, dan sebagainya. Namun demikian, ke depan Tim *Database* akan terus melakukan pemutakhiran/*updating* data serta perluasan jenis data baru yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penelitian PSEKP. Tim *Database* juga pada tahun 2024 membangun aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) *Database* agar user dapat mencari sendiri data yang diperlukan.

Selain cakupan data sekunder, sejak tahun 2012 kegiatan *database* PSEKP mulai dilakukan inisiasi untuk menyusun data primer yang berasal dari hasil survei lapang kegiatan analisis kebijakan di lingkup PSEKP, di antaranya adalah kegiatan PATANAS dan kegiatan lainnya. Namun karena *refocusing* anggaran, beberapa kegiatan analisis kebijakan terkendala sehingga yang menggunakan data primer tidak banyak, dan sebagian besar mengolah dari data sekunder. Sehubungan dengan itu kegiatan penyusunan data primer ini dilanjutkan walaupun relatif terbatas, dengan demikian Tim *Database* lebih banyak mengolah data sekunder sesuai kebutuhan tim masing-masing (di luar kegiatan utama Tim *Database*).

7.3.3. Evaluasi Layanan Perpustakaan

Evaluasi layanan perpustakaan ditujukan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta memberikan rekomendasi perbaikan kedepan. Evaluasi layanan perpustakaan menjadi langkah kritis dalam memastikan bahwa perpustakaan tetap relevan dan memberikan layanan yang berkualitas kepada penggunanya. Evaluasi layanan Perpustakaan PSEKP menggunakan empat indikator sebagai dasar penilaiannya, yaitu: ketersediaan koleksi, penggunaan fasilitas, kualitas pelayanan, dan promosi perpustakaan.

Penambahan koleksi baru dan koleksi digital bulanan pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Penambahan jumlah record pada beberapa aplikasi utama yang dikelola yaitu Katalog Induk Kementerian Pertanian (KIKP) dan repository Kementerian Pertanian. Penggunaan fasilitas diukur dari kunjungan onsite (201 orang), online (2.614.768 hits), dan pinjaman atau unduhan (15.267 transaksi). Kualitas layanan dievaluasi menggunakan metode SERVQUAL. Skor yang diperoleh sebesar 3,63 (melebihi dari target 3,25). Promosi perpustakaan menggunakan media sosial whatsapp group, Instagram, dan Fanpage Facebook. Total konten promosi perpustakaan sebanyak 121 konten.

7.3.4. Evaluasi Pelayanan Publikasi

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan publikasi, indikator yang digunakan dalam evaluasi ini adalah: (1) perencanaan, yang terdiri dari rencana penerbitan, rencana distribusi, dan jadwal, (2) distribusi, yang terdiri dari lingkup PSEKP, Badan Litbang Pertanian, Perguruan Tinggi, dan lainnya. Indikator perencanaan dan pelaksanaan yang dimaksud dalam konteks ini ditekankan pada penerbitan dan distribusi dari masing-masing penerbitan yang dilakukan PSEKP.

Salah satu tugas PSEKP adalah mengomunikasikan hasil-hasil kegiatan analisis kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dalam pelaksanaannya dapat berupa publikasi. Publikasi yang diterbitkan oleh PSEKP saat ini adalah: (1) Analisis Kebijakan Pertanian (AKP), (2) Prosiding hasil seminar, (3) Buku tematik, (4) Laporan tahunan, (5) *Newsletters*, dan (6) Laporan hasil analisis kebijakan.

Berbagai macam media publikasi tersebut disediakan oleh PSEKP dan digunakan sebagai wadah untuk menampung kebutuhan SDM dalam mempublikasikan tulisan atau makalahnya. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian adalah media ilmiah yang membahas isu aktual kebijakan pertanian yang memuat artikel analisis kebijakan pertanian dalam bentuk gagasan, dialog, dan polemik, diterbitkan dua kali dalam setahun.

Adanya berbagai media penerbitan ilmiah di PSEKP, maka SDM PSEKP dapat menyalurkan ide, pemikiran, dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan sosial ekonomi pertanian dengan baik. Bagi SDM yang kreatif akan semakin mudah dalam meningkatkan jenjang fungsionalnya. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa ketersediaan media yang cukup banyak tersebut sangat membantu SDM dalam meningkatkan dan memelihara jabatan fungsionalnya. Salah satu yang mungkin perlu mendapat perhatian manajemen adalah ketepatan waktu penerbitan yang masih belum seluruhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan perubahan birokrasi organisasi, dimana PSEKP saat ini bukan merupakan lembaga penelitian, maka ada dua publikasi ilmiah yang dikelola PSEKP yaitu Jurnal Agro Ekonomi (JAE) dan Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE) dialihkan pengelolaannya ke Perhimpunan Ekonomi Pertanian (PERHEPI).

Website dan Internet

Sebagai unit kerja yang khusus menangani kegiatan analisis kebijakan sosial ekonomi pertanian di Kementerian Pertanian, PSEKP telah lama membina hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam negeri maupun luar negeri. Seringkali institusi dalam dan luar negeri membutuhkan data dan informasi hasil kegiatan PSEKP. Sebagai institusi publik, maka sudah selayaknya jika PSEKP memiliki sarana untuk dapat menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna.

Pelayanan publikasi PSEKP juga telah membangun situs atau website sendiri dengan alamat: <http://www.psekp.setjen.pertanian.go.id> untuk lebih memberikan pelayanan yang optimal dan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan melalui diskusi dengan publik. Website ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat maupun *stakeholders* yang membutuhkan

data dan informasi mengenai kegiatan PSEKP dan layanan perpustakaan selama 24 jam penuh. Situs atau website tersebut juga menjadi sarana komunikasi hubungan kerja antara PSEKP dengan institusi lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini sedang dibuat tampilan baru untuk lebih memberikan kenyamanan dan kecepatan pengguna dalam mengakses situs PSEKP tersebut.

Juga telah dibangun perpustakaan digital, namun hanya dapat diakses dalam lingkungan kantor PSEKP melalui jaringan internet dengan alamat <http://digilib.litbang.pertanian.go.id/~psekp/>. Selain itu, sedang disusun program informasi opini yang dirancang untuk memberikan pandangan atau tanggapan terhadap masalah pembangunan pertanian terkini. Berita dan kegiatan PSEKP maupun Kementan juga dapat disebarluaskan melalui media sosial yang dikelola PSEKP yaitu facebook, twitter, instagram, dan youtube.

Selain website, PSEKP telah membangun jaringan internet di seluruh area kantor baik gedung A, B, maupun Auditorium Dr. Ismunadji. Layanan informasi tersebut dilakukan dengan pemasangan Access point Ruiji dan dilakukan manage service oleh CBN. Instalasi ini memiliki 2 unit switch yang masing-masing memiliki 24 port sehingga maksimal CPU yang dapat dijadikan jaringan adalah 48 unit terminal yang tersebar di seluruh gedung, mulai dari Gedung A di depan dan Gedung B di belakang. PSEKP juga telah menambah jalur backup fibre optic 2 jalur yang menjamin jaringan LAN tetap beroperasi jika salah satu jalur mengalami gangguan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Hal ini dapat dilakukan karena 2 jalur backup ini menggunakan 2 terminal box yang berbeda sehingga meningkatkan ketersediaan penggunaan jaringan yang maksimal.

Selain jalur backup, untuk peningkatan keamanan telah ditambahkan juga 1 unit sistem keamanan akses menggunakan switch firewall yang mampu melakukan filterisasi malware atau virus yang kemungkinan akan memasuki/menyerang jaringan LAN PSEKP. Pembangunan jaringan internet ini dimaksudkan agar para pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pegawai dapat mengakses perkembangan informasi secara cepat dan murah. Selain itu, adanya jaringan internet ini akan mempermudah analisis kebijakan dalam mengakses data dari berbagai institusi di seluruh dunia. Dengan demikian diharapkan kegiatan kajian analisis kebijakan sosial ekonomi pertanian dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

7.3.5. Sarana Kajian Analisis Kebijakan

Indikator yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelayanan sarana kegiatan analisis kebijakan adalah: (1) rencana pengadaan dan (2) realisasi pengadaan, yang terdiri dari jadwal, jenis, dan jumlah. Kedua indikator tersebut juga akan dilihat jika terdapat permasalahan yang dijumpai oleh pelayanan kegiatan dan cara pemecahan masalah.

Sarana kegiatan analisis kebijakan yang dimaksud dalam konteks ini adalah sarana alat tulis kantor (ATK) terdiri dari tonner, tinta printer, kertas, *flash disk*, dan lainnya. Setiap tim dapat mengajukan kebutuhan ATK sesuai keperluan untuk pelaksanaan kajian baik menjelang survei maupun saat kegiatan di kantor. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan, SDM telah dilengkapi fasilitas komputer dan jaringan

internet yang tersedia di setiap ruangan. Telepon penghubung antarruangan sehingga memudahkan komunikasi antarpegawai, baik di dalam kantor maupun menerima telepon dari luar kantor disediakan untuk kelancaran komunikasi internal kantor. Setiap ruangan telah dilengkapi dengan fasilitas *air condition (AC)* untuk kenyamanan kerja. Ruang rapat yang lengkap dengan fasilitas yang memadai juga sudah tersedia.

VIII. PENUTUP

Laporan Tahunan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilakukan organisasi sepanjang tahun 2024 mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani.

Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2024 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dan telah selaras dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada Renstra periode 2020-2024. Jumlah SDM saat ini ada 67 orang yang mendukung kinerja organisasi. Kegiatan layanan teknis diisi dengan kegiatan magang mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) dan IPB University. Pelaksanaan pendampingan magang yang dilakukan berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari pihak universitas.

Output kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2024 yang dimanfaatkan dan mendapat respon positif berupa 19 rekomendasi kebijakan, disampaikan dalam bentuk *policy brief* dan telaahan staf kepada pimpinan Kementerian Pertanian melalui Sekretaris Jenderal dan *stakeholder* lainnya. Selain itu ada kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan pihak donor dari ACIAR dan IFPRI, serta kegiatan swakelola dari BPDPKS untuk percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Hasil-hasil kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian didiseminasikan dalam bentuk jurnal, buku tematik, *news letter*, disebarikan melalui medsos dan website. Kinerja SDM juga didukung manajemen dengan fasilitasi perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang mendapat apresiasi sebagai salah satu perpustakaan terbaik dan terakreditasi nasional.

Keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan anggaran yang berasal dari APBN dan dana hibah. Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp20.422.166.000,00. Jumlah pagu DIPA PSEKP tahun 2024 tersebut mengalami revisi dengan adanya penambahan anggaran hibah dalam bentuk uang berupa belanja barang bersumber dari ACIAR dan IFPRI sebesar Rp78.106.000,00. Perkembangan pelaksanaan keuangan periode 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa realisasi capaian keuangan secara total mencapai Rp14.158.258.709,00 (69,33%), dengan demikian sisa anggaran per 31 Desember 2024 adalah Rp6.263.907.291,00 (30,67%). Sisa anggaran tersebut termasuk anggaran yang diblokir dalam mendukung efisiensi yang ditetapkan pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian selama tahun 2024 tidak luput dari berbagai permasalahan dan tantangan, tetapi hal ini tidak menjadi penghalang untuk menghasilkan kinerja terbaik. Kerja sama dan kolaborasi kegiatan yang akan dilakukan dengan pihak lain akan mendorong pelaksanaan kegiatan kedepan semakin maju, mandiri, dan modern.

